



LAPORAN KINERJA

BKK KELAS I PALEMBANG



2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang ini merupakan Amanat Peraturan Presiden No 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang adalah wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Kekarantinaan kesehatan Kelas I Palembang ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

14 Januari 2026

Kepala,

Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Palembang,



EMMILYA ROSA, SKM, MKM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini sebagai salah satu cara untuk melakukan evaluasi secara objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Penyusunan LAKIP Tahun 2025 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerjayang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi anggaran pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang beberapa indikator telah memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja BKK Kelas I Palembang Tahun 2025 menunjukkan peningkatan persentase capaian pada beberapa indikator dari target yang telah ditetapkan. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan

anggaran kegiatan. **Nilai total pagu anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang pada Tahun 2025 sebesar Rp 20.046.624.000,- Realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp16.614.677.759 atau mencapai 82,88% dari total pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan total pagu efektif, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,35%.** Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 99,66%, realisasi belanja barang sebesar 98,51%, dan realisasi belanja Modal sebesar 95,51%.

Dari 8 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dengan Direktur Jenderal P2 Kementerian Kesehatan RI, secara keseluruhan semua indikator telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Indeks deteksi faktor risiko di bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan realisasi capaian 0,99 dari target yang ditetapkan sebesar 0,92 sehingga persentase capaian 107,61%;*
2. *Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dengan realisasi capaian 100% dari target 100% yang ditetapkan sehingga persentase capaian 100,00%;*
3. *Indeks pengendalian faktor risiko di bandara/Pelabuhan/PLBDN dengan realisasi capaian 1.06 dari target sebesar 0,97 yang ditetapkan sehingga persentase capaian 109,27%*
4. *Nilai kinerja anggaran dengan realisasi capaian 94,64 dari target yang ditetapkan sebesar 88 sehingga persentase capaian 107,54%*
5. *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi capaian 97,39 dari 96 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 101,44%;*
6. *Kinerja implementasi WBK satker denganrealisasi capaian 94,19 dari 85 target yang ditetapkan sehingga persentase capaian 110,81%;*
7. *Persentase ASN yang di tingkatkan kompetensi nya dengan realisasi capaian 118,79% dari target yang di tetapkan yaitu 85% sehingga persentase capaian sebesar 139,75%;*
8. *Persentase realisasi anggaran dengan realisasi capaian 99,35% dari target yang ditetapkan sebesar 96% sehingga persentase capaian sebesar 103,48%*



Berdasarkan analisis capaian kinerja tahun 2025 dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi target yang sudah di tetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang;
2. Memenuhi sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan



BAB I

PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundungan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2025-2029, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 Sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan fondasi yang kuat menuju visi "Indonesia Emas 2045". Pada periode ini, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sistem



pendidikan, penurunan angka stunting, serta perluasan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang.

Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya International Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang kemudian berubah Nomenklatur berdasarkan Peraturan Meneteri Kesehatan (Permenkes) No 10 Tahun 2024 tentang perubahan nomenklatur dari Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan. Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 - RAK 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2025.

Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, BKK Kelas I Palembang telah menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjalinstansi Pemerintah yang wajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, BKK Kelas I Palembang pada awal tahun 2025 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan.



Issue Strategis

Pada tahun 2025, Kementerian Kesehatan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis untuk mewujudkan transformasi



Sistem Kesehatan Nasional yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan. Salah satu isu utama ketimpangan distribusi dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Isu lain yang krusial adalah tinggi beban penyakit menular dan tidak menular, seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, demam berdarah, hipertensi, diabetes, dan kankeryang terus meningkat menuntut sistem surveilans mendeteksi dini lebih kuat.

Balai Kekarantinaan Kesehatan yang memiliki tugas dan fungsi mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menularpotensi wabah di pintu masuk negara, turut berperan aktif dalam penanganan mendeteksi dini penyakit. Pegawai Balai Karantina Kesehatan melakukan skrining keadaan umum pelaku perjalanan dan memvalidasi dokumen penumpang perjalanan, kesehatan ABK dan crew pesawat. Balai Kekarantinaan Kelas 1 Palembang bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Palembang turut berperan aktif berpartisipasi melakukan tindak lanjut apabila ditemukan penyakit menular. Pengawasan dilaksanakan di Pintu masuk Pelabuhan dan Bandara. Kementerian Kesehatan menjawab tantangan Kesehatan dengan mencanangkan reformasi sistem kesehatan nasional yang diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan kedalam transformasi kesehatan. Perubahan renstra Kementerian Kesehatan harus dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi tersebut. Perubahan tersebut mencakup 6 pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi kesehatan nasional, diantaranya sebagai berikut :

- Transformasi Layanan Primer
- Transformasi Layanan Sekunder
- Transformasi Ketahanan Sistem Kesehatan
- Transformasi Pembiayaan dan Tata Kelola Kesehatan • Transformasi SDM Kesehatan
- Transformasi Teknologi Kesehatan



3

Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 visi nasional pembangunan jangka panjang (RPJPN) adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” didorong oleh transformasi sosial, ekonomi dan



tata kelola, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, pembangunan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Untuk mewujudkan negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan sesuai dengan RPJPN 2025 - 20245, Presiden terpilih tertuang dalam RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029 : "Indonesia Emas 2045" .

Adapun salah satunya adalah peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri nasional, pemberdayaan desa, serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang diiringi aksi anti korupsi. Untuk melaksanakan Visi Presiden 2025 - 2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden dibidang kesehatan yaitu memperkuat sistem kesehatan nasional. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional sesuai Visi dan Misi Presiden 2025-2029 adalah mencapai Indonesia sehat dan Pembangunan SDM yang berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ini mencakup peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan dasar, pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan sumber daya kesehatan Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni; "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Bekelanjutan" , maka ditetapkan 8 Misi Presiden 2025-2029 Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.
2. Mempercepat pembangunan ekonomi yang mengarah pada kemandirian bangsa dengan menjamin ketersediaan pangan, energi, air bersih, dan mengembangkan industri hijau.
3. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat perlindungan sosial.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antarwilayah.
5. Mempercepat hilirisasi dan industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.



8. Memperkuat kehidupan demokrasi yang beretika dan menjamin kebebasan berpendapat serta kebebasan pers yang bertanggung jawab

Guna meningkatkan kualitas manusia, melalui reformasi system Pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Kementerian Kesehatan melakukan dukungan sesuai RPJMN 2025-2029 membuat 4 Program Pembangunan yang terdiri dari :

- Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat
- Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan
- Penguatan Pelayanan Kesehatandan Tata Kelola

Kelembagaan

Balai Kekarantinaan Kesehatan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut, dan Undang-Undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara. Secara Kelembagaan eksistensi BKK didasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 tahun 2023 Perubahan nomenklatur KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) menjadi BKK (Balai Kekarantinaan Kesehatan). Pergantian nama KKP menjadi BKK tidak akan merubah fungsi, tetap menjadi point of entry (pintu-pintu masuk) di pintu masuk dan lintas wilayah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterrorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;



- pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan dan pelaksanaan urusan administrasi BKK.



6 Struktur Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Nomeklatur Kantor Kesehatan Palembang menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi yang terdiri dari:

- Subbagian administrasi umum;
- Instalasi;
- Wilayah kerja;
- Kelompok jabatan fungsional
- Tim Kerja



Gambar.1.1

Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025



Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK. Ada 2 instalasi di BKK Kelas I Palembang, yaitu:

- Instalasi Laboratorium Kesehatan
- Istalasi Pengendalian Resiko Lingkungan
- Instalasi Farmasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK dapat dibentuk Wilker BKK yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.Wilker BKK merupakan unit pelayanan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK. Wilker BKK dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas dibentuk tim kerja yang di pimpin oleh ketua tim kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala



BKK masing- masing.Tim kerja ini efektif melaksanakan tugasnya terhitung dari bulan April 2024.

7 Sumber Daya Manusia

Pegawai BKK Kelas I Palembang Tahun 2025 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang termasuk di wilayah kerja,yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 1 (satu) Orang Jabatan Pengawas, 69 (enam puluh sembilan) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 7 (tujuh) orang Jabatan Pelaksana (JP), 3 (tiga) orang tenaga PPPK, 5 (lima) orang CPNS. Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

- Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM
- Kasubbag Administrasi Umum : Heriyanto, ST, MKM

Tabel 1.1
Jenis Jabatan Fungsional BKK Palembang Pada Tahun 2025

NO	JENIS FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Dokter Ahli Madya	3
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	3
3	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	1
4	Sanitarian Ahli Madya (JF)	1
5	Perawat Ahli Madya (JF)	1
6	Dokter Ahli Muda (JF)	5
7	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	9
8	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	4
9	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1
10	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	2
12	Pranata Komputer Ahli Muda (JF)	1
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	4
14	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	2
15	Sanitarian Ahli Pertama (JF)	3
16	Perawat Ahli Pertama (JF)	1
17	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)	1
18	Administrator Kesehatan Ahli Pertama (JF)	1
19	Perencana Ahli Pertama (JF)	1
20	Arsiparis Ahli Pertama (JF)	1



21	Perawat Penyelia (JF)	3
22	Perawat Mahir (JF)	4
23	Asisten Apoteker Penyelia (JF)	1
24	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JF)	1
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	2
26	Perawat Mahir (JF)	4
27	Asisten Apoteker Mahir (JF)	1
28	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JF)	1
29	Entomolog Kesehatan Mahir (JF)	1
30	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (JF)	1
31	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JF)	1
32	Perawat Terampil (JF)	1
33	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JF)	1
Jumlah		69

Tabel 1.2
Jenis Jabatan Pelaksana BKK Palembang Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Penata Kelola Layanan Kesehatan (JP)	3
2	Pengelola Layanan Operasional (JP)	3
3	Operator Layanan Operasional (JP)	1
Jumlah		7

Tabel 1.3
Jenis Tenaga PPPK BKK Palembang Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Perawat Terampil (JF)	1
2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	1
3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (JF)	1
Jumlah		3

Tabel 1.4
CPNS BKK Palembang Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Dokter Ahli Pertama (JP)	1
2	Pranata Komputer Ahli Pertama (JP)	1
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (JP)	1

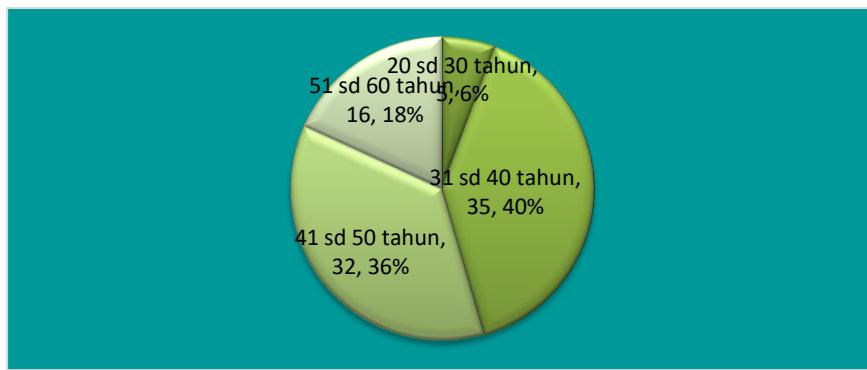


4	Perencana Ahli Pertama (JP)	1
5	Sanitarian Terampil (JP)	1
	Jumlah	5

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 berdasarkan kelompok umur pada dapat dilihat pada grafik berikut, bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang atau sebesar 39,8%.

Gambar 1.2

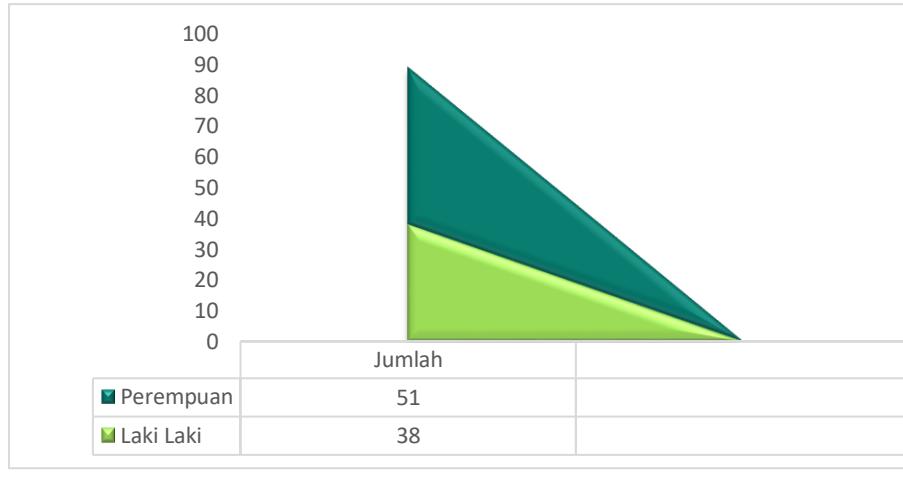
Kelompok Umur Pegawai BKK Palembang Tahun 2025



Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 51 (lima puluh satu) orang atau sebesar 57,30%, sedangkan pegawai laki laki sejumlah 38 (tiga puluh delapan) orang atau sebesar 42,69%.

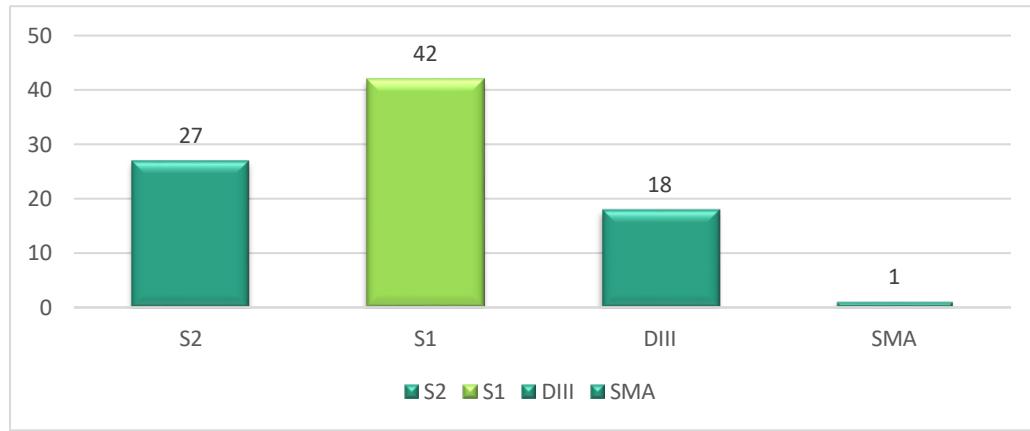
Gambar 1.3

Jumlah Pegawai BKK Palembang berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025



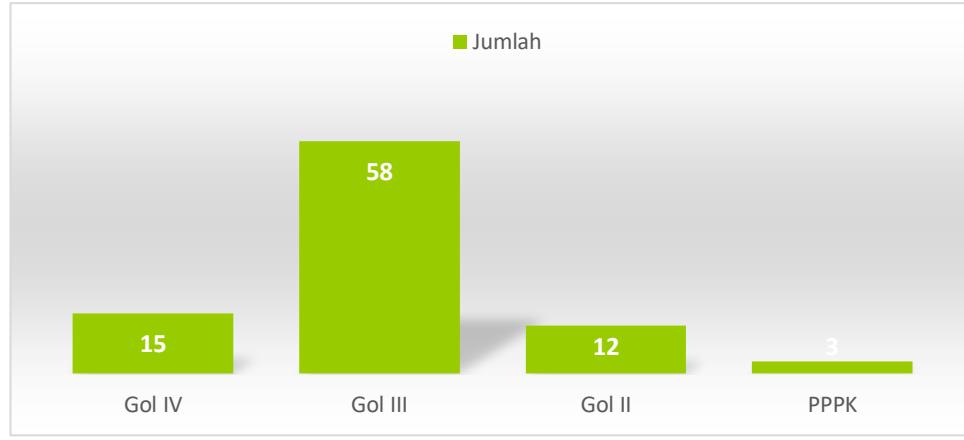
Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 45 (empat puluh lima) orang atau sebesar 54,87%, tingkat pendidikan pegawai dengan pendidikan Diploma III sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau sebesar 23,17% sedangkan pendidikan Pasca Sarjana berjumlah 18 (delapan belas) Orang atau sebesar 21,95%.

Gambar 1.4
Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 58 (lima puluh delapan) orang atau sebesar 70,73%

Gambar 1.5
Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2025





Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Kepala BKK Kelas I Palembang secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2025- 2029 Guna mewujudkan misi presiden dalam bidang kesehatan tahun 2025-2029 Kementerian Kesehatan menetapkan tujuan strategis, yaitu:

- Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
- Masyarakat berperilaku hidup sehat
- Layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
- Sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
- Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
- Teknologi Kesehatan yang maju
- Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi Learning Organization

Dalam rangka mencapai Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia.
- Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
- Meningkatnya Kualitas budaya hidup sehat masyarakat
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
- Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan
- Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah
- Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan
- Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis
- Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Peran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Ditjen P2) dalam mendukung pencapaian indikator kementerian kesehatan yaitu menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakittular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2.



BAB II

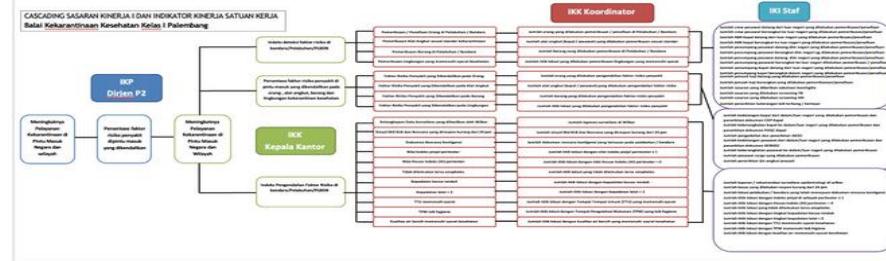
PERENCANAAN KINERJA

A. *Perencanaan Kinerja*

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) instrumen, yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perencanaan tahunan Ditjen P2 tahun 2025 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2 Tahun 2025-2029, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2025 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pengendalian Penyakit Tahun 2025-2029. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang mengacu pada RAP Program Pengendalian Penyakit Tahun 2025-2029 dengan indikator:

1. Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
 2. Persentase faktor risiko penyakit di Pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN
 4. Nilai kinerja anggaran
 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 6. Kinerja implementasi WBK satker
 7. Persentase ASN yang di tingkatkan kompetensinya
 8. Persentase realisasi anggaran

2. Cascading Perencanaan Kinerja



3. Target Kinerja

Tabel 2.1
Target Kinerja BKK Kelas I Palembang Tahun 2020-2025

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	2.347.506	701.381				
1	<i>Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN</i>	-	-	0.89	0.90	0.91	0.92
2	<i>Persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan pada orang,alat angkut, barang dan lingkungan</i>	90%	95%	97%	98%	100%	100%
	<i>Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara (cara perhitungan lama)</i>	85%	90%	-	-	-	-
3	<i>Indeks Pengendalian Faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN</i>	-	-	0.95	0.96	0.96	0.96
4	<i>Nilai Kinerja Anggaran</i>	80	83	85	86	87	88
5	<i>Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan Anggaran</i>	80	93	93	95	96	96
6	<i>Kinerja implementasi WBK satker</i>	70	75	75	80	85	85
7	<i>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi nya</i>	40%	45%	80%	82%	84%	85%
8	<i>Persentase Realisasi Anggaran</i>	-	-	-	95%	95%	96%

5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja Kepala BKK Kelas 1 Palembang kepada Direktur Jenderal P2 Kementerian Kesehatan RI untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran BKK Kelas 1 Palembang pada tahun 2025. Perjanjian tahunannya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2025. Perjanjian Kinerja telah disusun, di dokumentasikan, dan ditetapkan oleh Kepala BKK Kelas I Palembang pada Januari 2025 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun Anggaran 2025. Target –



Target Indikator Kinerja yang ingin dicapai BKK Kelas 1 Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Kinerja BKK Kelas I Palembang Tahun 2020-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,92 Indeks
		Persentase faktor risiko penyakit yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100 Persen
		Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.97 Indeks
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	Nilai Kinerja Anggaran	88 Nilai
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96 Nilai
		Kinerja Implementasi WBK Satker	85 Nilai
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85 Persen
		Persentase Realisasi Anggaran	96 Persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja. Dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 telah ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang. Realisasi masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja BKK Kelas I Palembang Tahun 2020-2025

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks deteksi faktor risiko di bandara / pelabuhan / PLBDN	0,92	0,99	107,61%
2	Percentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,97	1,06	109,27%
4	Nilai kinerja anggaran	88	94,64	107,54%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96%	97,39%	101,44%
6	Kinerja implementasi WBK Satker	85	94,19	110,81%

7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	85%	118,79%	139,75%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	99,35%	103,48%

Pengendalian dan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran, serta pengendalian dan pengukuran kinerja BKK Kelas I Palembang. Analisis pencapaian realisasi kinerja dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN

Kinerja deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN. dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriining TB serta skrining HIV. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Kinerja deteksi faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN. dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-



undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantinaan. PHQC adalah surat persetujuan berlayar karantina kesehatan atau Port Health Quarantine Clearance jika hasil pemeriksaan yang didapatkan telah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan bebas dari penyakit menular dan risiko kesehatan. CoP adalah Certificate Of Pratique yang diterbitkan untuk kapal yang datang dari luar negeri atau wilayah / pelabuhan dalam negeri terjangkit dan telah memenuhi syarat-syarat izin bebas karantina sesuai dengan SOP dan Undang-Undang yang berlaku.

Gendec (General Declaration) adalah dokumen pernyataan umum yang harus dibawa dalam penerbangan international yang dipergunakan untuk prosedur CIQ kedatangan dari suatu Negara yang isinya menginformasikan tentang registrasi pesawat, tanggal perjalanan, rute, nama-nama kru, lampiran fax manifest, cargo manifest, kejadian dalam penerbangan dan penanganannya, penyemprotan desinsectiside yang di tandatangani oleh PIC atau FSM jika diperlukan. Barang yang dimaksud barang pada indikator ini adalah izin angkut jenazah pada alat angkut. Yang dimaksud Lingkungan yang diperiksa pada indikator ini meliputi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Air, Inspeksi Sarana Air Bersih (ISPAB), Tempat tempat umum (TTU) dan Vektor

a) Definisi Operasional

Kinerja deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDNberdasarkan jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.

b) Cara Perhitungan

Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara) Dihitung menggunakan rumus indeks dengan menggunakan perhitungan bobot yang dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)



	Urgency	Seriousness	Growth	Rata-Rata
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	5	5	5,0
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	4	5	5	4,7
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	5	3	2	3,3
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	5	4	4,7

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage 5=(4/7)*100	Score 6=3*5	Maksimal	Cov Max	Score Max 9=3*8	Minimal	Score Min 11=3*10
						7				
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600		
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600		
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	120	120,0	360,00	100	120	360		
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600,00	100	120	600		
	TOTAL				2.160,00			2.160,00		0

Tahun 2022 : 0,89
Tahun 2023 : 0,90
Tahun 2024 : 0,91

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

1

	Urgency	Seriousness	Growth	Rata-Rata
Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	5	5	5,0
Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	4	5	5	4,7
Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	5	3	2	3,3
Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	5	4	4,7

c) Capaian Indikator Kinerja

Realisasi pemeriksaan orang sesuai dengan standar kekarantinaan pada tahun 2025 adalah 3.505.007, Pelaksanaan deteksi dini HIV 458 orang, Jumlah kunjungan poliklinik bukan penumpang sebanyak 295 orang. Jumlah crew pesawat/kapal datang/berangkat adalah 429.100 orang, Jumlah pemeriksaan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja/Pelabuhan sebanyak 43 orang, jumlah Pemeriksaan TB di masyarakat perimeter/buffer sebanyak 798. Jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi internasional sebanyak 6.400 orang. Realisasi alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sepanjang tahun 2025 sebanyak 25.413 sertifikat terdiri 20.707 sertifikat PHQC, 2.483 sertifikat COP, 1.925 sertifikat SSCEC dan 298 sertifikat Gendec. Realisasi pemeriksaan barang (izin angkut jenazah) sebanyak Jenazah.

Realisasi Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPM, Air, Vektor) sepanjang tahun 2025 terdiri dari 722 Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU), 467 pemeriksaan TPP, 116 Pemeriksaan ISPAB, 116 form pemeriksaan lokus dan 347 pemeriksaan survei vektor.

Capaian indikator indeks deteksi dini faktor risiko dibandara/pelabuhan/PLBDN sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2025 sebesar **0,99** dengan



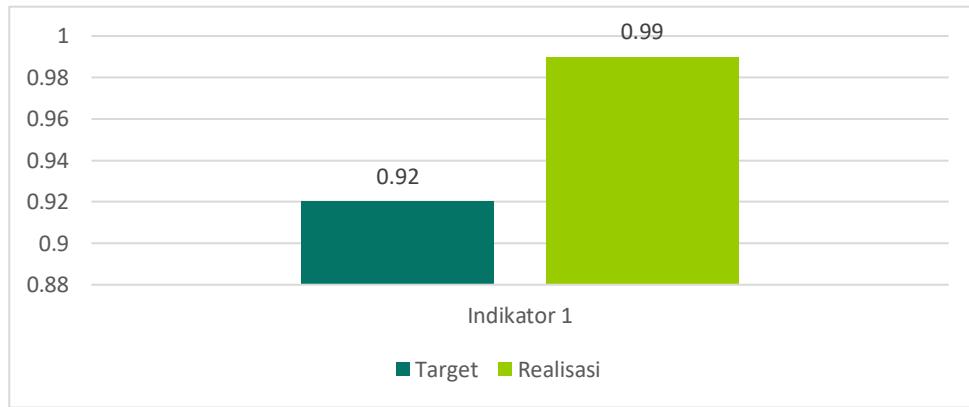
target pada perjanjian kinerja sebesar **0,92** bila dibandingkan antara target dan realisasi persentase capaian pada indikator ini sebesar **107,61%**. Target pada Indikator ini diubah menggunakan rumus angka indeks yaitu

$$\frac{0,99}{0,92} \times 100\% = 107,61\%$$

Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah melebihi dari target yang tetapkan.

Gambar 3.1

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 1 Tahun 2025



Gambar 3.2

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 1 pada Tahun 2022 sd Tahun 2025



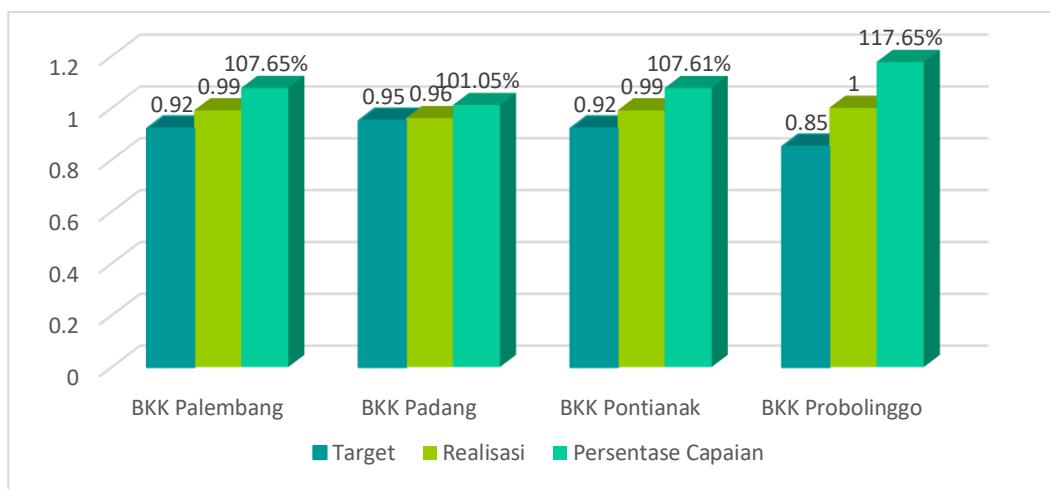
Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2025-2029, data belum bisa dibandingkan karena sedang proses penyusunan RAK 2025-2029 sehingga visi dan misi BKK Palembang 2025-2029 belum di tetapkan.



Bila dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2025 indikator 1 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lain nya adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 107,61% lebih besar dari BKK Padang sebesar 101,05%; dan lebih besar dari BKK Pontianak sebesar 101,06 % serta lebih kecil dari BKK Probolinggo sebesar 117,65%.

Gambar 3.3

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 1 tahun Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



d) Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

- Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang akan masuk/keluar;
- Meningkatkan kewaspadaan di pelabuhan/ bandara/PLBDN;
- Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di pelabuhan/ bandara/PLBDN.

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun ini BKK Palembang berhasil mencapai target indikator ini. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan melalui:

- Melaksanakan deteksi dini penyakit potensial PHEIC / pandemi melalui kegiatan surveilans penyakit, surveilans faktor risiko dan jejaring kerja;



- Melaksanakan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
- Melakukan penyelidikan epidemiologi dan verifikasi rumor;
- Melakukan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
- Melakukan pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi lintas sektor melalui surveilans aktif dalam rangka pengamatan epidemiologi;
- Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (certificate of pratique) termasuk pada kapal dalam negeri sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes;
- Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara;
- Melakukan layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance);

f) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

Isu lain yang krusial adalah tinggi beban penyakit menular dan tidak menular, seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, demam berdarah, hipertensi, diabetes, dan kanker yang terus meningkat menuntut sistem surveilans mendeteksi dini lebih kuat. Meskipun telah mencapai target ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu belum terdeteksinya penyakit menular pada kegiatan penapisan orang dikarenakan waktu yang singkat pada pemeriksaan dan kemungkinan gejala penyakit belum terlihat.

g) *Pemecahan Masalah*

- Meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang akan masuk/keluar;
- Meningkatkan kewaspadaan di pelabuhan/ bandara/PLBDN;
- Sering melakukan sosialisasi terhadap pelaku perjalanan mengenai syarat perjalanan di masa pandemi,bisa dengan broadcast, status WA, atau postingan di media sosial lain yang dapat di lihat oleh masyarakat;
- Mengikuti perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi salah komunikasi di lapangan / saat bekerja;



- Sering melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di pelabuhan/ bandara/PLBDN;

h) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA dengan Perhitungan nilai efisiensi indikator adalah sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{7,8}{20} \times 50\%$$

$$NE = 69,5\%$$

Keterangan

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
2. Hitung capaian kinerja
3. Hitung efisiensi sesuai rumus
4. Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{((99.742.000 \times 107,61\%) - 991.960.665)}{(999.742.000 \times 107,61\%)} \times 100\%$$

$$E = 7.8\%$$

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator (999.742.000)

CKi : Capaian Kinerja indikator (107,61%)

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (991.960.665)



Capaian kegiatan indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN pada tahun 2025 adalah **107,61%** (target 0,92 dan realisasi sebesar 0,99). Persentase realisasi anggaran indikator sebesar **99,29%**, dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 991.960.665** dan pagu anggaran sebesar **Rp. 999.742.000**. Indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN telah terlaksana **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **69,5%** yang berarti capaian kinerja indikator lebih besar dari realisasi anggaran, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,29% dapat mencapai kinerja sebesar 107,61%.

Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Faktor risiko penyakit adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan terjadinya suatu penyakit atau suatu kondisi, sifat, fisik atau perilaku yang dapat meningkatkan kejadian penyakit pada orang sehat.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriining TB serta skrining penyakit menular lainnya. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantinaan.

Pemeriksaan Barang disini adalah Jumlah penerbitan izin angkut jenazah penyakit menular dan potensial wabah. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang

berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

a) Definisi Operasional

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

b) Cara Perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%

$$\frac{\text{Jumlah Faktor Risiko yang ditemukan}}{\text{Jumlah Faktor Risiko yang dikendalikan}} \times 100 \%$$

$$\frac{1008}{1008} \times 100 \% = 100\%$$

Pemeriksaan Orang	Jumlah FR ditemukan	AKUMULASI			DESEMBER		Total dikendalikan	% dikendalikan		
		Pengendalian FR								
		Rujuk	Diobati	Tolak Berangkat	Laik Terbang / IOS					
Suhu tinggi > 37,5	2	1	-	-	1	-	2	100,00%		
Covid 19	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pelaku Perjalanan ICV Palsu/Exp/Belum Vaksin Meningitis	152	-	-	152	-	-	152	100,00%		
HIV	1	1	-	-	-	-	1	100,00%		
TB/malaria positif	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sakit	737	9	-	56	673	738	100,14%			
Saturasi <95	3	1	-	1	-	2	66,67%			
Hamil >32 minggu	15	-	-	4	11	15	100,00%			
Hb <8,5	1	-	-	-	1	1	100,00%			
Belum vaksin meningitis	152	-	-	152	-	-	152	100,00%		
Pelaku Perjalanan yang menderita penyakit menular	10	8	-	2	-	-	10	100,00%		
TOTAL	1.073	20	304	64	685	1.073	1.073	100,00%		

Pemeriksaan Alat Angkut	Jumlah FR	Pengendalian FR			Total dikendalikan	% dikendalikan	PJ
		SSCC	Surat bebas karantina	One month extention			
Vektor	2	2	-	-	2	100%	TIMKER 2
Air terkontaminasi	-	-	-	-	-	-	TIMKER 2
Tidak ada P3K	-	-	-	-	-	-	TIMKER 2
TOTAL	2	2	-	-	2	100,00%	

Pemeriksaan Barang	Jumlah FR	Pengendalian FR		Total dikendalikan	% pengendalian FR	PJ
		Tolak berangkat	Tunda Berangkat			
Jenazah penyakit menular	-	-	-	-	-	TIMKER 2

Pemeriksaan Lingkungan	Jumlah FR ditemukan	Pengendalian				Total dikendalikan	% pengendalian FR
		Fogging	Perangkap	Abatisasi	Pengendalian lainnya		
TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan)	2	-	-	-	-	2	100,00%
TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak)	2	-	-	-	-	2	100,00%
Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan arat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, Indeks tinggi	4	-	-	-	-	4	100,00%
Vektor dilingkungan buffer dan perimeter bandara/pelabuhan	57	4	-	51	2	57	100,00%
TOTAL	65	4	-	51	10	65	100,00%

Parameter Perhitungan						
Pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Percentase FR yang dikendalikan (4/3)*100	Total dikendalikan	% pengendalian FR
1	2	3	4	5		
Pemeriksaan orang	3.615.230	1.073	1.073	100,00%		
Pemeriksaan alat angkut	23.488	2	2	100,00%		
Pemeriksaan barang	96	-	-	-		
Pemeriksaan lingkungan	1.768	65	65	100,00%		
Total	3.640.582	1.140	1.140	100,00%		

c) *Capaian Indikator Kinerja*

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah mencapai target yaitu 100% dengan target pencapaian kinerja sebesar 100%. Jumlah faktor risiko yang di temukan pada pemeriksaan orang sebanyak 1.073 orang dan dikendalikan sebanyak 1.073 sehingga persentase faktor risiko pada orang sudah 100%. Jumlah faktor risiko yang di temukan pada pemeriksaan alat angkut sebanyak 2 kali dan sudah dikendalikan 2 kali, sehingga persentase faktor risiko pada alat angkut di kendalikan 100%, Jumlah faktor risiko yang ditemukan pada lingkungan sebanyak 65 dan sudah dikendalikan 65 sehingga faktor risiko pada lingkungan sudah di kendalikan 100%. Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi pada indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini. Target pada Indikator ini yaitu menjadi 100% dengan capaian sebesar 100% sehingga persentase capaian BKK Palembang pada indikator ini sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan indikator ini, setiap tahunnya BKK Palembang selalu berusaha maksimal dalam pengendalian risiko, sehingga diproyeksikan target ini akan tercapai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sama-sama mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan BKK Kelas I Palembang selalu berusaha melaksanakan tugas cegah tangkal penyakit dengan memaksimalkan pengendalian faktor risiko yang ditemukan dalam pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Capaian indikator indeks deteksi dini faktor risiko dibandara/pelabuhan/PLBDN sesuai standar kekarantinaan kesehatan pada tahun 2025 sebesar **100%** dengan target pada perjanjian kinerja sebesar **100%** bila dibandingkan antara target dan realisasi persentase capaian pada indikator ini sebesar **100%**. Target pada Indikator ini diubah menggunakan rumus angka indeks yaitu

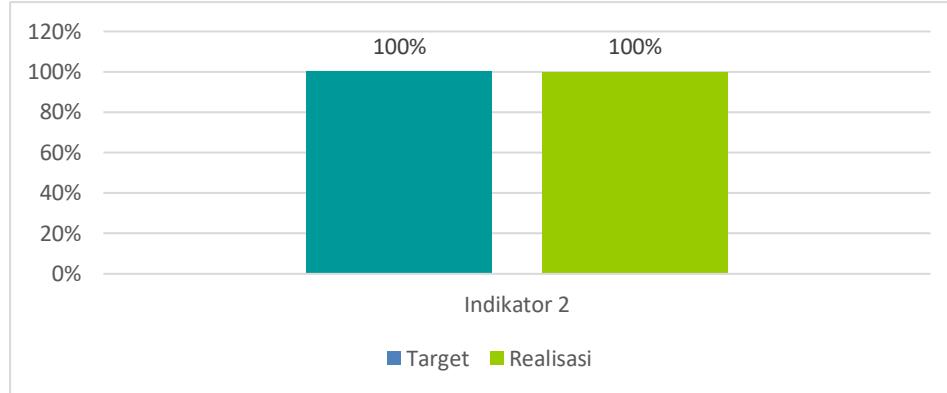
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$



Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

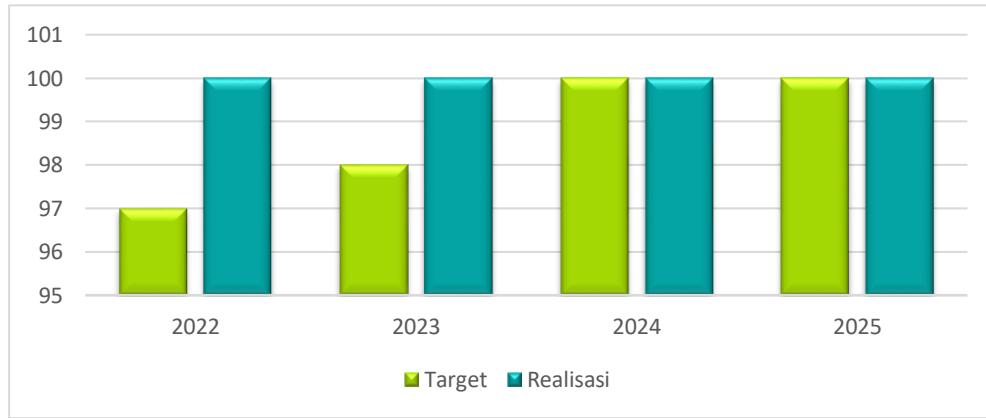
Gambar 3.4

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 2 Tahun 2025



Gambar 3.5

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 2 pada Tahun 2022 sd Tahun 2025



Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2025- 2029, data belum bisa dibandingkan karena sedang proses penyusunan RAK 2025-2029 sehingga visi dan misi BKK Palembang 2025-2029 belum di tetapkan.

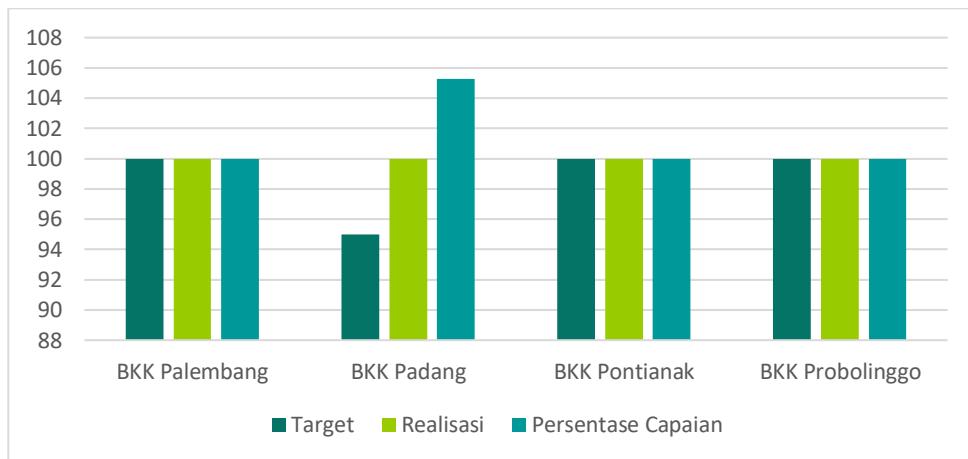
Bila dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2025 pada indikator 2 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lain nya adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 100% lebih kecil dari BKK Padang sebesar



105,26%; dan sama dengan BKK Pontianak sebesar 100% dan dari BKK Probolinggo sebesar 100%.

Gambar 3.6

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 2 tahun 2025 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



d) Upaya Yang dilakukan Untuk Mencapai Indikator

- Melaksanakan inspeksi sanitasi secara rutin
- Melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) ada masyarakat tentang sanitasi lingkungan
- Melakukan penguatan jejaring Lintas Sektor dan LP dalam rangka pengawasan pengendalian risiko lingkungan pelabuhan dan bandara

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah layanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Palembang terlaksana 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target melalui kegiatan:

- Melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas air minum;
- Melakukan pengawasan sarana pengolahan air bersih dan kualitas air bersih;
- Melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan dalam kota;
- Melakukan pengawasan sampah dan limbah cair;
- Melakukan pengawasan tpm dan kualitas makanan;



- Melakukan inspeksi sanitasi tempat-tempat umum;
- Melakukan pemeriksaan sanitasi lingkungan di wilayah kerja;
- Melakukan uji resistensi insektisida di wilayah kerja;
- Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor;
- Melakukan pelayanan kesehatan rujukan dan respon cepat;
- Melakukan penyelidikan epidemiologi;
- Melakukan verifikasi rumor;
- Melaksanakan deteksi dini HIV / AIDS di wilayah kerja;
- Melakukan pemeriksaan deteksi dini TBC di wilayah kerja;
- Melakukan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
- Melakukan pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi lintas sektor melalui surveilans aktif dalam rangka pengamatan epidemiologi.

f) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

- Keterlambatan menginformasikan perihal kedatangan kapal dengan status dalam karantina oleh pihak keagenan kapal
- Terbatasnya SDM dalam pelaksanaan pemeriksaan alat angkut di wilayah kerja dan pos BKK Kelas I Palembang
- Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko kesehatan pada alat angkut
- Belum Seluruh petugas karantina kesehatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas petugas dalam rangka deteksi dini faktor risiko dan pengendaliannya.

g) *Pemecahan Masalah*

- Pengorganisasian dan optimalisasi SDM yang ada
- Melakukan Koordinasi dengan agen kapal mengenai informasi kedatangan kapal agar disampaikan minimal 1 x 24 jam sebelum kapal tiba
- Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengendalian faktor risiko di alat angkut

- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan atau workshop

h) *Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA dengan Perhitungan nilai efisiensi indikator adalah sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{0,03}{20} \times 50$$

$$NE = 50,07\%$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
2. Hitung capaian kinerja
3. Hitung efisiensi sesuai rumus
4. Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{((198.850.000 \times 100\%) - 198.789.980)}{(198.850.000 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$E = 0,03\%$$



Keterangan	:
E	: Efisiensi rincian output
PAKi	: Pagu Anggaran Kinerja Indikator (198.850.000)
Cki	: Capaian Kinerja Indikator (100%)
RAKi	: Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (198.789.980)

Capaian kegiatan indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan pada tahun 2025 adalah **100%** (target 100 dan realisasi sebesar 100). Persentase realisasi anggaran sebesar **99,97%**, dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 198.789.980** dan pagu anggaran sebesar **Rp. 198.850.000**. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **50,07%** yang berarti capaian kinerja indikator lebih besar dari realisasi anggaran. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun Anggaran 2025. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit dipintu masuk pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN

Faktor risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati,maupun sosial ekonomi budaya. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun



penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah pintu masuk orang, barang dan alat angkut melalui darat lintas Negara.

a) Definisi Operasional

Status faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

b) Cara Perhitungan

Menggunakan parameter perhitungan

- Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%,
- Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
- Persentase bandara/Pelabuhan Tidak ditemukan larva anopheles (<1)
- Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi kecoa < 2
- Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks Populasi lalat < 2
- Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI perimeter = 0
- Persentase bandara/Pelabuhan dengan HI Buffer < 1
- Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
- Persentase lokus TPM laik Hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
- Pemeriksaan lokus kualitas air bersih memenuhi syarat Kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis

Indeks Pengendalian di pintu masuk negara Parameter	Akumulasi	
	target	capaian
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	100%	12
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	108%	48
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	108%	48
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa < 2	108%	48
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	108%	48
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	108%	48
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	104%	48
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	108%	50
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	110%	48
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	100%	48
		24

Bobot 5 Mutlak
 Bobot 4 Penting
 Bobot 3 Perlu
 Berdasarkan USG (Urgency, Seriousness, Growth)



NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage 5=(4/7)*100	Score 6*3*5	Maksimal	Cov Max	Score Max 9=3*8	Minimal	Cov Min	Score Min 12=3*11
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang	5	100	100	500,00	100	100	500			
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	108,33333333	108	433,33	100	100	400		-	
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles	3	108,33333333	108	325,00	100	100	300		-	
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa	4	108,33333333	108	433,33	100	100	400		-	
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	108,33333333	108	433,33	100	100	400		-	
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	108,33333333	108	541,67	100	100	500			
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	104,1666667	104	520,83	100	100	500			
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali	4	108,33333333	108	433,33	100	100	400			
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali	5	110,4166667	110	552,08	100	100	500			
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	5	100	100	500,00	100	100	500			
					4,672,92			4,400		0	

Rumus index adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)

Tahun 2022: 0,95

Tahun 2023: 0,96

Tahun 2024: 0,96

$$((6(9+11))-0)$$

$$1,062026515$$

Parameter	Urgency	Seriousness	Growth	Rata-Rata	Bobot
Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang	5	5	5	5,0	
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	5	3	4,0	
Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles	3	3	2	2,7	
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa	5	4	4	4,3	
Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	5	4	4	4,3	
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	5	5	5	5,0	
Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	5	5	5,0	
Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali	3	5	3	3,7	
Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali	5	5	4	4,7	
Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	5	5	4	4,7	

c) Capaian Indikator Kinerja

Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN lebih dari target yang ditetapkan pada revisi indikator, dengan pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 1,06 dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 0,97. Bila dibandingkan antara pencapaian BKK Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 109,28%. Pada indikator tiga ini tidak dapat dilakukan perbandingan dari tahun 2020 karena pada tahun 2022 dilakukan revisi Indikator perhitungan realisasi capaian menggunakan rumus indeks, sebelumnya menggunakan perhitungan persentase.

INDIKATOR	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III	REALISASI TW IV	TOTAL
Indeks pengendalian di pintu masuk negara	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1		48	12	14	13	13	52
	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)		36	12	14	13	13	52
	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2		48	12	14	13	13	52
	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2		48	12	14	13	13	52
	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0		48	12	14	13	13	52
	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1		48	12	13	12	13	50
	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan		48	12	14	13	13	52
	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan		48	12	16	13	12	53



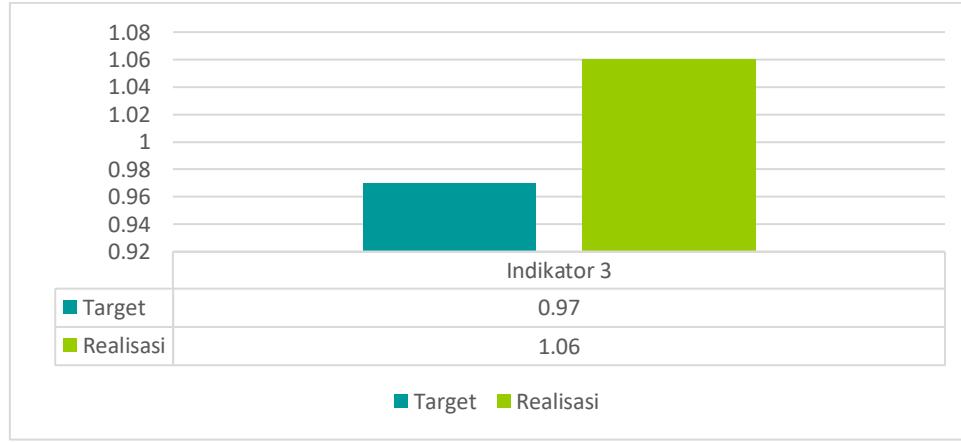
Realisasi pemeriksaan pada lingkungan selama tahun 2025 adalah 467 pemeriksaan. Target pada indikator adalah 432 pemeriksaan, sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Jumlah sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam pada tahun 2025 adalah sebanyak 12 sinyal dan telah direspon kurang dari 24 jam sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Target pada Indikator ini diubah menggunakan rumus angka indeks yaitu

$$\frac{1,06}{0,97} \times 100\% = 109,28\%$$

Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

Gambar 3.7

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 3 Tahun 2025



Gambar 3.8

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 3 pada Tahun 2022 sd Tahun 2025

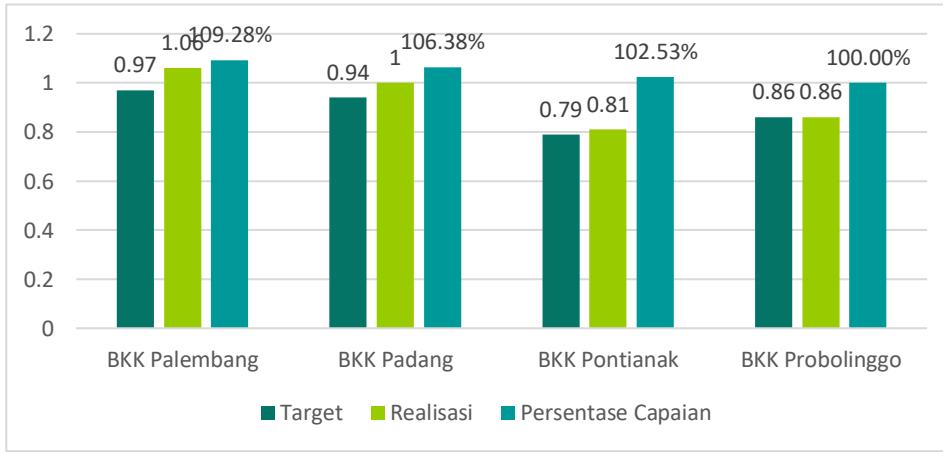


Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2024- 2029, data belum bisa dibandingkan karenasedang proses penyusunan RAP DAN RAK 2024-2025 sehingga visi dan misi 2024-2025 belum di tetapkan.

Bila dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2025 pada indikator 3 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lain nya adalah persentase capaian kinerja BKK Palembang I sebesar 109.28% lebih besar dari BKK Padang sebesar 106,38%; dan lebih besar dari BKK Pontianak sebesar 102.53% dan dari BKK Probolinggo sebesar 100%.

Gambar 3.9

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 3 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



d) *Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator*

1. Melaksanakan inspeksi sanitasi secara rutin
2. Melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pada masyarakat tentang sanitasi lingkungan
1. Melakukan penguatan jejaring Lintas Sektor dan LP dalam rangka pengawasan pengendalian risiko lingkungan pelabuhan dan bandara

e) *Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan*

1. Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN melalui;
2. Pembentukan forum pelabuhan/bandara sehat;
3. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaanembarkasi LS/LP;
4. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji embarkasi dalam kota;
5. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
6. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji debarkasi dalam kota;
7. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan embarkasi debarkasi haji
8. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan pra embarkasi
9. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - Lebaran /Nataru;
10. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP –praembarkasi;
11. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP -Lebaran / Nataru;
12. Melaksanakan layanan kesehatan pada situasi khusus;
13. Melaksanakan layanan pengendalian vektor DBD;
14. Melaksanakan layanan survei vektor PES;
15. Melaksanakan layanan pengendalian vektor diare;

f) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

Air baku yang berasal dari rawa dan ada juga yang bersifat payau menjadi hambatan dalam pencapaian kualitas air bersih yang memenuhi syarat khususnya air bersih di Pelabuhan Tanjung Api Api.

g) Pemecahan Masalah

Melakukan koordinasi dengan pemangku jabatan, praktisi terkait air baku yang tidak layak dan tidak adanya unit pengolahan air bersih khususnya di Pelabuhan Tanjung Api-API.

h) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{6,32}{20} \times 50\%$$

$$NE = 65,8\%$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
2. Hitung capaian kinerja
3. Hitung efisiensi sesuai rumus
4. Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(46.328.000 \times 1,06) - 46.002.104}{(46.328.000 \times 1,06)} \times 100\%$$

$$E = 6,32\%$$



Keterangan

E	: Efisiensi rincian output
PAKi	: Pagu Anggaran Kinerja Indikator (46.328.000)
CKi	: Capaian Kinerja Indikator(1,06)
RAKi	: Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (46.002.104)

Capaian kegiatan indikator Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN pada tahun 2025 adalah **1.06** (target 0.97 dan realisasi sebesar 1.06). Persentase realisasi anggaran sebesar **99,30%**, dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 46.002.104** dan pagu anggaran sebesar **Rp. 46.328.000**. indikator Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **65,8%** yang berarti capaian kinerja indikator lebih besar dari realisasi anggaran. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun Anggaran 2025. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan pengendalian faktor risiko di pelabuhan/ bandara/PLBDN.

Nilai Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian / lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran terdapat 4 indikator penilaian yaitu:

- Realisasi Anggaran
- Konsistensi RPD
- CRO
- Efisiensi

a) Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

b) Cara Perhitungan

Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan. Dalam pelaksanaan penilaian Indikator Kinerja Anggaran, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi e-Monev DJA. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi SMART juga merupakan instrumen/tool Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Aspek yang diukur adalah :

- a. Aspek implementasi yang meliputi realisasi anggaran, capaian output, konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan, dan efisiensi.
- b. Aspek Manfaat, dimana untuk menilai apakah program yang dijalankan mencapai sasaran program yang ditunjukkan dengan indikasi berfungsinya atau dirasakannya manfaat oleh masyarakat sebagai penerima manfaat program.
- c. Aspek Konteks yang melihat apakah program yang dilaksanakan masih sesuai dengan kondisi saat ini.

c) Capaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai kinerja anggaran Tahun Anggaran 2025 BKK Palembang adalah sebesar **97,96** dengan target awal **88**. Bila dibandingkan antara kinerja anggaran BKK Kelas I Palembang dengan target pada perjanjian kinerja, di dapat persentase sebesar **111,32%**. Secara umum target yang ditetapkan BKK Palembang sudah menyesuaikan dengan tantangan dan proyeksi capaian yang diperoleh BKK Palembang, target BKK Palembang selalu meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga masih cukup menantang dan realistik untuk dicapai pada 2025. Berikut ini merupakan tampilan tabel Nilai Kinerja dari Aplikasi Monev Anggaran DJA Tahun 2025 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) :



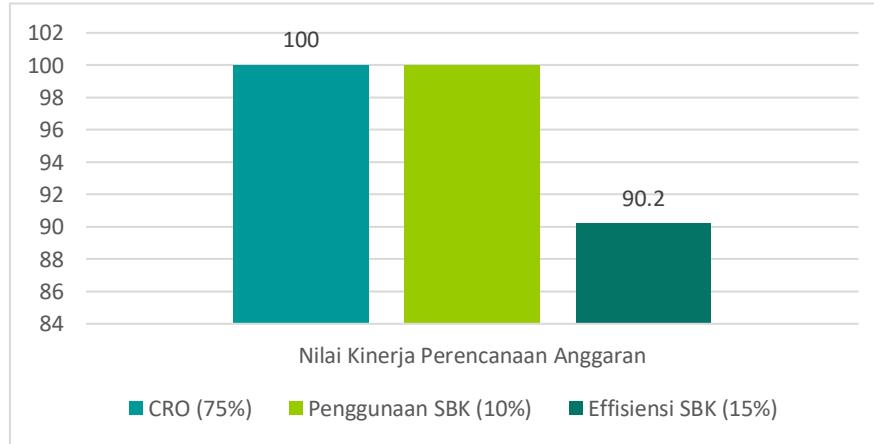


Berdasarkan tabel Nilai Kinerja yang bersumber dari Aplikasi Monev DJA, Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 97,96. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) Tahun 2025 terdiri dari 2 komponen, Yaitu:

a) *Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran*

Berikut ini merupakan tampilan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari Aplikasi Monev Anggaran DJA Tahun 2025 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) :

Gambar 3.10
Nilai Kinerja Penganggaran BKK Palembang Tahun 2025



"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	↓	Efisiensi SBK
98,53	100,00	100,00	↓	90,20

Berdasarkan Diagram Batang Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang bersumber dari Aplikasi Monev DJA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025, terdapat tiga komponen penilaian. Komponen CRO (Capaian Realisasi Output) memperoleh nilai 100, yang menunjukkan bahwa capaian output telah terpenuhi secara optimal. Komponen Penggunaan SBK juga memperoleh nilai 100, menandakan bahwa Standar Biaya Keluaran telah digunakan secara penuh dan sesuai ketentuan dalam perencanaan anggaran. Sementara itu, komponen Efisiensi SBK memperoleh nilai 90,20, yang mencerminkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan optimalisasi efisiensi ke depan.

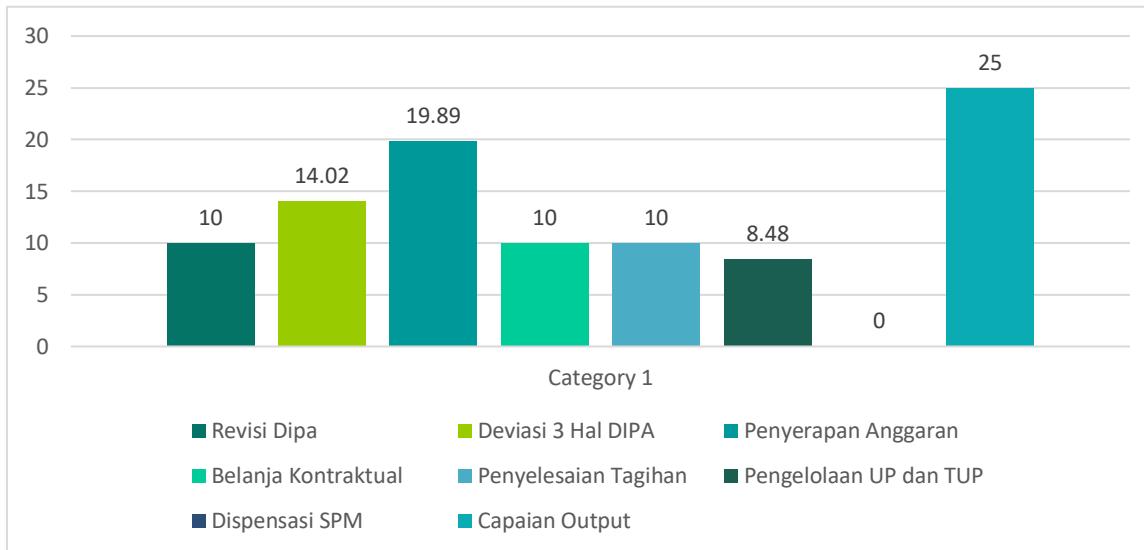
Berdasarkan penggabungan ketiga komponen tersebut, Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 mencapai 98,53 dan berada pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara efektif, didukung oleh penggunaan Standar Biaya Keluaran yang optimal, serta menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi.

b) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berikut ini merupakan tampilan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi Monev Anggaran DJA Tahun 2025 Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) :



Gambar 3.11
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Palembang Tahun 2025



Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
Nilai	100.00	93.46	99.45	100.00	100.00	84.81	100.00					
Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
Nilai Akhir	10.00	14.02	19.89	10.00	10.00	8.48	25.00		97.39	100%	0.00	97.39
Nilai Aspek	96.73			96.06			100.00					

Diagram Batang Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari Aplikasi Monev DJA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang diukur melalui beberapa indikator. Pada indikator Revisi DIPA, diperoleh nilai 10, yang mencerminkan bahwa proses penyesuaian anggaran telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 14,02, yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran yang relatif baik.

Selanjutnya, indikator Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 19,89, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Indikator Belanja Kontraktual memperoleh nilai 10, yang menandakan bahwa



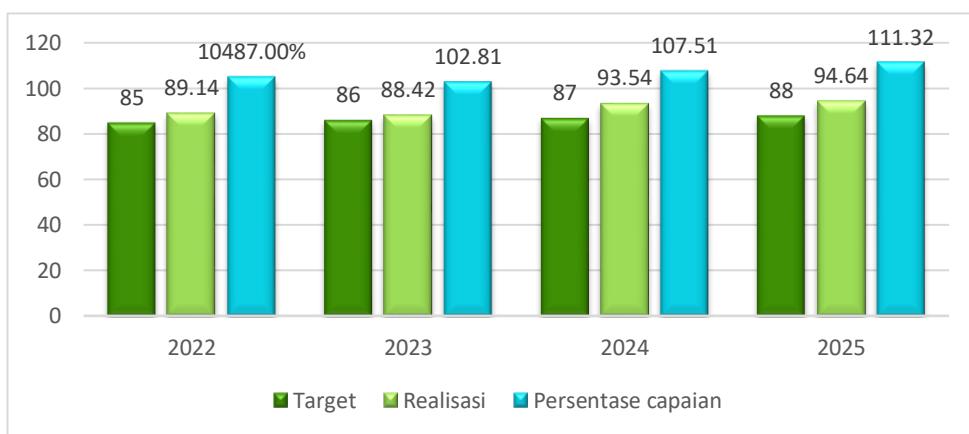
pelaksanaan belanja berbasis kontrak telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan. Pada indikator Penyelesaian Tagihan, diperoleh nilai 10, yang menunjukkan bahwa proses penyelesaian tagihan telah dilaksanakan tepat waktu.

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari Aplikasi Monev DJA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang Tahun 2025 sudah sangat baik dengan nilai akhir mencapai 97.96. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik, didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, pengelolaan belanja yang tertib, serta capaian output yang optimal.

$$\frac{97,96}{88} \times 100\% = 107,61\%$$

Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

Gambar 3.12
**Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2022 sd
Tahun 2025**



Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2024- 2029, data belum bisa dibandingkan karenasedang proses penyusunan RAP DAN RAK 2024-2025 sehingga visi dan misi 2024-2025 belum di tetapkan.

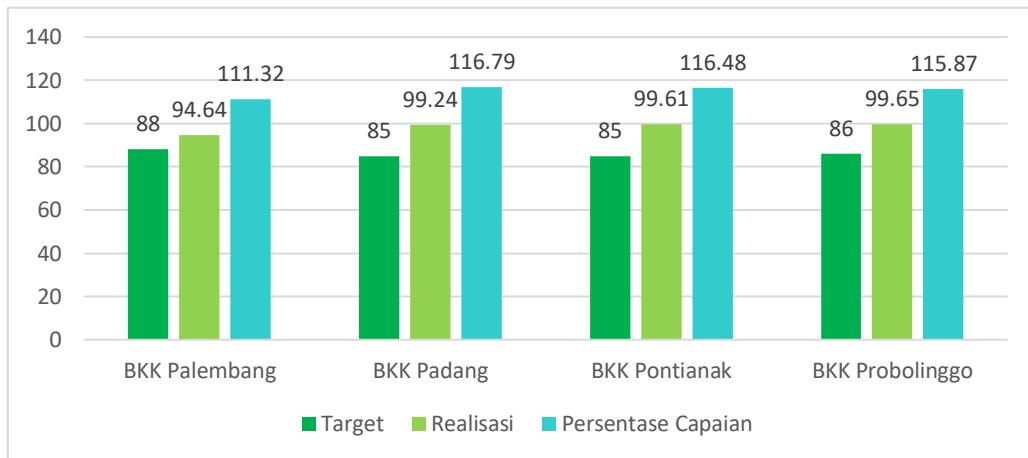
Bila dibandingkan persentase capaian kinerja tahun 2025 pada indikator 4 antara BKK Kelas I Palembang dengan BKK lain nya adalah persentase capaian



kinerja BKK Palembang I sebesar 111,32% lebih kecil dari BKK Padang sebesar 116,79%; dan lebih kecil dari BKK Pontianak sebesar 116,48% dan dari BKK Probolinggo sebesar 115,87%.

Gambar 3.13

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



d) Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan dengan menjaga kepatuhan terhadap perencanaan, pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, tidak melakukan revisi berulang kali dan dengan mengupayakan proses penyerapan anggaran serta realisasi output secara maksimal.

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran yang menunjukkan hasil yang mencapai target bulanan Tahun 2025, dimana setiap bulan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Adapun hal yang mempengaruhi pencapaian target indikator tersebut adalah:

- Dilakukannya evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan.
- Dilakukannya monitoring dan evaluasi capaian output kegiatan yang berkaitan dengan capaian kinerja anggaran.

f) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

Kendala / masalah yang dihadapi pada penilaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Kualitas perencanaan anggaran

Aspek Deviasi Halaman III DIPA (Nilai 14,02 dari maksimal 15). Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara Rincian Pelaksanaan Kegiatan dan rencana Penarikan Dana

2. Kualitas pelaksanaan anggaran.

Penyerapan anggaran (Nilai 19 dari maksimal 20) Hal ini dikarenakan adanya serapan anggaran belum mencapai target pertriwulannya dari masing – masing jenis belanja.

g) *Pemecahan Masalah*

BKK Palembang mengambil langkah pemecahan masalah terkait kendala tersebut diatas :

- f) Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan
- g) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian output kegiatan yang berkaitan dengan capaian kinerja anggaran.

h) *Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \frac{1,32}{20} \times 50\%$$

$$NE = 53,3\%$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
2. Hitung capaian kinerja
3. Hitung efisiensi sesuai rumus
4. Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(89.174.000 \times 97,96) - 88.504.703}{(89.174.000 \times 97,96)} \times 100\%$$

$$E = 1,32\%$$

Keterangan

E	: Efisiensi rincian output
PAKi	: Pagu Anggaran Kinerja Indikator (89.174.000)
CKi	: Capaian Kinerja Indikator (97,96)
RAKi	: Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (88.504.703)/ 99,25%

Capaian kegiatan indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 adalah **111,32%** (target 88 dan terealisasi 97,96). Persentase realisasi anggaran selama tahun 2025 sebesar **99,25%** dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 88.504.703** dari pagu efektif. Indikator Nilai Kinerja Anggaran telah terlaksana **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **1,32%** yang berarti capaian kinerja indikator lebih kecil dari realisasi anggaran, dengan realisasi anggaran sebesar **99,25%** dapat mencapai kinerja sebesar **111,32%**.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap



regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring OM SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari tiga aspek:

- Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
- Dalam penyusunan IKPA terdapat 8 Indikator Kinerja:
- Revisi DIPA (10%)

Deviasi Halaman III DIPA (10%)

- Data Kontrak (10%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Dispensasi SPM (5%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Capaian Output (25%)

Untuk rincian 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------



<ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Dispensasi SPM 	<ul style="list-style-type: none"> Deviasi Halaman III DIPA (10%) - Data Kontrak (10%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Dispensasi SPM (5%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Capaian Output (25%)
---	--	--

c) Definisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

d) Cara Perhitungan

Cara penilaian IKPA juga memiliki bobot yang berbeda beda pada masing masing indikator. Perbedaan bobot nilai ini akan dapat mempengaruhi nilai total IKPA yang dapat diterima oleh satuan kerja, sehingga perlu penekanan terhadap indikator yang memiliki bobot nilai yang cukup besar. Namun dengan tetap mempertahankan kinerja indikator lain dengan baik. Untuk bobot penilaian IKPA dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator	Bobot (%)
1.	Revisi DIPA	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	10
3.	Penyerapan Anggaran	20
4.	Belanja Kontraktual	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10



6.	Pengelolaan UP dan TUP	10
7.	Dispensasi SPM	5
8.	Capaian Output	25

Nilai IKPA = \sum (Nilai Indikator n x Bobot Indikator n) : Konversi Bobot

n=1

Keterangan :

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/Ltidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu.

Dalam pelaksanaan penilaian IKPA, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi SPAN. Nilai IKPA BKK Palembang tahun 2025 pada aplikasi OMSPAN adalah 97,39.

c) Capaian Indikator Kinerja

Nilai IKPA dapat dipantau secara periodik pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu. Monitoring pelaksanaan anggaran belanja merupakan kewajiban kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran. Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Palembang Tahun 2025 sebesar 97,39 dengan target sebesar 96 dengan persentase capaian indikator sebesar 101,45%.



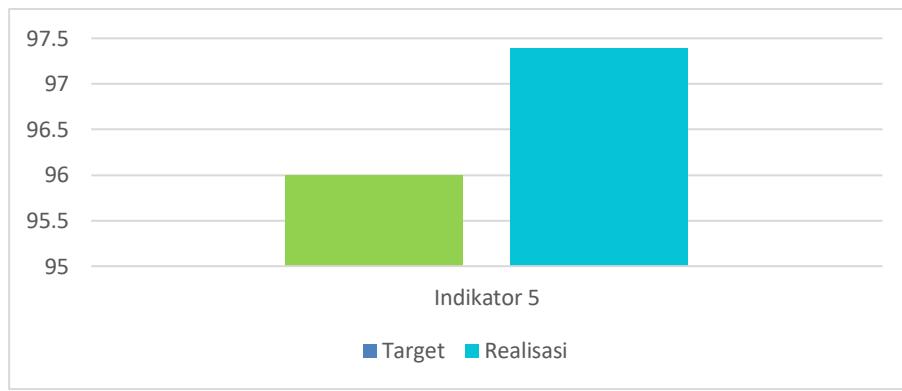
Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2024-2029, data belum bisa dibandingkan karena sedang proses penyusunan RAP DAN RAK 2024-2025 sehingga visi dan misi 2024-2025 belum di tetapkan.

$$\frac{97,39}{96} \times 100\% = 101,45\%$$

Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

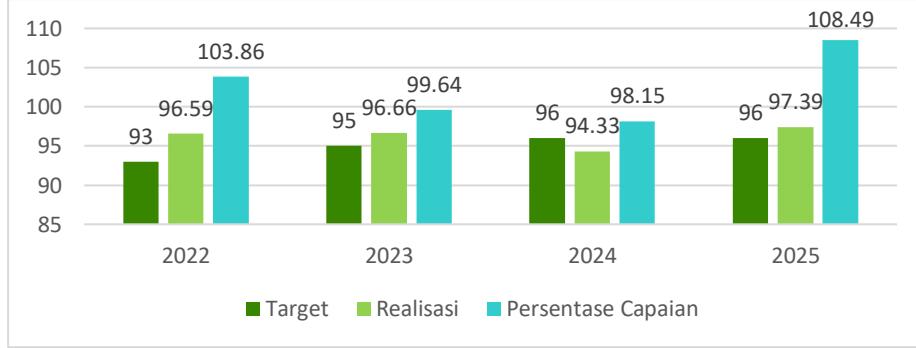
Gambar 3.13

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 5 Tahun 2025



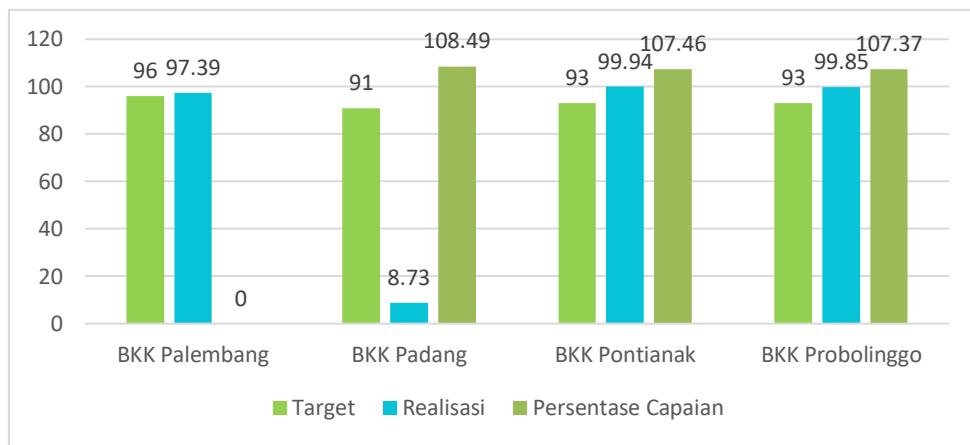
Gambar 3.14

**Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2022 sd
Tahun 2025**



Gambar 3.12

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 5 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



d) *Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator*

A. Revisi DIPA

- 1) Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
- 2) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I tahun selanjutnya.
- 3) Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja diakhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.

B. Deviasi Halaman III DIPA

- 1) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- 2) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.



- 3) Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulan dalam rangka penilaian IKPA.

C. Penyerapan Anggaran

- 1) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 2) Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

e) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator ini mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- Revisi DIPA dilakukan secara efektif;
- Tidak adanya dispensasi SPM;
- Ketelitian dalam penerbitan SPM;
- Pencairan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran;
- Data kontrak disampaikan tepat waktu ke KPPN;
- Revolving UP dan Pertanggungjawaban TUP dilakukan tepat waktu;
- Efektif dalam hal perhitungan pencapaian output.

f) Kendala/Masalah yang dihadapi

Kendala / masalah yang dihadapi pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Kualitas perencanaan anggaran

Aspek Deviasi Halaman III DIPA (Nilai 15 dari maksimal 15) Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara Rincian Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana

2. Kualitas pelaksanaan anggaran.

Hal ini dikarenakan adanya serapan anggaran belum mencapai target per triwulannya dari masing – masing jenis belanja.

g) *Pemecahan Masalah*

- 1) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- 2) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun kualitas perencanaan anggaran.

h) *Efisiensi penggunaan sumber daya*

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{98,98}{20} \times 50\%$$

$$NE = 297,45\%$$

NE

E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

- Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
- Hitung capaian kinerja
- Hitung efisiensi sesuai rumus
- Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :



E	: Efisiensi rincian output
PAKi	: Pagu Anggaran Kinerja Indikator (15.228.200.000)
Cki	: Capaian Kinerja Indikator (97,39)
RAKi	: Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (15.131.128.034)/99,36

$$E = \frac{(15\,228.\,200.\,000 \times 97,39) - 15\,131.128.\,034}{(15.228.200.000 \times 97.39)} \times 100\%$$

$$E = 98.98\%$$

:

Capaian kegiatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 adalah **97,39%** (target 96 dan terealisasi 97,39). Persentase realisasi anggaran sebesar **99,36%** dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 15.131.128.034** dan pagu anggaran sebesar **Rp. 15.228.200.000** Indikator Nilai Kinerja Anggaran telah terlaksana **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **98,98%**

Kinerja Implementasi WBK satker

Hasil penilaian kinerja atas implementasi WBK pada satuan kerja berdasarkan unsur penilaian penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. peningkatan capaian indikator ini menunjukkan nilai kinerja implementasi WBK yang lebih baik.

a) Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2.

b) Cara Perhitungan

Penilaian kinerja implementasi WBK satker diperoleh dari hasil nilai dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.



c) Capaian indikator Kinerja

Capaian indikator diperoleh dari :

1. Hasil self assesment satker
2. Hasil SIPINAL
3. Hasil assesment Itjen
4. Hasil assesment Bagian HOH

Capaian yang dimasukkan dalam laporan kinerja adalah hasil penilaian terakhir yang dilakukan dalam periode penilaian. Nilai Kinerja Implementasi WBK BKK Palembang tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian Tim Reviu Kinerja Implementasi WBK dari eselon 1 Ditjen Penanggulangan penyakit adalah 94,19. Perhitungan capaian indikator implementasi WBK Satker BKK Palembang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

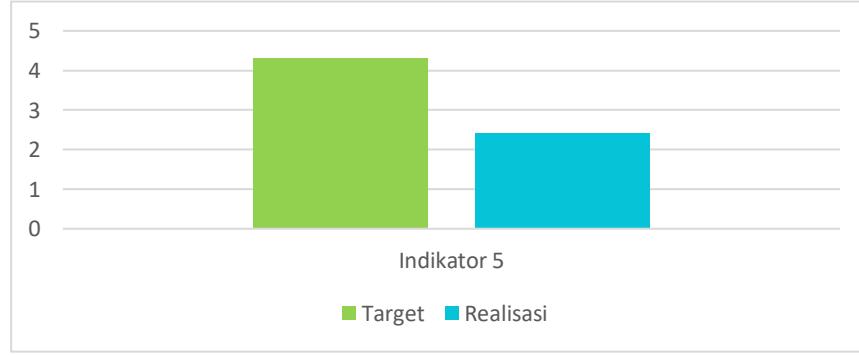
$$\frac{94,19}{85} \times 100\% = 110,81\%$$

Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2024-2029, data belum bisa dibandingkan karena sedang proses penyusunan RAP DAN RAK 2024-2025 sehingga visi dan misi 2024-2025 belum di tetapkan.

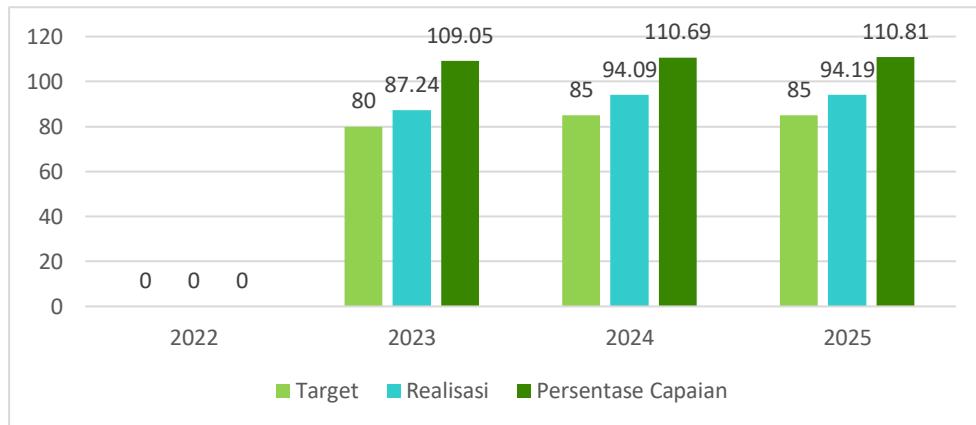
Gambar 3.7

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 6 Tahun 2025



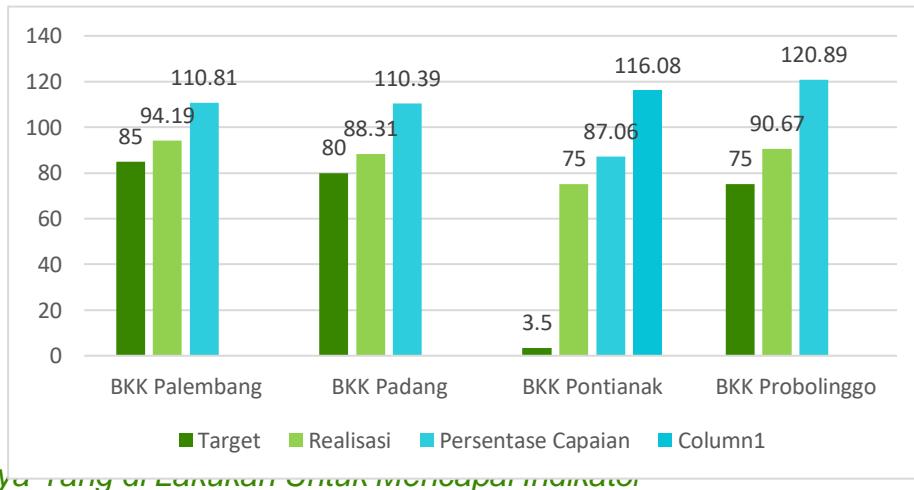
Gambar 3.14

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 4 pada Tahun 2022 sd Tahun 2025



Gambar 3.12

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 5 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



d) **Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator**

1. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BKK Palembang yang terdiri dari Pokja I Manajemen Perubahan, Pokja II Penataan Tata Laksana, Pokja III Penataan Sistem Manajemen SDM, Pokja IV Penguatan Akuntabilitas, Pokja V Penguatan Pengawasan dan Pokja VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan menentukan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.

3. Memenuhi dokumen penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen pengungkit Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta pemenuhan dokumen penilaian indikator WBK /WBBM sesuai dengan komponen pengungkit secara berkala.

e) *Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan*

Realisasi indikator kinerja implementasi WBK tahun 2025 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Keberhasilan pencapaian target indikator disebabkan oleh:

1. Komitmen dari pimpinan untuk mewujudkan BKK Palembang berpredikat satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2. Komitmen dan motivasi dari seluruh anggota untuk memperoleh mencapai target indikator implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) semakin meningkat
3. Kapasitas SDM yang memiliki semangat kerja tim yang tinggi

f) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

Kendala dan masalah yang dihadapi selama kegiatan Self Assessment Pembangunan ZI Menuju WBK pada BKK Palembang adalah :

1. Perbedaan persepsi antara satker dengan tim penilai dalam memahami poin-poin pertanyaan/penilaian termasuk kriteria penilaian yang digunakan pada tiap-tiap komponen pengungkit.
2. Masih minimnya inovasi yang menunjang hasil penilaian indikator WBK /WBBM pada masing – masing komponen pengungkit.

g) *Pemecahan Masalah*



BKK Palembang mengambil langkah pemecahan masalah terkait kendala tersebut diatas sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi satuan kerja dengan tim Sekretariat Ditjen P2 terkait dengan pendampingan penilaian WBK dan melakukan monitoring evaluasi secara rutin serta menindaklanjuti hasil hasil monitoring oleh pihak yang terkait.
2. Mendorong pengembangan Inovasi dalam rangka perbaikan layanan yang dilakukan yang mengarah pada terciptanya WBK

h) Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{94,19}{20} \times 50\%$$

$$NE = 285,48\%$$

$$NE = 69,5\%$$

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

- Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
- Hitung capaian kinerja
- Hitung efisiensi sesuai rumus
- Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	: Efisiensi rincian output
PAKi	: Pagu Anggaran Kinerja Indikator (42.563.000)
Cki	: Capaian Kinerja Indikator (94,19)
RAKi	: Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (42.301.213)/99,38

$$E = \frac{(42.563.000 \times 94,19) - 42.301.213}{(42.563.000 \times 94,19)} \times 100\%$$

$$E = 98,98\%$$

:

Capaian kegiatan Indikator indikator kinerja implementasi WBK tahun 2025 adalah **110,81%** (target 85 dan terealisasi 94,19). Persentase realisasi anggaran sebesar **99,38%** dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 42.301.213** dan pagu anggaran sebesar **Rp. 42.563.000** Indikator Nilai Kinerja Anggaran telah terlaksana **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **98,98%**

Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, pertemuan sosialisasi/seminar, workshop, magang dan kegiatan peningkatan SDM lainnya dengan jumlah jam yang dikuti sebanyak minimal 20 JPL selama Januari - Desember Tahun 2025.

e) Definisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam periode Januari – Desember 2025 dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

f) Cara Perhitungan

Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL di hitung dari jumlah pegawai yang memperoleh 20 JPL dibagi dengan jumlah pegawai dikali seratus persen.



g) Capaian indikator Kinerja

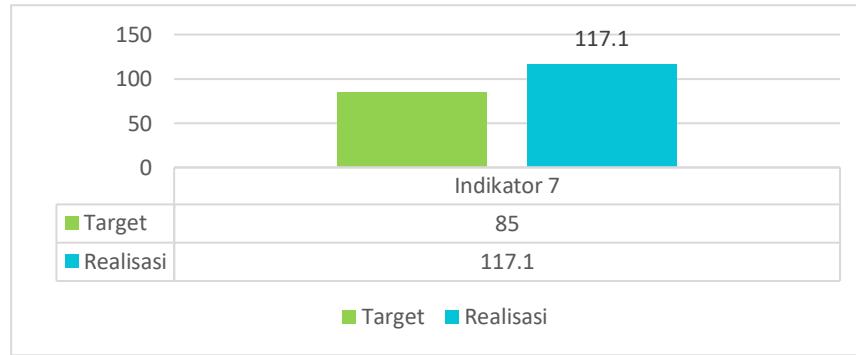
Capaian indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BKK Palembang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\frac{117,10\%}{85\%} \times 100\% = 137,76\%$$

Realisasi indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya pada sebesar 45,75%. Hasil tersebut diperoleh dari jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 20 JPL yaitu sebesar 35 orang dari jumlah total pegawai sebesar 91 pegawai. Realiasi sebesar 45,75% belum memenuhi target di perjanjian kinerja sebesar 85%. Peningkatan kompetensi ini diantaranya meliputi Pelatihan Struktural / Diklat PIM, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial, Seminar / Konferensi, Workshop / Lokakarya, Kursus, Penataran, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Coaching, Mentoring, e-Learning, Pelatihan Jarak Jauh, datasering, Pembelajaran alam terbuka (Outbond), bimbingan ditempat kerja. Pada Tahun 2025 Capaian indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya adalah sebesar 117,10%, yang berarti seluruh pegawai BKK Palembang sejumlah 76 orang telah mengikuti pelatihan dengan 20 JPL namun memenuhi target di perjanjian kinerja sebesar 85% dari jumlah pegawai sebanyak 89 orang. Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

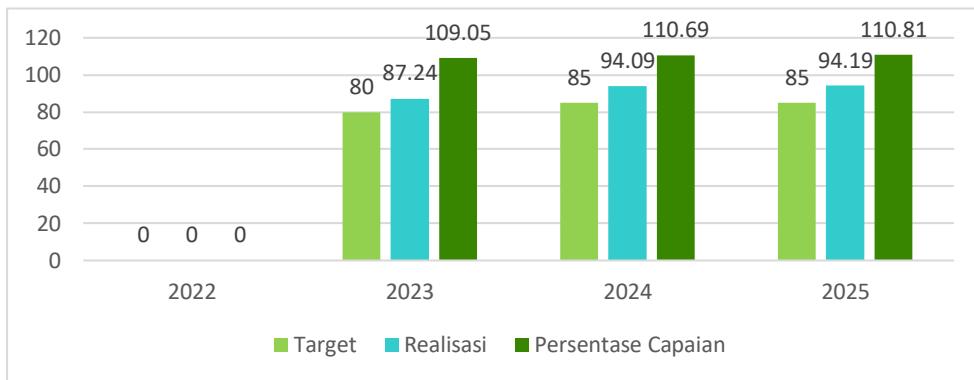
Gambar 3.19

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 7 Tahun 2025



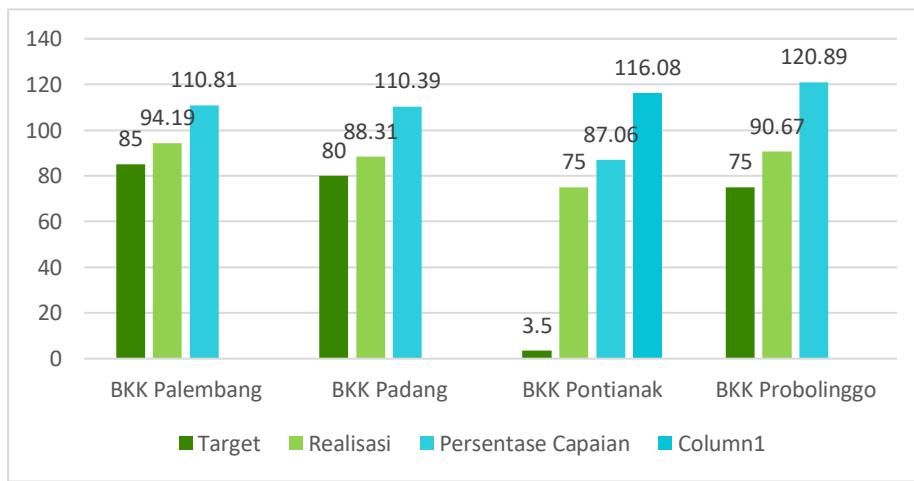
Gambar 3.20

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Indikator 7 pada Tahun 2022 sd Tahun 2025



Gambar 3.21

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 7 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



e) *Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator*

a. **Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan**

1. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan): Pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional sesuai dengan jabatan ASN.
2. Pelatihan Prajabatan dan Pelatihan Dasar (Latsar): Bagi CPNS untuk membentuk karakter ASN yang berintegritas dan kompeten.
3. Pelatihan Kepemimpinan (PKA, PKP, PIM): Untuk pejabat struktural/administratif yang dipersiapkan menjadi pemimpin.

b. **Pengembangan Kompetensi Berbasis Digital**

1. E-learning dan webinar: Melalui platform seperti MOOC BPSDM,



LMS LAN, dan Digital Talent Scholarship (Kominfo).

2. Pemanfaatan platform pelatihan daring lainnya.

f) *Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan*

Berikut disampaikan penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- a. Komitmen pimpinan untuk mendorong peningkatan SDM mempermudah alokasi anggaran, kebijakan pelatihan, dan pembentukan budaya kerja yang mendukung pengembangan kompetensi.
- b. Tersedianya fasilitas pelatihan (PPSDM), LMS daring, serta kerjasama dengan lembaga eksternal memudahkan ASN untuk belajar secara fleksibel
- c. Komitmen yang tinggi dari pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan.

g) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

Beberapa pegawai belum tertib dalam penginputan peningkatan kapasitas ASN yang diikuti pada google form monitoring peningkatan kompetensi ASN yang dilakukan secara berkala setiap bulan

i) *Pemecahan Masalah*

Mengirimkan notifikasi kepada seluruh pegawai untuk mengisi google form monitoring peningkatan kompetensi ASN setiap bulan.

j) *Efisiensi penggunaan sumber daya*

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{16,5}{9} \times 50\%$$

$$NE = 141,67\%$$



NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

- Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
- Hitung capaian kinerja
- Hitung efisiensi sesuai rumus
- Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{(118.838.000 \times 117,10) - 115.991.060}{(118.838.000 \times 117,10)} \times 100\%$$

E = 16,59%

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output
PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator (118.838.000)
Cki : Capaian Kinerja Indikator (117,10)
RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (115.991.060)/97,60

Capaian kegiatan Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya tahun 2025 adalah **137,76%** (target 85 dan terealisasi 117,10). Persentase realisasi anggaran sebesar **97,60%** dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 115.991.060** dan pagu anggaran sebesar **Rp 118.838.000** Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah terlaksana **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **141,67%**.



Percentase Realisasi Anggaran

Percentase Realisasi Anggaran yang dimaksud adalah perbandingan antara pengunaan anggaran bersumber DIPA dengan pagu anggaran yang disediaan dalam DIPA pada satu tahun anggaran.

a) Definisi Operasional

Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran.

b) Cara Perhitungan

Percentase Realisasi Anggaran di hitung dari Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah anggaran satuan kerja dikali 100%.

c) Capaian indikator Kinerja

Realisasi belanja merupakan wujud konkret dari pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan keuangan, seperti DIPA atau RKA-K/L. Realisasi belanja menunjukkan seberapa besar dana yang telah digunakan oleh satuan kerja dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi belanja menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penyerapan anggaran.

Pagu total Anggaran BKK Palembang Tahun 2025 sebesar Rp 20.046.624.000 dengan Blokir sebesar Rp 3.322.929.000. Pagu Efektif BKK Palembang sebesar Rp 16.723.695.000. Capaian nilai Indikator Percentase Realisasi Anggaran Besar Kekarantinaan Kesehatan Palembang tahun 2025 **dari Pagu Efektif sebesar 99,43%** dan capaian realisasi anggaran di hitung **dari Pagu sebelum blokir sebesar 83,27%**. Capaian indikator ini belum mencapai Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebesar 96% jika di hitung dari Pagu sebelum blokir.

Realisasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.614.677.759 atau mencapai 83,27% dari total pagu anggaran. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.541.894.127 atau 99,66% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.948.014.082 atau 53,85% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.769.550 atau 95,51% dari anggarannya. Percentase realisasi

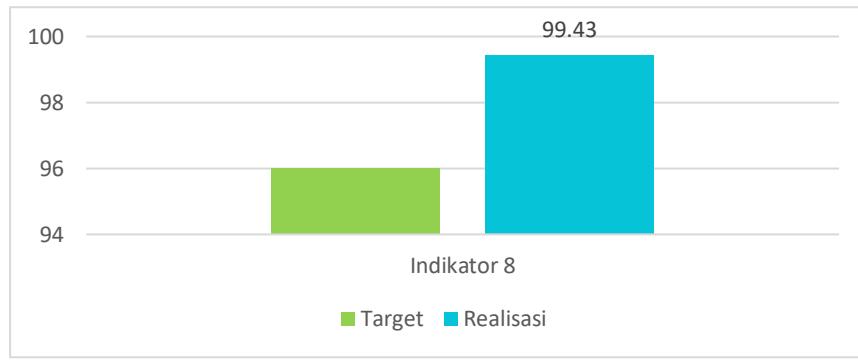
anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Barang/Jasa.

$$\frac{0,99}{0,96} \times 100\% = 107,61\%$$

Dengan capaian indikator ini di simpulkan pada tahun 2025 realisasi capaian pada indikator ini sudah mencapai dari target yang tetapkan.

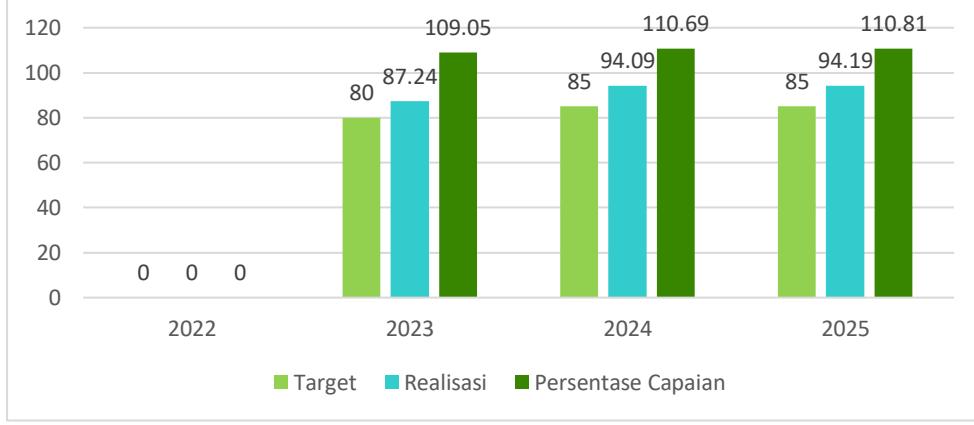
Gambar 3.22

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 8 Tahun 2025



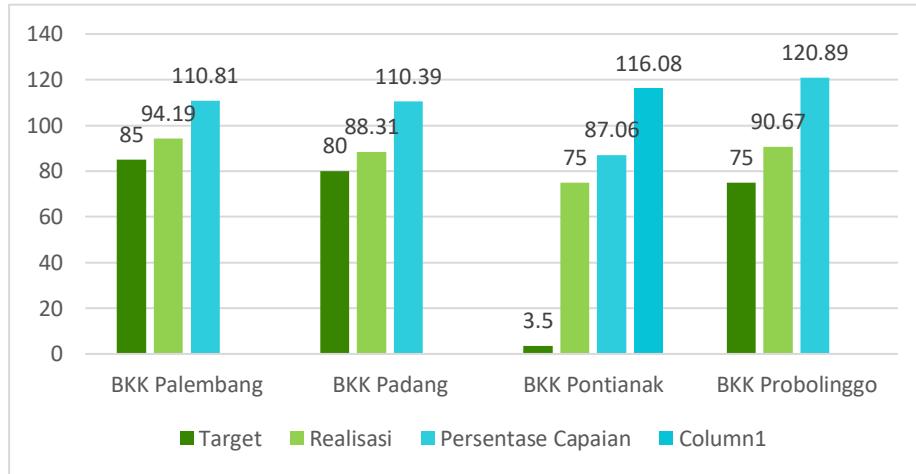
Gambar 3.23

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian pada Indikator 8 pada Tahun 2022 sd Tahun 2025



Gambar 3.24

Perbandingan Persentase Capaian Kinerja pada Indikator 7 Pada BKK Palembang, BKK Padang, BKK Probolinggo dan BKK Pontianak Tahun 2025



Bila dibandingkan dengan target Rencana Jangka Menengah pada RAK tahun 2024-2029, data belum bisa dibandingkan karena sedang proses penyusunan RAP DAN RAK 2024-2025 sehingga visi dan misi 2024-2025 belum di tetapkan.

d) Upaya Yang di Lakukan Untuk Mencapai Indikator

a. Penyerapan anggaran

1. Mengevaluasi dan menjadwal ulang kegiatan yang belum dapat direalisasikan
2. Mengoptimalkan proses pembayaran dengan mekanisme LS
3. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran setiap bulan

b. Konsistensi

1. Melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana penarikan Dana (RPK/RPD) diawal tahun anggaran
2. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan.
3. Menyusun revisi RPK dan RPD untuk kegiatan – kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Optimalisasi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tagihan



2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kecukupan pagu anggaran untuk suatu kegiatan dan melakukan optimalisasi atas sisa pagu anggaran melalui mekanisme revisi anggaran
3. Melakukan kegiatan sesuai dengan ketersediaan pagu efektif.

e) *Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan*

1. Capaian realisasi anggaran sebesar 82,88% terhadap pagu awal menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup baik. Tingginya realisasi anggaran terhadap pagu efektif yang mencapai 99,35% mencerminkan efektivitas pengendalian anggaran setelah dilakukan penyesuaian. Kondisi ini perlu dipertahankan dengan mendorong penetapan pagu efektif lebih awal sehingga dapat dijadikan dasar pengendalian pelaksanaan anggaran sejak awal tahun. Selain itu, proses penyesuaian anggaran diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja dan output kegiatan.
2. Perbedaan tingkat deviasi yang cukup signifikan antar bagian mencerminkan ketimpangan dalam kapasitas perencanaan dan pengendalian anggaran. Bagian dengan tingkat deviasi tinggi perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan khusus dalam penyusunan rencana penarikan dana dan pengelolaan anggaran. Sementara itu, bagian dengan kinerja stabil dapat dijadikan rujukan dalam penerapan praktik pengelolaan anggaran yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi pelaksanaan anggaran di seluruh bagian.

f) *Kendala/Masalah yang dihadapi*

Kendala / masalah yang dihadapi terkait indikator tersebut diatas sebagai berikut:

- 1) Terdapat blokir anggaran yang tidak mengurangi jumlah pagu, sehingga presentase realisasi anggaran lebih sedikit karena menggunakan pembilang dengan total pagu. Total pagu yang diberlakukan blokir sesuai peraturan presiden sehingga tidak dapat direalisasikan dan tetap menjadi nilai denominasi realisasi anggaran
- 2) Adanya pembatasan kegiatan seperti kegiatan pertemuan dengan LS/LP diluar kantor.



- 3) Tidak meratanya realisasi anggaran setiap Triwulan, sehingga pada triwulan akhir dilakukan pencapaian realisasi anggaran dengan cepat

g) *Pemecahan Masalah*

BKK Palembang mengambil langkah pemecahan masalah terkait kendala tersebut diatas :

- a. Melakukan revisi anggaran terhadap pagu yang realisasi output tercapai dan melakukan revisi sisa anggaran pada kegiatan yg belum dianggarkan sebelumnya
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan sehingga ketercapaian realisasi anggaran merata setiap triwulan.

h) *Efisiensi penggunaan sumber daya*

Efisiensi sumber daya yang dipergunakan saat ini adalah efisiensi anggaran. Saat ini digunakan rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \frac{0,01}{20} \times 50\%$$

$$NE = 50,025\%$$

NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi Rincian Output

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya

- Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator, kemudian hitung pagu dan realisasi anggaran
- Hitung capaian kinerja
- Hitung efisiensi sesuai rumus
- Hitung nilai efisiensi

Untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi rincian output
PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator (16.723.695.000)
Cki : Capaian Kinerja Indikator (99,35)
RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator (16.614.677.759)/99,35

$$E = \frac{(16.723.695.000 \times 99,35) - 16.614.677.759}{(16.723.695.000 \times 99,35)} \times 100\%$$
$$E = 0,01\%$$

Capaian kegiatan Indikator Persentase Realiasi Anggaran tahun 2025 dari **dari Pagu Efektif sebesar 103,57%** (target 96 dan terealisasi 99,43) dan capaian realisasi anggaran di hitung **dari Pagu sebelum blokir sebesar 86,74%**. (target 96 dan terealisasi 83,27). Realisasi anggaran **dari Pagu Efektif** sebesar Rp **16.614.677.759** atau **99,35%** dan **dari Pagu sebelum blokir 82,88%**. Indikator Persentase Realiasi Anggaran telah terlaksana **efisien** dengan nilai efisiensi sebesar **50.025%**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Balai Kekarantinaan Kesehatan Palembang telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan. Sasaran tersebut diatas dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menitiberatkan pada pengendalian penyakit dan faktor risiko di pintu masuk negara atau wilayah sesuai dengan tupoksi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan

1. Pencapaian Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam tahun 2025 semester I target dan realisasi dengan 8 Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN dengan target tahunan **0,92** indeks dan realisasi sebesar **0,99** indeks
 - b. Indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sengan target tahunan sebesar **100%** dan realisasi sebesar **100%**
 - c. Indikator Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN dengan target tahunan **0,97** indeks dan realisasi sebesar **1,06**
 - d. Indikator Nilai kinerja anggaran dengan target tahunan **88** dan realisasi sebesar **94,64**
 - e. Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan target tahunan **96** dengan realisasi sebesar **97,39**
 - f. Indikator Kinerja Implementasi WBK satker dengan target tahunan **85** dan realisasi sebesar **94,19**
 - g. Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan **85%** dan realisasi sebesar **117,10%**
 - h. Indikator Persentase realisasi anggaran dengan target tahunan **96%** dan realisasi sebesar **99,43%**
2. Capaian Kinerja BKK Palembang Tahun 2025 sebesar %.
3. Seluruh indikator BKK Palembang telah mencapai target
4. Realisasi Anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Palembang Pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp 16.614.677.759,-** dari pagu total sebesar **Rp. 20.046.624.000,-** dengan persentase sebesar **99,43%**



(Pagu Efektif) dan 83,27% (Pagu awal) dengan sisa anggaran Rp. 3.431.946.241,-.

B. TINDAK LANJUT

Berikut ini rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Palembang sebagai berikut :

1. Target indikator kinerja yang sudah tercapai di tahun 2025.
2. Tahun 2026 agar tetap dilakukan monitoring dan evaluasi untuk indikator kinerja setiap bulan.
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta eksekusi kegiatan yang relevan dengan jadwal sehingga pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.
4. Mengoptimalkan kegiatan dan penyerapan anggaran berdasarkan pagu efektif TA 2026 sehingga output kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target tahunan.
5. Menyusun strategi optimalisasi IKPA seperti melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang dan modal untuk indikator penyerapan anggaran dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
6. Meningkatkan koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
7. Melibatkan pimpinan untuk komitmen bersama khususnya dalam ketercapaian output kegiatan di seluruh wilayah kerja BKK Palembang dan penyerapan anggaran pagu efektif TA 2026.
8. Meningkatkan jejaring kerja dengan pengguna jasa pada Besar Kekarantinaan Kesehatan Palembang.

LAMPIRAN



DATA DUKUNG INDIKATOR PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	TW I	TW II	TW III	TW IV	JML JPL	% CAPAIAN BANGKOM 20 JPL
1	EMMILYA ROSA, SKM, MKM	197305251997032001	18	0	24	0	42	100%
2	dr. JANE ARIESTA, M.Kes	197104072006042002	24	0	18,8	4	46,8	100%
3	dr. BOBBY WIDYAWATI, M.Kes	197408082006042012	49	77,5	45,5	7,9	179,9	100%
4	dr. NENI KARNANI, M.Kes	197711022008012016	13	12	55	43	123	100%
5	ASRITA FAJRIANI, SKM, M.Kes	197701122006042002	56	49	43,5	10	158,5	100%
6	RUDY R, SKM, M.Kes	198603082009121003	70	47,5	0	13	130,5	100%
7	dr. FENTY WARDHA, M.Kes	197005082002122003	15	0	42	6,4	63,4	100%
8	dr. AMELIA, M.Kes	196910052001122002	169,6	115,2	82	30,4	397,2	100%
9	dr. ARTINEKE, M.Kes	197708232005012008	127	56	0	61	244	100%
10	HERIYANTO, ST, MKM	197505211999031002	2	0	433	0	435	100%
11	MARADEN SIRAIT, SKM, M.K.M.	197511132000121002	42	0	8	0	50	100%
12	DWI MARINAJATI, SKM, M.Kes	198203212006042003	17	0	18	108,3	143,3	100%
13	MERRY NATALIA PANJAITAN, M.Kes	198212232009122002	20	0	48	0	68	100%
14	FAHMI RIZAL, S.Kep, Ners, M.Kes	197712082005011004	0	75	0	4	79	100%
15	dr. FEBI ARYA HIDAYAT, Sp.K.P	198002022009031003	0	0	22	0	22	100%
16	AMRULLAH ALWI, SKM	196802201992031002	52	5,3	0	4	61,3	100%
17	dr. RISNAH AFRI YANTI	197604072006042011	0	0	35	22	57	100%
18	dr. LINDA SUNARSIH, M.Kes.	197609112009032001	16	115	134	18,5	283,5	100%
19	ABU YASIN, SKM	197408301999031003	9	25	0	2	36	100%
20	HALIMA, SKM	197511142002122001	41	11,3	78	59	189,3	100%
21	SYAHRIAL AD, SKM	197412121999031002	0	0	86	4	90	100%
22	YULIA ANITA, SKM	198205132005012010	288,2	183,1	92,9	46	610,2	100%
23	NOVATRIX, SKM, MKM	198211282006042007	200	113	55,3	55	423,3	100%
24	DIAN PURNAMA, SKM	197207051997031010	39	38	0	0	77	100%
25	DENI TRI HANDOKO, S.Kom, M.Si	198410132006041002	0	0	48,9	0	48,9	100%
26	YULIANISITIN, SKM, M.Kes	197807032010012007	47	0	0	4	51	100%
27	DWI HASTUTI, SKM	197507182002122003	41	81	22	42	186	100%
28	NELLY YUNIARTI SYAMSIYUS, AMF	198101142003122003	14	0	18	14	46	100%
29	HENDRA, SKM	197311031994031001	0	28	0	0	28	100%
30	IRA TRIMULYATI, SKM	198309242006042001	51	12,5	37	9	109,5	100%
31	SUPRIHATIN, AMAK	198402012005012001	64	0	2	6	72	100%
32	AIDIL FITRIANSYAH, SKM, M.K.M	198008132006041001	40	0	0	0	40	100%
33	dr. LIESE MARGARETHA ALFA	198609232015032001	124,5	173,3	0	7	304,8	100%
34	dr. FAMELIA	198703092015032001	35	37,1	45	7	124,1	100%
35	SRI SETIAWATI, SKM, M.Epid	198107022005012004	0	7	11	16	34	100%
36	AHMAD RUDI ASHARI, SKM	197205032000031001	77,3	11	0	0	88,3	100%
37	HERNNY SARASWATI, S.E.	197904022005012002	2	0	45	10	57	100%
38	ARBAI RAMADHANI, SKM	198705012012121001	14	10	5	28	57	100%
39	RINI LESTARI, SKM	197203292006042001	78	126,1	46	69,9	320	100%
40	TAUFIQ PERDANA KUSUMA, S.E.	197601202006041002	0	15	12	0	27	100%
41	MIRA SUSILAWATI	197906212006042002	38	0	30	4	72	100%
42	REZI BERLI DARiska, S.Kom	199103202015031001	81,9	236	25	43	385,9	100%
43	RATIH KUSUMA WIJAYA, SE	198409102015032001	20	3,9	0	37	60,9	100%
44	SUBIANTORO, SKM, M.Kes	198807302010121007	55	32,3	0	28	115,3	100%
45	RETNO PUSPITA PUTRI, SKM	199205172015032001	49	2	16	21	88	100%
46	HAERUL LATIF, SKM, M.K.M	198712252010121004	37	69	9	49	164	100%
47	YUDO ARIYANTO, SKM	197610111997031003	0	45,5	10	4	59,5	100%
48	WAHYU PUPUT ARI SUSANTO, SKM, M.K.M	198410272006041001	0	0	15	14	29	100%
49	ASWIN DWIYONO, S.Kom, M.Kom	198802132015031001	20	12	13	6	51	100%
50	HARRY CAHYA MAULANA, SKM	198711122015031001	36,3	4	21	0	61,3	100%
51	NOVITA EVA SANTI, SKM, M.K.M	198211202009122001	32	34	6	8	80	100%

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	TW I	TW II	TW III	TW IV	JML JPL	% CAPAIAN BANGKOM 20 JPL
52	RAHMAT SALEH, SKM, M.M	198307282008011002	48	2	53	44	147	100%
53	CATUR SUGIONO, SE	198610262009121005	26,9	42	14	7	89,9	100%
54	YEZZI ANRIAH, SKM	197905202008042001	0	48,5	44	43	135,5	100%
55	LUCHIANA, SKM	198801182010122001	0	187,1	22,3	4	193,4	100%
56	SALEH IMANSYAH, AMAK	198905272011011003	91	12,5	4	27	134,5	100%
57	IZZUDDIN, SKM	198107212009121008	28	7	2	6	41	100%
58	GULIANO GANDY, SKM, M.Kes	198508112010121004	20	0	3	14	37	100%
59	WAHYU PRIYADI, SKM	198902272010121005	8	0	13	13	32	100%
60	RUSMA TAMBUNAN, SKM	199105282014022001	10	3	47	4	64	100%
61	INDAH PERMATASARI, SKM	199001282012122001	12	0	10	28	50	100%
62	YASMI LESTARI	199201122015032002	7	10	8	51	76	100%
63	PEGGY HISTAVONE, SKM	197701252008122001	41	22	0	18	79	100%
64	RESSY FITRIANA, S.Kep	198406302012122001	90	18	37	117	280	100%
65	FIRNI OKTARIKA YULANDARI	198810122015032001	38	0	0	4	40	100%
66	DELLA ROSALIA, S.Kep, Ners	198811242014022002	12	0	11,5	4	27,5	100%
67	DWI WIRA DHARMA YANI, SKM	198804252014122004	60	85	10	6,5	161,5	100%
68	SATRIAWAN WIJAYA, S.A.P	198809072009121001	27	39	34	47	147	100%
69	APRIAN	198604092015031001	64	0	31	20	115	100%
70	DIRAN SAPUTRA, SKM	199009202015031002	0	0	23	21	44	100%
71	ERMALIANI, SKM	199108042015032002	49	3	47	8	107	100%
72	FIRZA AMRO, S.Kep, Ners, SKM	199002192015031001	0	0	94	0	94	100%
73	SEPTI RUSTINA, SKM	199309132015032001	8	60,3	152,6	93,4	314,3	100%
74	MUSYARIFAH	199708072020122007	4	81,9	18	4	107,9	100%
75	NING AYU MULIA	199411122020122004	15	11	0	9,3	35,3	100%
76	AZANIA JULIARTA	199507142022032002	22	29,1	13	30	94,1	100%
77	MASREN MARULITUA PANJAITAN	199509272022031001	18	0	6	0	24	100%
78	NOVY STEVANI PRATIWI	199809052022032004	0	55	0	10	65	100%
79	SATRIA KESUMA PUTRA	199711252022031002	0	40	0	0	40	100%
80	BAGOES PRASETYO	199804012022031003	0	0	14	9	23	100%
81	ACHMAD SAZALI	198806282024211015	42	13	13	4	72	100%
82	APRIANI	199004292024212027	40	3	34	12,5	89,5	100%
83	ERMA YUNITA	199306182024212043	40	12	18,5	39	109,5	100%
84	dr. AHMAD SUTRI RIZAL	199909262025061008	0	24	86	729,4	839,4	100%
85	MELYSA RHUWAYDA, S.Si.	199212302025062001	0	27	67,2	74	168,2	100%
86	WIDIRA RAHMAWATI, S.Ikom.	199402262025062002	0	80,4	101	33	214,4	100%
87	YUSIANI KAMALIA, S.Kom.	199807112025062008	0	72	125	69	266	100%
88	ANDINI ANGGUN PRATIWI	199208162025062001	0	32,3	81,5	13,8	127,6	100%
89	MELDRICK ANDRIES	19920526202511061	0	0	0	96	96	100%



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
<https://p2.kemkes.go.id>

Nomor : PS.08.02/C.I/7475/2025

23 Desember 2025

Hal : Penyampaian Hasil Desk Reviu Implementasi WBK Satker
UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Yth. (daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pertemuan Desk Reviu Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen P2 Nomor PS.08.02/C.I/6305/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Desk Reviu Kinerja Indikator "Implementasi WBK Satker" di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 dan Surat Tugas Plt Direktur Jenderal P2 Nomor PS.08.02/C/4638/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Surat Tugas an Indra Jaya, SKM, M.Epid dkk untuk melakukan Desk Reviu Kinerja Indikator "Implementasi WBK Satker" di Lingkungan UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 27 s.d. 31 Oktober yang dilaksanakan di Gedung Record Center Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat, bersama ini kami sampaikan laporan beserta hasil penilaian Desk Reviu Implementasi Satker WBK Satker UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit,



dr. Andi Saguni, MA

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdig.go.id/verifyPDF>

Lampiran 1

Nomor : PS.08.02/C.I/7475/2025
Tanggal : 23 Desember 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala BBKK Denpasar
2. Kepala BBKK Makassar
3. Kepala BBKK Medan
4. Kepala BBKK Soekarno Hatta
5. Kepala BBKK Surabaya
6. Kepala BKK Kelas I Ambon
7. Kepala BKK Kelas I Balikpapan
8. Kepala BKK Kelas I Banda Aceh
9. Kepala BKK Kelas I Banjarmasin
10. Kepala BKK Kelas I Banten
11. Kepala BKK Kelas I Dumai
12. Kepala BKK Kelas I Jayapura
13. Kepala BKK Kelas I Kendari
14. Kepala BKK Kelas I Manado
15. Kepala BKK Kelas I Padang
16. Kepala BKK Kelas I Palembang
17. Kepala BKK Kelas I Probolinggo
18. Kepala BKK Kelas I Samarinda
19. Kepala BKK Kelas I Semarang
20. Kepala BKK Kelas I Tanjung Pinang
21. Kepala BKK Kelas I Tarakan
22. Kepala BKK Kelas I Ternate
23. Kepala BKK Kelas II Bitung
24. Kepala BKK Kelas II Jambi
25. Kepala BKK Kelas II Kupang
26. Kepala BKK Kelas II Lhokseumawe
27. Kepala BKK Kelas II Manokwari
28. Kepala BKK Kelas II Merauke
29. Kepala BKK Kelas II Palangkaraya
30. Kepala BKK Kelas II Pangkalpinang
31. Kepala BKK Kelas II Sabang
32. Kepala BKK Kelas II Sampit
33. Kepala BKK Kelas II Sorong
34. Kepala LKK Entikong
35. Kepala LKK Labuan Bajo

Sekretaris Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit,



dr. Andi Saguni, MA

Lampiran 2

Nomor : PS.08.02/C.I/7475/2025
Tanggal : 23 Desember 2025

Rekapitulasi Nilai Kinerja Implementasi WBK Satker Bidang Kekarantinaan Kesehatan

No	Satuan Kerja	KOMPONEN PENGUNGKIT														KOMPONEN HASIL			TOTAL PENGUNGKIT + HASIL		
		Manajemen Perubahan		Penataan Tatalaksana		Penataan Sistem manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		TOTAL PENGUNGKIT		TOTAL PENGUNGKIT Pemenuhan + Reform	Birokrasi Bersih Akuntabel		Pelayanan Publik yang Prima		
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		IPAK	Capaian Kinerja Lebih Baik	IPKP		
1	BBKK Denpasar	3.36	3.80	3.17	3.50	4.34	5.00	5.00	5.00	6.30	7.50	5.00	5.00	27.18	29.80	56.98	17.01	5.00	16.70	38.72	95.69
2	BBKK Makassar	3.77	3.58	2.29	3.00	4.59	4.25	5.00	5.00	5.73	6.88	5.00	5.00	26.38	27.71	54.09	16.32	3.75	14.83	34.90	88.99
3	BBKK Medan	4.00	4.00	3.14	3.50	4.49	3.26	4.74	4.75	5.49	7.50	4.29	4.16	26.15	27.18	53.33	16.67	5.00	16.14	37.81	91.14
4	BBKK Soekarno Hatta	3.52	3.67	3.25	3.50	4.32	2.25	5.00	5.00	7.15	7.50	4.54	4.59	27.78	26.51	54.29	16.36	5.00	14.04	35.41	89.70
5	BBKK Surabaya	3.52	2.56	2.60	3.25	3.09	4.25	5.00	4.51	5.97	7.50	4.78	5.00	24.95	27.07	52.02	16.32	3.75	15.88	35.95	87.97
6	BKK Kelas I Ambon	2.58	3.33	2.44	3.50	4.54	2.25	4.58	4.75	4.56	7.50	4.50	4.28	23.21	25.61	48.81	16.63	5.00	16.01	37.64	86.45
7	BKK Kelas I Balikpapan	3.81	2.95	2.02	2.75	4.42	4.25	5.00	4.26	6.14	6.88	4.78	4.81	26.17	25.90	52.07	16.01	2.50	15.88	34.39	86.46
8	BKK Kelas I Banda Aceh	3.78	4.00	3.50	3.50	4.52	4.25	5.00	4.75	6.50	7.50	4.83	5.00	28.13	29.00	57.13	16.45	5.00	16.77	38.22	95.35
9	BKK Kelas I Banjarmasin	3.39	3.25	2.85	3.25	4.71	2.25	5.00	5.00	4.77	3.88	3.42	3.76	24.14	21.39	45.53	17.50	5.00	16.01	38.51	84.04
10	BKK Kelas I Banten	3.60	4.00	3.50	3.50	4.88	5.00	5.00	4.00	6.97	6.88	4.96	5.00	28.90	28.37	57.27	16.58	3.75	16.36	36.69	93.97
11	BKK Kelas I Dumai	4.00	4.00	3.50	3.00	4.88	1.50	5.00	5.00	7.25	7.50	4.08	3.76	28.70	24.76	53.47	16.76	5.00	14.66	36.41	89.88
12	BKK Kelas I Jayapura	3.83	3.42	2.18	2.50	4.63	2.25	4.84	4.75	6.69	7.50	2.67	3.35	24.84	23.77	48.61	17.15	5.00	16.32	38.47	87.08
13	BKK Kelas I Kendari	2.31	2.00	2.81	3.17	3.84	2.75	3.74	3.75	4.37	7.50	3.71	3.54	20.77	22.70	43.47	16.80	5.00	14.74	36.54	80.01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Satuan Kerja	KOMPONEN PENGUNGKIT														KOMPONEN HASIL			TOTAL PENGUNGKIT + HASIL		
		Manajemen Perubahan		Penataan Tatalaksana		Penataan Sistem manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		TOTAL PENGUNGKIT		TOTAL PENGUNGKIT Pemenuhan + Reform	Birokrasi Bersih Akuntabel		Pelayanan Publik yang Prima		
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		IPAK	Capaian Kinerja Lebih Baik	IPKP		
14	BKK Kelas I Manado	3.24	3.67	2.85	3.00	4.75	4.25	4.01	4.50	7.50	7.50	4.88	5.00	27.23	27.92	55.15	16.81	5.00	16.65	38.46	93.60
15	BKK Kelas I Padang	3.77	4.00	2.89	3.50	4.34	3.00	5.00	5.00	5.72	6.25	4.83	5.00	26.55	26.75	53.30	16.66	5.00	13.35	35.01	88.31
16	BKK Kelas I Palembang	3.89	3.64	3.31	3.50	4.75	5.00	4.84	4.50	7.50	7.50	4.96	5.00	29.25	29.14	58.39	16.72	2.50	16.58	35.80	94.19
17	BKK Kelas I Probolinggo	2.89	3.00	3.04	3.00	4.63	3.00	4.43	4.00	5.80	6.88	5.00	5.00	25.79	24.87	50.67	17.50	5.00	17.50	40.00	90.67
18	BKK Kelas I Samarinda	2.99	2.84	3.22	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.50	7.50	4.83	5.00	28.55	27.34	55.88	17.17	5.00	16.85	39.02	94.90
19	BKK Kelas I Semarang	3.30	4.00	3.42	3.00	4.75	4.25	5.00	5.00	6.78	6.88	4.92	5.00	28.17	28.13	56.29	16.14	2.50	15.66	34.31	90.60
20	BKK Kelas I Tanjung Pinang	3.83	4.00	2.90	1.50	4.52	4.25	5.00	5.00	7.13	6.88	4.23	2.80	27.62	24.43	52.04	17.50	5.00	17.50	40.00	92.04
21	BKK Kelas I Tarakan	3.19	3.67	3.33	3.00	4.63	5.00	5.00	5.00	6.56	6.25	4.71	5.00	27.42	27.92	55.34	17.50	2.50	16.45	36.45	91.79
22	BKK Kelas I Ternate	2.17	1.33	2.42	3.50	4.63	5.00	3.85	3.50	3.86	4.50	4.96	5.00	21.88	22.83	44.71	14.04	5.00	15.88	34.93	79.64
23	BKK Kelas II Bitung	2.83	4.00	1.47	3.17	4.09	1.75	0.63	1.50	3.98	7.50	2.03	2.49	15.03	20.40	35.44	17.50	5.00	17.50	40.00	75.44
24	BKK Kelas II Jambi	3.72	3.80	2.18	3.00	4.45	2.75	4.57	5.00	4.93	7.50	3.32	4.16	23.18	26.21	49.39	16.72	3.75	16.72	37.19	86.59
25	BKK Kelas II Kupang	2.19	2.94	2.22	3.00	4.25	4.25	4.84	3.77	6.19	6.25	4.42	5.00	24.11	25.21	49.32	16.06	5.00	13.96	35.01	84.33
26	BKK Kelas II Lhokseumawe	1.86	1.28	1.44	2.50	4.19	4.25	4.01	3.50	3.93	6.88	5.00	5.00	20.43	23.40	43.83	17.50	5.00	17.50	40.00	83.83
27	BKK Kelas II Manokwari	3.58	2.00	3.31	3.50	4.75	5.00	5.00	4.51	6.69	7.50	4.57	4.59	27.90	27.09	54.99	16.80	5.00	16.54	38.34	93.33
28	BKK Kelas II Merauke	4.00	4.00	3.50	3.50	4.63	5.00	5.00	5.00	7.50	7.17	5.00	5.00	29.63	29.67	59.29	16.23	5.00	16.54	37.77	97.06
29	BKK Kelas II Palangkaraya	4.00	4.00	2.83	3.00	4.75	3.00	5.00	4.25	7.50	7.50	4.63	4.16	28.71	25.91	54.62	17.46	5.00	15.49	37.94	92.57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Satuan Kerja	KOMPONEN PENGUNGKIT														KOMPONEN HASIL			TOTAL PENGUNGKIT + HASIL		
		Manajemen Perubahan		Penataan Tata laksana		Penataan Sistem manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		TOTAL PENGUNGKIT		TOTAL PENGUNGKIT Pemenuhan + Reform	Birokrasi Bersih Akuntabel		Pelayanan Publik yang Prima		
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	IPAK	Capaian Kinerja Lebih Baik	IPKP			
30	BKK Kelas II Pangkalpinang	3.77	4.00	3.50	3.50	4.59	4.25	5.00	5.00	6.25	7.50	5.00	5.00	28.10	29.25	57.35	16.49	5.00	16.55	38.04	95.39
31	BKK Kelas II Sabang	3.41	2.15	2.31	3.25	4.45	4.25	4.84	3.75	5.83	6.88	4.81	5.00	25.64	25.27	50.91	15.18	2.50	15.58	33.26	84.17
32	BKK Kelas II Sampit	3.08	4.00	3.38	3.50	4.88	5.00	5.00	5.00	6.69	5.63	4.96	5.00	27.97	28.13	56.10	16.22	5.00	16.06	37.28	93.38
33	BKK Kelas II Sorong	3.78	3.08	2.64	3.25	3.75	3.50	5.00	3.75	5.89	7.50	4.32	4.13	25.38	25.21	50.60	17.02	3.75	14.88	35.64	86.24
34	LKK Entikong	1.92	0.33	1.03	2.00	4.34	4.25	5.00	3.71	2.10	6.25	2.78	2.50	17.18	19.04	36.21	15.93	2.50	17.50	35.93	72.14
35	LKK Labuan Bajo	3.72	3.17	2.50	2.25	4.54	5.00	4.84	5.00	5.12	3.88	4.96	5.00	25.69	24.30	49.99	15.75	5.00	15.93	36.68	86.66

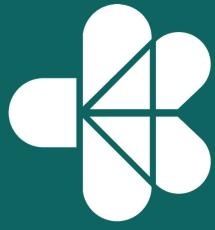
Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit,



dr. Andi Saguni, MA

Keterangan :

- P = Aspek Pemenuhan
- R = Aspek Reform
- IPAK = Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survei Eksternal)
- IPKP = Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)



**Kemenkes
BKK Palembang**

**LAPORAN
HASIL
ANALISIS
REALISASI
ANGGARAN**

2025

www.bkkpalembang.com





BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2025

2025

Jalan Letjen. Harun Sohar No. 22
Palembang 30152

INFOGRAFIS

“Capaian realisasi mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel”





REALISASI APBN TA 2025

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Periode Januari S/D Desember

PAGU ANGGARAN
REALISASI

Rp 20.046.624.000
Rp 16.614.677.759

82,88%

REALISASI PER JENIS BELANJA

51

Anggaran 12.585.140.000
Realisasi 12.541.894.127

99,66%

52

53,85% → 7.330.853.000 Anggaran
3.948.014.082 Realisasi

53

Anggaran 130.631.000
Realisasi 124.769.550

95,51%

REALISASI PER KEGIATAN

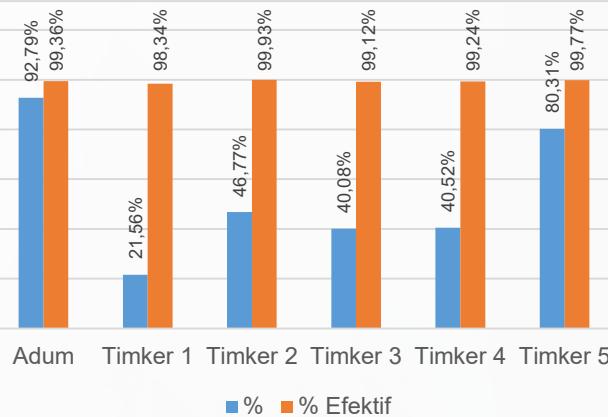
4249 Kekarantinaan Kesehatan

Realisasi 1.352.743.809
37,80% dari target

4815 Dukungan Manajemen

Realisasi 15.261.933.950
92,68% dari target

REALISASI PER BAGIAN



REALISASI PER SUMBER DANA

RM

85,95%

Anggaran

18.687.489.000

Realisasi

16.062.459.443

PNBP

40,63%

Anggaran

1.359.135.000

Realisasi

552.218.316

TARGET PENERIMAAN
REALISASI

Rp 1.580.400.000

354,75%

Rp 5.606.399.030

KINERJA REALISASI ANGGARAN TERBAIK

Timker 2

Timker 5

Adum

3

2



Catatan :

Penilaian dengan mengukur capaian realisasi efektif terbesar dan nilai deviasi terkecil.

REALISASI PENERIMAAN PER AKUN

2.464.030

130.290.000

3.367.895.000

2.105.750.000

■ 425129 | BMN

■ 425314 | Karkes

■ 425313 | Faskes

■ 425315 | Vaksin

ANALISIS

**“Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan
untuk optimalisasi kinerja”**



**LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) REALISASI ANGGARAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2025**

A. POKOK PERMASALAHAN

Dalam menganalisa realisasi anggaran per periode bulan, terdapat sejumlah permasalahan pokok yang sering muncul dan perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual. Selisih yang signifikan antara keduanya menunjukkan adanya kelemahan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Realisasi yang jauh lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan kurangnya efektivitas dalam penyerapan dana, sementara realisasi yang terlalu tinggi bisa menjadi indikasi adanya belanja yang tidak sesuai perencanaan awal.

Di samping itu, perubahan kebijakan dan penyesuaian regulasi pada tingkat nasional, seperti refocusing dan realokasi anggaran, turut memberikan pengaruh terhadap struktur pagu dan prioritas kegiatan. Akibatnya, capaian kinerja belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat penyerapan anggaran yang telah terealisasi.

B. DATA DAN FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. DIPA dan RKAKL Tahun Anggaran 2025 beserta revisinya :



REV. KE	DIGITAL STAMP	TANGGAL	PAGU			BLOKIR	PAGU EFEKTIF	KETERANGAN
			RM	PNBP	JUMLAH			
0	2989-4038-0862-1067	02/12/2024	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 1.279.812.000	Rp 18.634.575.000	Self Blokir
1	2544-0207-6511-0408	21/02/2025	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 3.402.929.000	Rp 16.511.458.000	Self Blokir
2	2544-0207-6511-0408	10/04/2025	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 3.402.929.000	Rp 16.511.458.000	Revisi RPD
3	5242-2314-0081-8429	31/07/2025	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.591.458.000	Buka Blokir
4	5242-2314-0081-8429	13/08/2025	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.591.458.000	Relokasi Internal
5	5242-2314-0081-8429	25/08/2025	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.591.458.000	Revisi Akun Outsourcing
6	5242-2314-0081-8429	26/09/2025	Rp 18.555.252.000	Rp 1.359.135.000	Rp 19.914.387.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.591.458.000	Revisi RPD
7	9520-2011-5582-0003	23/10/2025	Rp 18.687.489.000	Rp 1.359.135.000	Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.723.695.000	Penambahan 001
8	9520-2011-5582-0003	09/12/2025	Rp 18.687.489.000	Rp 1.359.135.000	Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.723.695.000	Revisi Pagu Minus 51

2. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		
1	4249 DUKUNGAN PELAYANAN KEKARANTINAAN DI PINTU MASUK NEGARA DAN WILAYAH	PAGU	Rp -	Rp 3.461.216.000	Rp 117.397.000	Rp 3.578.613.000	
		REALISASI	Rp -	Rp 1.238.796.759	Rp 113.947.050	Rp 1.352.743.809	
		SISA	Rp -	Rp 2.222.419.241	Rp 3.449.950	Rp 2.225.869.191	
2	4815 DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM DI DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 3.869.637.000	Rp 13.234.000	Rp 16.468.011.000	
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 2.709.217.323	Rp 10.822.500	Rp 15.261.933.950	
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 1.160.419.677	Rp 2.411.500	Rp 1.206.077.050	
GRAND TOTAL		PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 7.330.853.000	Rp 130.631.000	Rp 20.046.624.000	
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 3.948.014.082	Rp 124.769.550	Rp 16.614.677.759	
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 3.382.838.918	Rp 5.861.450	Rp 3.431.946.241	

3. Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA)

(dalam ribuan)

JENIS BELANJA	PER BULAN											TOTAL	
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
51	449.559	904.804	1.759.282	904.805	904.805	1.759.282	904.805	904.804	904.804	907.305	910.965	1.369.920	12.585.140
52	208.719	530.114	1.148.986	750.701	790.789	754.837	585.560	396.388	450.831	495.374	736.356	482.198	7.330.853
53	0	0	13.234	117.397	0	0	0	0	0	0	0	0	130.631
TOTAL	658.278	1.434.918	2.921.502	1.772.903	1.695.594	2.514.119	1.490.365	1.301.192	1.355.635	1.402.679	1.647.321	1.852.118	20.046.624

4. Realisasi Anggaran

(dalam ribuan)

JENIS BELANJA	PER BULAN											TOTAL	
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
51	427.690	872.857	1.805.957	881.614	877.094	1.817.041	889.737	906.379	903.120	905.596	923.485	1.331.327	12.541.894
52	17.855	159.240	233.631	240.233	227.001	524.404	478.212	243.607	418.365	582.153	401.617	421.696	3.948.014
53	0	0	0	10.823	0	0	0	0	54.007	59.940	0	340	125.110
TOTAL	445.545	1.032.096	2.039.588	1.132.669	1.104.094	2.341.446	1.367.949	1.149.985	1.375.492	1.547.689	1.325.102	1.753.363	16.615.018

5. Persentase Deviasi Halaman III DIPA

JENIS BELANJA	PER BULAN												DEVIASI
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
51	4,86%	3,53%	2,65%	2,56%	3,06%	3,28%	1,67%	0,17%	0,19%	0,19%	1,37%	2,82%	2,20%
52	91,45%	69,96%	79,67%	68,00%	71,29%	30,53%	18,33%	38,54%	7,20%	17,52%	45,46%	12,55%	45,87%
53	0,00%	0,00%	100,00%	90,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,90%
DEVIASI	32,10%	24,50%	60,77%	53,78%	24,79%	11,27%	6,67%	12,91%	2,46%	5,90%	15,61%	5,12%	21,32%

6. Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA

JENIS BELANJA	PER BULAN												NILAI IKPA
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52	91,45	69,96	79,67	68,00	71,29	30,53	18,33	38,54	7,20	17,52	45,46	12,55	45,87
53	100,00	100,00	100,00	90,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15,90
NILAI IKPA	32,10	24,50	60,77	53,78	24,79	11,27	6,67	12,91	100,00	5,90	15,61	5,12	21,32

7. Realisasi Pendapatan PNBP

(dalam ribuan)

JENIS BELANJA	PER BULAN												TOTAL
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
425129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.464	0	0	2.464
425811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425313	25.480	8.860	1.830	1.260	2.970	7.900	13.080	9.840	11.660	14.100	13.920	19.390	130.290
425314	172.935	150.555	170.605	146.200	163.445	172.285	192.215	184.800	187.895	190.520	185.730	188.565	2.105.750
425315	505.505	198.495	64.330	25.430	67.150	272.580	381.295	283.245	339.805	381.100	370.070	478.890	3.367.895
TOTAL	703.920	357.910	236.765	172.890	233.565	452.765	586.590	477.885	539.360	588.184	569.720	686.845	5.606.399

C. ANALISIS

Laporan Hasil Analisis (LHA) Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang. Adapun Realisasi anggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan Kegiatan, Sumber Dana, Jenis Belanja, dan Subbagian/Timker.

C.1. REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja merupakan wujud konkret dari pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan keuangan, seperti DIPA atau RKA-K/L. Realisasi belanja menunjukkan seberapa besar dana yang telah digunakan oleh satuan kerja dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi belanja menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas penyerapan anggaran.

Realisasi belanja tidak hanya menggambarkan aspek administratif penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi ukuran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Tingkat realisasi yang baik menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mendukung tercapainya output dan outcome organisasi sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan nilai manfaat bagi masyarakat.

C.1.1 Realisasi Anggaran Per Satker

Realisasi belanja per satuan kerja (satker) adalah jumlah dana yang telah digunakan oleh satker dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan di DIPA dalam periode tertentu. Dengan kata lain, realisasi belanja per satker menggambarkan tingkat pelaksanaan anggaran di level unit kerja pelaksana, bukan secara keseluruhan kementerian atau lembaga.

Nilai total pagu anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp20.046.624.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp12.585.140.000, Belanja Barang sebesar Rp7.330.853.000, dan Belanja Modal sebesar Rp130.631.000. Pagu anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 62,78% dari total pagu anggaran dan pagu anggaran terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,65% dari total pagu anggaran.

Realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp16.614.677.759 atau mencapai 82,88% dari total pagu anggaran. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.541.894.127 atau 99,66% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.948.014.082 atau 53,85% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.769.550 atau 95,51% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Barang/Jasa.

Tabel C.1.1. Realisasi Anggaran Per Satker Per Jenis Belanja Periode Bulan Januari s/d Desember

NO.	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	416094 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 7.330.853.000	Rp 130.631.000	Rp 20.046.624.000
		BLOKIR	Rp -	Rp 3.322.929.000	Rp -	Rp 3.322.929.000
		PAGU EFEKTIF	Rp 12.585.140.000	Rp 4.007.924.000	Rp 130.631.000	Rp 16.723.695.000
		REALISASI %	Rp 12.541.894.127 99,66%	Rp 3.948.014.082 53,85%	Rp 124.769.550 95,51%	Rp 16.614.677.759 82,88%
		% EFEKTIF	99,66%	98,51%	95,51%	99,35%
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 3.382.838.918	Rp 5.861.450	Rp 3.431.946.241
		SISA EFEKTIF	Rp 43.245.873	Rp 59.909.918	Rp 5.861.450	Rp 109.017.241

Pada tahun 2025 terdapat blokir Automatic Adjustment (AA) sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp3.322.929.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp0, Belanja Barang sebesar Rp3.322.929.000, dan Belanja Modal sebesar Rp0. Komposisi persentase nilai total blokir sebesar 16,58% dari nilai total pagu anggaran dengan rincian nilai blokir Belanja Pegawai sebesar 0,00% dari anggarannya, nilai blokir Belanja Barang sebesar 45,33% dari anggarannya, dan nilai blokir Belanja Modal sebesar 0,00% dari anggarannya.

Dikarenakan terdapat nilai blokir pada pagu anggaran yang disebabkan oleh Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara, maka perlu mekanisme penyesuaian perhitungan realisasi anggaran lewat perhitungan efektif. Pagu efektif adalah batas maksimal anggaran yang bisa digunakan setelah memperhitungkan hasil revisi, blokir, atau penyesuaian. Sedangkan realisasi efektif adalah jumlah anggaran yang sudah digunakan atau dibelanjakan dari pagu efektif tersebut.

 Nilai total pagu efektif tahun 2025 adalah sebesar Rp16.723.695.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp12.585.140.000, Belanja Barang sebesar Rp4.007.924.000, dan Belanja Modal sebesar Rp130.631.000. Pagu efektif tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 75,25% dari total pagu efektif dan pagu efektif terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,78% dari total pagu efektif.

Jika dibandingkan dengan total pagu efektif, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,35%. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 99,66%, realisasi Belanja Barang sebesar 98,51%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 95,51%. Persentase realisasi efektif tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi efektif terendah berasal dari Belanja Modal.



C.1.2 Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Realisasi belanja per kegiatan merupakan gambaran tingkat penyerapan anggaran yang telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan setiap kegiatan dalam satuan kerja. Ukuran ini menunjukkan sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Melalui analisis realisasi per kegiatan, satuan kerja dapat menilai efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan anggaran.



Pada Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang, terdapat dua kegiatan utama, yaitu 4249 (Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah) dan 4815 (Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit).

Kegiatan 4249 berfokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi teknis kekarantinaan kesehatan, termasuk pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan risiko penyakit di pintu masuk negara maupun wilayah kerja. Sedangkan, kegiatan 4815 berorientasi pada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas umum, seperti administrasi, perencanaan, serta pembinaan sumber daya yang menunjang keberlangsungan kegiatan teknis.

Tabel C.1.2. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Per Jenis Belanja Periode Bulan Januari s/d Desember

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	4249 DUKUNGAN PELAYANAN KEKARANTINAAN DI PINTU MASUK NEGARA DAN WILAYAH	PAGU	Rp -	Rp 3.461.216.000	Rp 117.397.000	Rp 3.578.613.000
		BLOKIR	Rp -	Rp 2.214.855.000	Rp -	Rp 2.214.855.000
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 1.246.361.000	Rp 117.397.000	Rp 1.363.758.000
		REALISASI %	Rp - 0,00%	Rp 1.238.796.759 35,79%	Rp 113.947.050 97,06%	Rp 1.352.743.809 37,80%
		% EFEKTIF	0,00%	99,39%	97,06%	99,19%
		SISA	Rp -	Rp 2.222.419.241	Rp 3.449.950	Rp 744.614.000
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 7.564.241	Rp 3.449.950	Rp 11.014.191

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
2	4815 DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM DI DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 3.869.637.000	Rp 13.234.000	Rp 16.468.011.000
		BLOKIR	Rp -	Rp 1.108.074.000	Rp -	Rp 1.108.074.000
		PAGU EFEKTIF	Rp 12.585.140.000	Rp 2.761.563.000	Rp 13.234.000	Rp 15.359.937.000
		REALISASI %	Rp 12.541.894.127 99,66%	Rp 2.709.217.323 70,01%	Rp 10.822.500 81,78%	Rp 15.261.933.950 92,68%
		% EFEKTIF	99,66%	98,10%	81,78%	99,36%
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 1.160.419.677	Rp 2.411.500	Rp 1.206.077.050
		SISA EFEKTIF	Rp 43.245.873	Rp 52.345.677	Rp 2.411.500	Rp 98.003.050

Pagu anggaran kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah tahun 2025 adalah sebesar Rp3.578.613.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp0, Belanja Barang sebesar Rp3.461.216.000, dan Belanja Modal sebesar Rp117.397.000. Pagu anggaran tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa sebesar 96,72% dari pagu anggaran kegiatan dan pagu anggaran terendah berasal dari Belanja Pegawai sebesar 0,00% dari pagu anggaran kegiatan.

Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sampai dengan periode bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp1.352.743.809 atau mencapai 37,80% dari total pagu anggaran kegiatan. Jumlah realisasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.238.796.759 atau 35,79% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp113.947.050 atau 97,06% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Modal dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Pegawai.

 Pagu efektif kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah tahun 2025 adalah sebesar Rp1.363.758.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp0, Belanja Barang sebesar Rp1.246.361.000, dan Belanja Modal sebesar Rp117.397.000. Pagu efektif tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa sebesar 91,39% dari total pagu efektif kegiatan dan pagu efektif terendah berasal dari Belanja Pegawai sebesar 0,00% dari total pagu efektif

Jika dibandingkan dengan pagu efektif kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,19%. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 0,00%, realisasi Belanja Barang sebesar 99,39%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 97,06%. Persentase realisasi efektif tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa dan persentase realisasi efektif terendah berasal dari Belanja Pegawai.

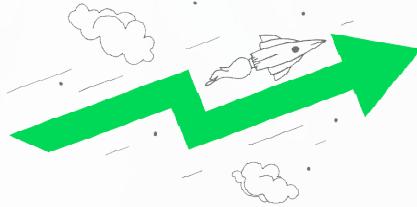


Pagu anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2025 adalah sebesar Rp16.468.011.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp12.585.140.000, Belanja Barang sebesar Rp3.869.637.000, dan Belanja Modal sebesar Rp13.234.000. Pagu anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 76,42% dari pagu anggaran kegiatan dan pagu anggaran terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,08% dari pagu anggaran

Realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sampai dengan periode bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp15.261.933.950 atau mencapai 92,68% dari total pagu anggaran kegiatan. Jumlah realisasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.541.894.127 atau 99,66% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.709.217.323 atau 70,01% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp10.822.500 atau 81,78% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Barang/Jasa.

 Pagu efektif kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2025 adalah sebesar Rp15.359.937.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp12.585.140.000, Belanja Barang sebesar Rp2.761.563.000, dan Belanja Modal sebesar Rp13.234.000. Pagu efektif tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 81,93% dari total pagu efektif kegiatan dan pagu efektif terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,09% dari total pagu efektif kegiatan.

Jika dibandingkan dengan pagu efektif kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,36%. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 99,66%, realisasi Belanja Barang sebesar 98,10%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 81,78%. Persentase realisasi efektif tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi efektif terendah berasal dari Belanja Modal.



Berdasarkan data realisasi per kegiatan sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tertinggi berasal dari kegiatan 4815 sebesar 92,68% dan realisasi anggaran terendah berasal dari 4249 sebesar 37,80%. Namun jika dilihat dari pagu efektif, persentase efektif tertinggi berasal dari kegiatan 4815 sebesar 99,36% dan persentase efektif terendah berasal dari 4249 sebesar 99,19%.

C.1.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana

Realisasi belanja per sumber dana merupakan gambaran tingkat penyerapan anggaran berdasarkan asal pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja. Pengelompokan ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumber dana dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, tujuan, serta prioritas kegiatan yang telah direncanakan.

Pemantauan terhadap realisasi belanja berdasarkan sumber dana memberikan gambaran yang jelas mengenai pola penggunaan anggaran di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang. Tingkat realisasi yang baik pada dana Rupiah Murni menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan realisasi pada dana PNBP mencerminkan kinerja layanan publik dan efektivitas satuan kerja dalam mengelola penerimaan negara bukan pajak.

Tabel C.1.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Per Jenis Belanja Periode Bulan Januari s/d Desember



NO.	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 5.971.718.000	Rp 130.631.000	Rp 18.687.489.000
		BLOKIR	Rp -	Rp 2.519.491.000	Rp -	Rp 2.519.491.000
		PAGU EFEKTIF	Rp 12.585.140.000	Rp 3.452.227.000	Rp 130.631.000	Rp 16.167.998.000
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 3.395.795.766	Rp 124.769.550	Rp 16.062.459.443
		%	99,66%	56,86%	95,51%	85,95%
		% EFEKTIF	99,66%	98,37%	95,51%	99,35%
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SISA	Rp 43.245.873	Rp 2.575.922.234	Rp 5.861.450	Rp 2.625.029.557
		SISA EFEKTIF	Rp 43.245.873	Rp 56.431.234	Rp 5.861.450	Rp 105.538.557
		PAGU	Rp -	Rp 1.359.135.000	Rp -	Rp 1.359.135.000
		BLOKIR	Rp -	Rp 803.438.000	Rp -	Rp 803.438.000
		PAGU EFEKTIF	Rp -	Rp 555.697.000	Rp -	Rp 555.697.000
		REALISASI	Rp -	Rp 552.218.316	Rp -	Rp 552.218.316
		%	0,00%	40,63%	0,00%	40,63%
		% EFEKTIF	0,00%	99,37%	0,00%	99,37%
		SISA	Rp -	Rp 806.916.684	Rp -	Rp 806.916.684
		SISA EFEKTIF	Rp -	Rp 3.478.684	Rp -	Rp 3.478.684

Pagu anggaran bersumber Rupiah Murni tahun 2025 adalah sebesar Rp18.687.489.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp12.585.140.000, Belanja Barang sebesar Rp5.971.718.000, dan Belanja Modal sebesar Rp130.631.000. Pagu anggaran bersumber Rupiah Murni tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 67,35% dari pagu anggarannya dan pagu anggaran bersumber Rupiah Murni terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,70% dari pagu anggarannya.

Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sampai dengan periode bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp16.062.459.443 atau mencapai 85,95% dari total pagu anggarannya. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.541.894.127 atau 99,66% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.395.795.766 atau 56,86% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.769.550 atau 95,51% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Barang/Jasa.

 Pagu efektif bersumber Rupiah Murni tahun 2025 adalah sebesar Rp16.167.998.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp12.585.140.000, Belanja Barang sebesar Rp3.452.227.000, dan Belanja Modal sebesar Rp130.631.000. Pagu efektif bersumber Rupiah Murni tertinggi berasal dari Belanja Pegawai sebesar 77,84% dari total pagu efektifnya dan pagu efektif bersumber Rupiah Murni terendah berasal dari Belanja Modal sebesar 0,81% dari total pagu efektifnya.

Jika dibandingkan dengan pagu efektif bersumber Rupiah Murni, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,35%. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 99,66%, realisasi Belanja Barang sebesar 98,37%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 95,51%. Persentase realisasi efektif tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi efektif terendah berasal dari Belanja Modal.



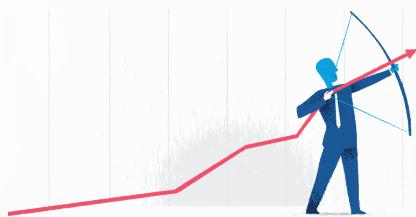
Pagu anggaran bersumber PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp1.359.135.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp0, Belanja Barang sebesar Rp1.359.135.000, dan Belanja Modal sebesar Rp0. Pagu anggaran bersumber PNBP tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa sebesar 100,00% dari pagu anggarannya dan pagu anggaran bersumber PNBP terendah berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal sebesar 0,00% dari pagu anggarannya.

Realisasi anggaran bersumber PNBP sampai dengan periode bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp552.218.316 atau mencapai 40,63% dari total pagu anggarannya. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp552.218.316 atau 40,63% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal karena tidak terdapat pagu anggarannya.



Pagu efektif bersumber PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp555.697.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp0, Belanja Barang sebesar Rp555.697.000, dan Belanja Modal sebesar Rp0. Pagu efektif bersumber PNBP tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa sebesar 100,00% dari total pagu efektifnya dan pagu efektif bersumber PNBP terendah berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal sebesar 0,00% dari pagu anggarannya.

Jika dibandingkan dengan pagu efektif bersumber PNBP, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,37%. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 0,00%, realisasi Belanja Barang sebesar 99,37%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 0,00%. Persentase realisasi efektif tertinggi berasal dari Belanja Barang/Jasa dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Pegawai dan Belanja Modal karena tidak terdapat pagu anggarannya.



Berdasarkan data realisasi per sumber dana sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tertinggi berasal dari sumber dana RM sebesar 85,95% dan realisasi anggaran terendah berasal dari PNBP sebesar 40,63%. Namun jika dilihat dari pagu efektif, persentase efektif tertinggi berasal dari sumber dana PNBP sebesar 99,37% dan persentase efektif terendah berasal dari RM sebesar 99,35%.

C.1.4 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Realisasi belanja per jenis belanja merupakan gambaran pelaksanaan anggaran berdasarkan klasifikasi penggunaan dana pada masing-masing kelompok belanja. Pengelompokan ini umumnya meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda.

Tingkat realisasi pada masing-masing jenis belanja mencerminkan pola penyerapan anggaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Jika realisasi belanja pegawai menunjukkan persentase tertinggi, hal ini biasanya menggambarkan bahwa komponen personalia telah berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan operasional. Sebaliknya, apabila realisasi belanja modal lebih rendah, hal tersebut bisa diakibatkan oleh faktor teknis seperti keterlambatan pengadaan, proses administrasi yang panjang, atau perubahan kebutuhan kegiatan. Informasi ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pengelolaan anggaran, pengendalian pelaksanaan belanja, serta bahan penyusunan laporan keuangan dan perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

Tabel C.1.4.1. Selisih Antara Rencana dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

(dalam ribuan)

JENIS BELANJA	PER BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
51	-21.869	-31.947	46.675	-23.191	-27.711	57.759	-15.068	1.575	-1.684	-1.709	12.520	-38.593
52	-190.864	-370.874	-915.355	-510.468	-563.788	-230.433	-107.348	-152.781	-32.466	86.779	-334.739	-60.502
53	0	0	0	-106.575	0	0	0	0	54.007	59.940	0	340
SELISIH	-212.733	-402.822	-868.680	-640.234	-591.500	-172.673	-122.416	-151.207	19.857	145.010	-322.219	-98.755
DEVIASI	32,10%	24,50%	60,77%	53,78%	24,79%	11,27%	6,67%	12,91%	2,46%	5,90%	15,61%	5,12%

Rata-rata selisih antara rencana dan realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember sebesar -Rp284.864.353 dengan nilai rata-rata deviasi sebesar 21,32%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 60,77% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 2,46%. Untuk memperoleh nilai maksimal (100) pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA perlu memperhatikan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar $\pm 5\%$. Nilai deviasi diatas ambang batas menunjukkan bahwa kurangnya efektivitas dalam penyerapan dana.

Karena rentang nilai yang berbeda antara masing-masing jenis belanja dapat menyebabkan perbandingan secara langsung menjadi kurang representatif, maka diperlukan penelaahan terhadap data yang lebih faktual dan proporsional. Oleh karena itu, dilakukan penarikan kembali data deviasi per jenis belanja guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat penyimpangan antara pagu dan realisasi, sekaligus sebagai dasar analisis yang lebih objektif dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran.

Tabel C.1.4.2. Deviasi Per Jenis Belanja Per Bulan

JENIS BELANJA	PER BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
51	4,86%	3,53%	2,65%	2,56%	3,06%	3,28%	1,67%	0,17%	0,19%	0,19%	1,37%	2,82%
52	91,45%	69,96%	79,67%	68,00%	71,29%	30,53%	18,33%	38,54%	7,20%	17,52%	45,46%	12,55%
53	0,00%	0,00%	100,00%	90,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DEVIASI	32,10%	24,50%	60,77%	53,78%	24,79%	11,27%	6,67%	12,91%	2,46%	5,90%	15,61%	5,12%



Jenis Belanja 51 (Belanja Pegawai) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 2,20%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 4,86% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,17%. Sampai dengan bulan ini, Jenis Belanja 51 (Belanja Pegawai) mencatatkan 12 kali nilai deviasi sesuai target;

51

Jenis Belanja 52 (Belanja Barang/Jasa) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 45,87%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 91,45% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 7,20%. Sampai dengan bulan ini, Jenis Belanja 52 (Belanja Barang/Jasa) tidak pernah mencapai nilai deviasi sesuai target;

52

Jenis Belanja 53 (Belanja Modal) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 15,90%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 100,00% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 0,00%. Sampai dengan bulan ini, Jenis Belanja 53 (Belanja Modal) mencatatkan 10 kali nilai deviasi sesuai target. Perlu diingat bahwa Jenis Belanja 53 (Belanja Modal) rencana penarikannya tidak rutin setiap bulan, sehingga nilai deviasi 0,00% tidak bisa dianggap sepenuhnya sebuah keberhasilan capaian.

53

Berdasarkan data deviasi per Jenis Belanja sampai dengan periode bulan Desember dengan mengabaikan deviasi 0,00% atau yang tidak terdapat data rencana penarikan dapat disimpulkan bahwa Jenis Belanja 51 mencatatkan nilai deviasi terendah pada bulan Agustus sebesar 0,17%, sedangkan Jenis Belanja 53 mencatatkan nilai deviasi tertinggi pada bulan Maret sebesar 100,00%. Perlu menjadi perhatian juga bahwa Jenis Belanja dengan kinerja paling stabil jika diambil dari nilai rata-rata deviasi terendah berasal dari Jenis Belanja 51 sebesar 2,20% dan Jenis Belanja dengan kinerja paling buruk jika diambil dari nilai rata-rata deviasi tertinggi berasal dari Jenis Belanja 52 sebesar 45,87%.

C.1.5 Realisasi Anggaran Per Bagian

Realisasi belanja per bagian merupakan tingkat penyerapan atau penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bagian atau unit kerja internal dalam satuan kerja sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian. Dengan kata lain, realisasi belanja per bagian menggambarkan seberapa besar anggaran telah digunakan oleh setiap bagian organisasi, baik bagian administratif maupun tim teknis dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Realisasi anggaran per bagian sampai dengan periode bulan Desember adalah sebagai berikut :

A

Subbag Adum (Sub Bagian Administrasi Umum) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp16.320.908.000 dengan realisasi sebesar Rp15.143.797.537 atau 92,79% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan pagu efektifnya sebesar Rp15.241.534.000, maka persentase realisasinya menjadi 99,36%;

01

Timker 1 (Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp580.232.000 dengan realisasi sebesar Rp125.116.939 atau 21,56% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan pagu efektifnya sebesar Rp127.231.000, maka persentase realisasinya menjadi 98,34%;

02

Timker 2 (Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut Dan Barang) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp254.796.000 dengan realisasi sebesar Rp119.176.730 atau 46,77% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan pagu efektifnya sebesar Rp119.261.000, maka persentase realisasinya menjadi 99,93%;

03

Timker 3 (Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp744.614.000 dengan realisasi sebesar Rp298.411.013 atau 40,08% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan pagu efektifnya sebesar Rp301.050.000, maka persentase realisasinya menjadi 99,12%;

04

Timker 4 (Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, Dan Situasi Khusus) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp1.998.971.000 dengan realisasi sebesar Rp810.039.127 atau 40,52% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan pagu efektifnya sebesar Rp816.216.000, maka persentase realisasinya menjadi 99,24%;

05

Timker 5 (Tim Kerja Layanan Publik Dan Zona Integritas) mempunyai pagu anggaran sebesar Rp147.103.000 dengan realisasi sebesar Rp118.136.413 atau 80,31% dari anggarannya. Jika dibandingkan dengan pagu efektifnya sebesar Rp118.403.000, maka persentase realisasinya menjadi 99,77%.

Berdasarkan data realisasi per bagian sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tertinggi berasal dari bagian Subbag Adum sebesar 92,79% dan realisasi anggaran terendah berasal dari Timker 1 sebesar 21,56%. Namun jika dilihat dari pagu efektif, persentase efektif tertinggi berasal dari bagian Timker 2 sebesar 99,93% dan persentase efektif terendah berasal dari bagian Timker 1 sebesar 98,34%.



Tabel C.1.5. Deviasi Per Bagian Per Bulan

BAGIAN	DEVIASI PER BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
Adum	17,09%	20,88%	3,93%	22,97%	9,85%	1,87%	5,07%	11,30%	0,71%	9,14%	12,86%	3,88%
Timker 1	100,00%	100,00%	97,15%	100,00%	76,64%	78,81%	233,83%	681,37%	54,19%	75,22%	89,04%	56,38%
Timker 2	100,00%	100,00%	58,29%	87,54%	90,54%	84,07%	58,56%	47,69%	198,84%	100,00%	80,85%	73,68%
Timker 3	100,00%	100,00%	69,35%	51,31%	67,44%	73,75%	76,44%	39,27%	42,27%	37,98%	110,34%	100,00%
Timker 4	100,00%	48,44%	99,55%	95,26%	99,74%	30,55%	4,70%	27,10%	5,43%	404,48%	48,55%	30,08%
Timker 5	100,00%	2,70%	21,41%	71,86%	41,57%	95,08%	14,78%	20,54%	60,17%	207,98%	37,30%	22,18%

Nilai deviasi per bagian adalah selisih antara realisasi dan target (atau pagu) anggaran pada masing-masing bagian dengan batas toleransi kinerja sebesar maksimal $\pm 5\%$ dari target yang telah ditetapkan. Nilai deviasi diatas ambang batas menunjukkan bahwa kurangnya efektivitas dalam penyerapan dana.

Nilai deviasi per bagian sampai dengan periode bulan Desember adalah sebagai berikut :

A

Subbag Adum (Sub Bagian Administrasi Umum) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 9,96%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 22,97% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 0,71%. Sampai dengan bulan ini, Subbag Adum berhasil mencatatkan 4 kali nilai deviasi sesuai target;

01

Timker 1 (Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 145,22%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 681,37% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 54,19%. Sampai dengan bulan ini, Timker 1 tidak pernah mencapai nilai deviasi sesuai target;

02

Timker 2 (Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut Dan Barang) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 90,00%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 198,84% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 47,69%. Sampai dengan bulan ini, Timker 2 tidak pernah mencapai nilai deviasi sesuai target;

03

Timker 3 (Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 72,35%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan November, yaitu sebesar 110,34% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 37,98%. Sampai dengan bulan ini, Timker 3 tidak pernah mencapai nilai deviasi sesuai target;

04

Timker 4 (Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, Dan Situasi Khusus) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 82,82%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 404,48% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan Juli, yaitu sebesar 4,70%. Sampai dengan bulan ini, Timker 4 berhasil mencatatkan 1 kali nilai deviasi sesuai target;

05

Timker 5 (Tim Kerja Layanan Publik Dan Zona Integritas) memiliki nilai rata-rata deviasi sebesar 57,97%. Nilai deviasi tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 207,98% dan nilai deviasi terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 2,70%. Sampai dengan bulan ini, Timker 5 berhasil mencatatkan 1 kali nilai deviasi sesuai target.

Berdasarkan data deviasi per bagian sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa Subbag Adum mencatatkan nilai deviasi terendah pada bulan September sebesar 0,71%, sedangkan Timker 1 mencatatkan nilai deviasi tertinggi pada bulan Agustus sebesar 681,37%. Perlu menjadi perhatian juga bahwa bagian dengan kinerja paling stabil jika diambil dari nilai rata-rata deviasi terendah berasal dari bagian Subbag Adum sebesar 9,96% dan bagian dengan kinerja paling buruk jika diambil dari nilai rata-rata deviasi tertinggi berasal dari Timker 1 sebesar 145,22%.



C.1.6 Realisasi Anggaran Periode Tahun 2021 s/d 2025

Realisasi anggaran selama periode tahun 2021 s/d 2025 menunjukkan perkembangan kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin efektif dan berorientasi pada pencapaian target program. Secara umum, tren realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami peningkatan kualitas penyerapan, meskipun terdapat variasi yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional, penyesuaian anggaran, serta kondisi operasional pada masing-masing tahun.

Grafik C.1.6. Perbandingan Realisasi Anggaran Periode Tahun 2021 s/d 2025



Secara garis besar, pagu anggaran periode tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami naik turun yang tidak cukup signifikan. Jika menghitung rata-rata pagu anggaran berada di kisaran angka Rp18.128.364.800. Pagu anggaran tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar Rp21.791.401.000 dan yang terendah terjadi ditahun 2021 sebesar Rp16.551.352.000.

Persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 99,35% dan yang terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 92,58%. Jika menghitung rata-rata persentase realisasi anggaran berada di kisaran angka 95,98%. Nilai rata-rata persentase realisasi anggaran tersebut sudah diatas nilai rata-rata target Indikator Realisasi Anggaran 95%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pagu Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.067.706.000 atau -23,26%. Secara persentase, realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,77%, yang mana dibanding tahun sebelumnya persentase realisasi sebesar 92,58% sedangkan tahun ini sebesar 99,35%. Dan jika dibandingkan dengan target nilai Indikator Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja, nilai persentase realisasi anggaran tahun ini sudah diatas nilai target indikator 96%.

C.2. REALISASI PENERIMAAN

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan indikator kinerja penting dalam pengelolaan anggaran satuan kerja karena mencerminkan kemampuan unit pelaksana teknis dalam menghasilkan pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat maupun kegiatan operasional lainnya. Pada periode pelaporan, target pendapatan PNBP telah ditetapkan melalui DIPA sebagai dasar acuan pencapaian penerimaan yang harus direalisasikan selama tahun anggaran.

Dalam pelaksanaannya, realisasi PNBP dianalisis dengan membandingkan besaran target PNBP dengan nilai realisasi yang berhasil dihimpun sampai dengan periode tertentu, serta menghitung persentase capaian penerimaan untuk melihat tingkat efektivitas penghimpunan pendapatan. Selain itu, analisis juga memperhatikan pola tren penerimaan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya untuk melihat arah perkembangan kinerja pendapatan dan potensi peningkatan atau penurunan penerimaan di masa mendatang. Capaian PNBP berpengaruh langsung terhadap kemampuan satuan kerja dalam mendukung kegiatan layanan dan operasional yang dibiayai dari sumber pendapatan tersebut, khususnya pada aspek peningkatan mutu pelayanan, pemenuhan kebutuhan operasional, serta keberlanjutan pembiayaan pada tahun anggaran berjalan.



C.2.1 Rencana Perkiraan Penerimaan PNBP

Rencana Perkiraan Penerimaan PNBP adalah dokumen perencanaan yang memuat estimasi besar PNBP yang akan diperoleh oleh kementerian/lembaga atau satuan kerja dalam satu periode anggaran tertentu, yang disusun secara sistematis berdasarkan identifikasi potensi penerimaan, analisis realisasi historis tahun-tahun sebelumnya, kebijakan dan regulasi tarif yang berlaku, serta proyeksi volume dan jenis kegiatan layanan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan rencana ini dilakukan secara terukur dan realistik dengan mempertimbangkan perkembangan tren penerimaan, dinamika perubahan regulasi, kapasitas dan kesiapan layanan, serta kondisi ekonomi dan operasional yang dapat memengaruhi tingkat penerimaan, sehingga rencana yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penetapan target PNBP, pengendalian pelaksanaan penerimaan, serta bahan evaluasi kinerja dan perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

Berdasarkan fungsional, jenis pendapatan PNBP pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang terbagi menjadi 3 jenis kode penerimaan, yaitu 425313 (Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan), 425314 (Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan), dan 425315 (Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan).

Tabel C.2.1. Rencana Perkiraan Penerimaan PNBP Tahun 2025

(dalam ribuan)

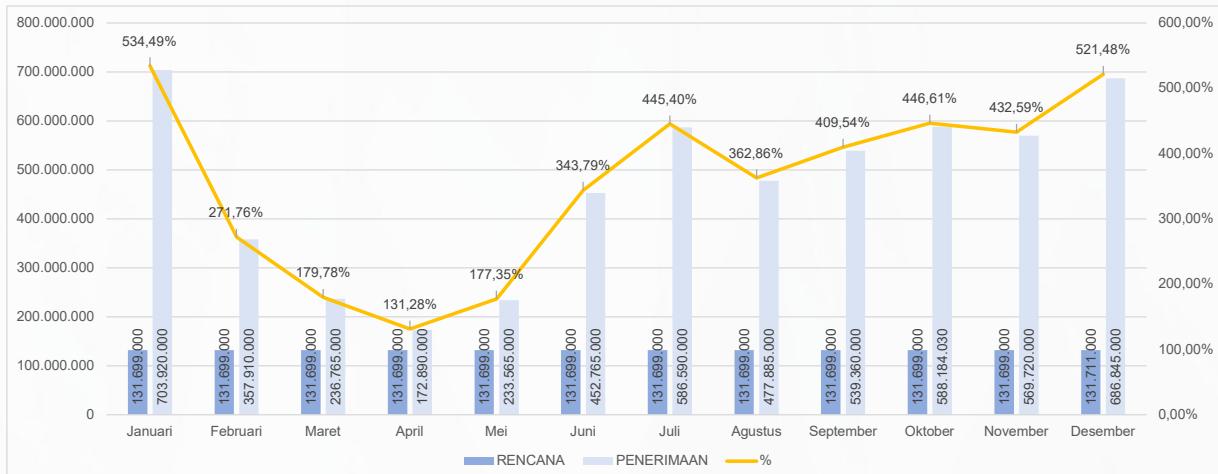
KODE	PERKIRAAN PENERIMAAN PNBP												
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
425313	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	966	974	11.600
425314	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.208	117.212	1.406.500
425315	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	162.300
TOTAL	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.699	131.711	1.580.400

Pada tahun 2025, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang memiliki target penerimaan sebesar Rp1.580.400.000 dengan rincian Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp11.600.000, Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan sebesar Rp1.406.500.000, Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan sebesar Rp162.300.000. Secara komposisi perkiraan penerimaan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan sebesar 89,00% dan yang terkecil berasal dari Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan sebesar 0,73%. Secara periodik, perkiraan penerimaan PNBP tampak stabil baik secara total maupun per jenis penerimaan, ini mengindikasikan bahwa perhitungan didasarkan pada alokasi yang dibagi rata tiap bulan.

C.2.2 Realisasi Penerimaan PNBP

Realisasi penerimaan PNBP pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang adalah jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan dari layanan kekarantinaan kesehatan sesuai ketentuan tarif pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Realisasi ini menunjukkan efektivitas satuan kerja dalam memungut dan menyotorkan PNBP dari kegiatan seperti pemeriksaan alat angkut, pelayanan karantina, dan penerbitan dokumen kesehatan. Capaian tersebut dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk menilai kinerja penerimaan dan pemanfaatannya dalam mendukung operasional layanan kekarantinaan.

Grafik C.2.2. Perbandingan Perkiraan dan Realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2025



Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan periode bulan Desember sebesar Rp4.920.240.875 atau mencapai 311,33% dari target penerimaan yang ditetapkan. Penerimaan PNBP tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar Rp703.920.000 atau mencapai 534,49% dari target penerimaan yang ditetapkan dan yang terendah terjadi pada bulan April sebesar Rp172.890.000 atau mencapai 131,28% dari target penerimaan yang ditetapkan. Secara umum, nilai penerimaan PNBP selama periode Januari sampai dengan Desember cenderung naik dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp467.199.919 atau 354,74% per bulan melampaui target rencana penerimaan bulanan.

Jumlah tersebut terdiri dari 425129 (Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya) sebesar Rp2.464.030 atau mencapai 100,00%, 425811 (Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah) sebesar Rp0 atau mencapai 0,00%, 425313 (Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan) sebesar Rp110.919.390 atau mencapai 956,20%, 425314 (Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan) sebesar Rp1.917.373.565 atau mencapai 136,32%, 425315 (Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan) sebesar Rp2.889.483.890 atau mencapai 1780,34%. Dari 5 jenis kode penerimaan tersebut diatas hanya 3 jenis kode penerimaan yang dapat membiayai kegiatan, yaitu 425313, 425314, dan 425315 atau dikenal sebagai penerimaan fungsional.



Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-148/MK/AG/2025 Tanggal 09 Juli 2025 Hal : Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kementerian Kesehatan bahwa Besaran penggunaan dana PNBP pada Balai Besar/Balai/Loka Kekarantinaan Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit paling tinggi sebesar 86%. Maka sampai dengan periode bulan Desember, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dapat menggunakan dana PNBP hingga senilai Rp4.231.407.153, ini berarti juga terdapat kelebihan realisasi penerimaan atas target PNBP senilai Rp2.872.263.153 yang bisa dimanfaatkan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan pada laporan hasil analisis realisasi anggaran merupakan bagian yang memuat rangkuman evaluatif terhadap pelaksanaan anggaran selama periode pelaporan. Bagian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan, serta menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

Dengan demikian, kesimpulan menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pada periode berikutnya agar pelaksanaan anggaran dapat berlangsung lebih optimal dan akuntabel.

Adapun kesimpulan pada laporan hasil analisis realisasi anggaran periode ini sebagai berikut :

01

Realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp16.614.677.759 atau mencapai 82,88% dari total pagu anggaran. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp12.541.894.127 atau 99,66% dari anggarannya, realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.948.014.082 atau 53,85% dari anggarannya, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp124.769.550 atau 95,51% dari anggarannya. Persentase realisasi anggaran tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi terendah berasal dari Belanja Barang/Jasa.

02

Jika dibandingkan dengan total pagu efektif, realisasi anggaran sampai dengan periode bulan Desember 2025 mencapai 99,35%. Jumlah realisasi anggaran tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar 99,66%, realisasi Belanja Barang sebesar 98,51%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 95,51%. Persentase realisasi efektif tertinggi berasal dari Belanja Pegawai dan persentase realisasi efektif terendah berasal dari Belanja Modal.

03

Berdasarkan data realisasi per kegiatan sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tertinggi berasal dari kegiatan 4815 sebesar 92,68% dan realisasi anggaran terendah berasal dari 4249 sebesar 37,80%. Namun jika dilihat dari pagu efektif, persentase efektif tertinggi berasal dari kegiatan 4815 sebesar 99,36% dan persentase efektif terendah berasal dari 4249 sebesar 99,19%.

04

Berdasarkan data realisasi per sumber dana sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tertinggi berasal dari sumber dana RM sebesar 85,95% dan realisasi anggaran terendah berasal dari PNBP sebesar 40,63%. Namun jika dilihat dari pagu efektif, persentase efektif tertinggi berasal dari sumber dana PNBP sebesar 99,37% dan persentase efektif terendah berasal dari RM sebesar 99,35%.

05

Berdasarkan data deviasi per Jenis Belanja sampai dengan periode bulan Desember dengan mengabaikan deviasi 0,00% atau yang tidak terdapat data rencana penarikan dapat disimpulkan bahwa Jenis Belanja 51 mencatatkan nilai deviasi terendah pada bulan Agustus sebesar 0,17%, sedangkan Jenis Belanja 53 mencatatkan nilai deviasi tertinggi pada bulan Maret sebesar 100,00%. Perlu menjadi perhatian juga bahwa Jenis Belanja dengan kinerja paling stabil jika diambil dari nilai rata-rata deviasi terendah berasal dari Jenis Belanja 51 sebesar 2,20% dan Jenis Belanja dengan kinerja paling buruk jika diambil dari nilai rata-rata deviasi tertinggi berasal dari Jenis Belanja 52 sebesar 45,87%.

06

Berdasarkan data deviasi per bagian sampai dengan periode bulan Desember dapat disimpulkan bahwa Subbag Adum mencatatkan nilai deviasi terendah pada bulan September sebesar 0,71%, sedangkan Timker 1 mencatatkan nilai deviasi tertinggi pada bulan Agustus sebesar 681,37%. Perlu menjadi perhatian juga bahwa bagian dengan kinerja paling stabil jika diambil dari nilai rata-rata deviasi terendah berasal dari bagian Subbag Adum sebesar 9,96% dan bagian dengan kinerja paling buruk jika diambil dari nilai rata-rata deviasi tertinggi berasal dari Timker 1 sebesar 145,22%.

07

Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan periode bulan Desember sebesar Rp4.920.240.875 atau mencapai 311,33% dari target penerimaan yang ditetapkan. Penerimaan PNBP tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar Rp703.920.000 atau mencapai 534,49% dari target penerimaan yang ditetapkan dan yang terendah terjadi pada bulan April sebesar Rp172.890.000 atau mencapai 131,28% dari target penerimaan yang ditetapkan. Secara umum, nilai penerimaan PNBP selama periode Januari sampai dengan Desember cenderung naik dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp467.199.919 atau 354,74% per bulan melampaui target rencana penerimaan bulanan.

E. REKOMENDASI

Rekomendasi dalam laporan hasil analisis realisasi anggaran merupakan bagian yang memuat saran, masukan, atau tindak lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada periode tertentu. Bagian ini berfungsi sebagai panduan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan anggaran agar pelaksanaan pada periode berikutnya menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi disusun berdasarkan temuan dan analisis atas penyimpangan, hambatan, atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan anggaran, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan. Dengan demikian, rekomendasi menjadi acuan bagi pimpinan dan bagian terkait dalam mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan, mempertahankan capaian positif, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran.

Adapun rekomendasi pada laporan hasil analisis realisasi anggaran periode ini sebagai berikut :

01

Capaian realisasi anggaran sebesar 82,88% terhadap pagu awal menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup baik. Tingginya realisasi anggaran terhadap pagu efektif yang mencapai 99,35% mencerminkan efektivitas pengendalian anggaran setelah dilakukan penyesuaian. Kondisi ini perlu dipertahankan dengan mendorong penetapan pagu efektif lebih awal sehingga dapat dijadikan dasar pengendalian pelaksanaan anggaran sejak awal tahun. Selain itu, proses penyesuaian anggaran diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan capaian kinerja dan output kegiatan.

02

Perbedaan realisasi anggaran antar kegiatan menunjukkan adanya variasi kualitas perencanaan dan kesiapan pelaksanaan. Kegiatan dengan realisasi rendah terhadap pagu awal perlu menjadi perhatian melalui evaluasi terhadap desain kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta kapasitas pelaksana. Sementara itu, kegiatan dengan kinerja realisasi yang tinggi dapat dijadikan contoh praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, kesenjangan kinerja antar kegiatan dapat diminimalkan pada periode anggaran berikutnya.

03

Rendahnya realisasi bersumber dana PNBP terhadap pagu awal namun sangat tinggi terhadap pagu efektif menunjukkan bahwa perencanaan awal PNBP masih bersifat konservatif. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi PNBP ke depan perlu dilakukan lebih akurat dengan mempertimbangkan tren historis dan potensi layanan. Di sisi lain, pengelolaan anggaran yang bersumber dari RM perlu dijaga konsistensinya antara perencanaan awal dan kebutuhan riil agar penyesuaian anggaran dapat diminimalkan dan pelaksanaan anggaran menjadi lebih stabil.

04

Tingginya deviasi pada beberapa jenis belanja menunjukkan bahwa rencana penarikan dana belum sepenuhnya mencerminkan pola pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Untuk itu, penyusunan rencana penarikan dana perlu disesuaikan dengan kesiapan kontrak dan jadwal pelaksanaan kegiatan, khususnya pada jenis belanja dengan deviasi rata-rata tinggi. Monitoring dan evaluasi deviasi secara berkala juga perlu diperkuat agar potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dapat segera dikoreksi.

05

Perbedaan tingkat deviasi yang cukup signifikan antar bagian mencerminkan ketimpangan dalam kapasitas perencanaan dan pengendalian anggaran. Bagian dengan tingkat deviasi tinggi perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan khusus dalam penyusunan rencana penarikan dana dan pengelolaan anggaran. Sementara itu, bagian dengan kinerja stabil dapat dijadikan rujukan dalam penerapan praktik pengelolaan anggaran yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi pelaksanaan anggaran di seluruh bagian.

06

Capaian penerimaan PNBP yang jauh melampaui target menunjukkan kinerja penerimaan yang sangat baik dan perlu dipertahankan. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi indikator bahwa target penerimaan yang ditetapkan masih relatif rendah. Oleh karena itu, penetapan target PNBP pada periode selanjutnya perlu disesuaikan agar lebih mencerminkan potensi riil. Selain itu, pola penerimaan bulanan perlu dianalisis lebih lanjut untuk mendukung perencanaan anggaran yang lebih akurat serta peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan.



Diteliti oleh :
Kasubbag Administrasi Umum



Heriyanto, ST, MKM
NIP 197505211999031002

Palembang, 06 Januari 2026
Disusun oleh :
Analis Anggaran Ahli Pertama

Rezi Berli Dariska, S.Kom
NIP 199103202015031001

Disetujui oleh :
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Palembang



EMMILYA ROSA, SKM, MKM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.
Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdig.go.id/verifyPDF>
Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)
<https://link.kemkes.go.id/dumaskkppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

IKHTISAR

“Menyajikan gambaran singkat capaian dan kinerja secara menyeluruh”





**IKHTISAR REALISASI ANGGARAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG TA 2025
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER**

A. REALISASI BELANJA PER SATKER

NO.	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	416094 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 7.330.853.000	Rp 130.631.000	Rp 20.046.624.000
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 3.948.014.082	Rp 124.769.550	Rp 16.614.677.759
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 3.382.838.918	Rp 5.861.450	Rp 3.431.946.241

B. REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO.	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	4249 DUKUNGAN PELAYANAN KEKARANTINAAN DI PINTU MASUK NEGARA DAN WILAYAH	PAGU	Rp -	Rp 3.461.216.000	Rp 117.397.000	Rp 3.578.613.000
		REALISASI	Rp -	Rp 1.238.796.759	Rp 113.947.050	Rp 1.352.743.809
		SISA	Rp -	Rp 2.222.419.241	Rp 3.449.950	Rp 2.225.869.191
2	4815 DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM DI DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 3.869.637.000	Rp 13.234.000	Rp 16.468.011.000
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 2.709.217.323	Rp 10.822.500	Rp 15.261.933.950
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 1.160.419.677	Rp 2.411.500	Rp 1.206.077.050

C. REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO.	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 5.971.718.000	Rp 130.631.000	Rp 18.687.489.000
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 3.395.795.766	Rp 124.769.550	Rp 16.062.459.443
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 2.575.922.234	Rp 5.861.450	Rp 2.625.029.557
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	Rp -	Rp 1.359.135.000	Rp -	Rp 1.359.135.000
		REALISASI	Rp -	Rp 552.218.316	Rp -	Rp 552.218.316
		SISA	Rp -	Rp 806.916.684	Rp -	Rp 806.916.684

D. REALISASI BELANJA PER SUB BAGIAN DAN TIM KERJA

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PAGU	Rp 12.585.140.000	Rp 3.722.534.000	Rp 13.234.000	Rp 16.320.908.000
		REALISASI	Rp 12.541.894.127	Rp 2.591.080.910	Rp 10.822.500	Rp 15.143.797.537
		SISA	Rp 43.245.873	Rp 1.131.453.090	Rp 2.411.500	Rp 1.177.110.463
2	TIMKER 1 TIM KERJA SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	PAGU	Rp -	Rp 580.232.000	Rp -	Rp 580.232.000
		REALISASI	Rp -	Rp 125.116.939	Rp -	Rp 125.116.939
		SISA	Rp -	Rp 455.115.061	Rp -	Rp 455.115.061
3	TIMKER 2 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	PAGU	Rp -	Rp 254.796.000	Rp -	Rp 254.796.000
		REALISASI	Rp -	Rp 119.176.730	Rp -	Rp 119.176.730
		SISA	Rp -	Rp 135.619.270	Rp -	Rp 135.619.270
4	TIMKER 3 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN	PAGU	Rp -	Rp 744.614.000	Rp -	Rp 744.614.000
		REALISASI	Rp -	Rp 298.411.013	Rp -	Rp 298.411.013
		SISA	Rp -	Rp 446.202.987	Rp -	Rp 446.202.987
5	TIMKER 4 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN, DAN SITUASI KHUSUS	PAGU	Rp -	Rp 1.881.574.000	Rp 117.397.000	Rp 1.998.971.000
		REALISASI	Rp -	Rp 696.092.077	Rp 113.947.050	Rp 810.039.127
		SISA	Rp -	Rp 1.185.481.923	Rp 3.449.950	Rp 1.188.931.873
6	TIMKER 5 TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS	PAGU	Rp -	Rp 147.103.000	Rp -	Rp 147.103.000
		REALISASI	Rp -	Rp 118.136.413	Rp -	Rp 118.136.413
		SISA	Rp -	Rp 28.966.587	Rp -	Rp 28.966.587

E. DEVIASI HALAMAN III DIPA PER JENIS BELANJA

NO.	JENIS BELANJA	SUMBER DANA	PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER			
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI	%
1	51 - BELANJA PEGAWAI	(A) RM	Rp 12.585.140.000	Rp 12.541.894.127	Rp 43.245.873	0,34%
		(D) PNBP	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 12.585.140.000	Rp 12.541.894.127	Rp 43.245.873	0,34%
2	52 - BELANJA BARANG	(A) RM	Rp 5.971.718.000	Rp 3.395.795.766	Rp 2.575.922.234	43,14%
		(D) PNBP	Rp 1.359.135.000	Rp 552.218.316	Rp 806.916.684	59,37%
		TOTAL	Rp 7.330.853.000	Rp 3.948.014.082	Rp 3.382.838.918	46,15%
3	53 - BELANJA MODAL	(A) RM	Rp 130.631.000	Rp 124.769.550	Rp 5.861.450	4,49%
		(D) PNBP	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 130.631.000	Rp 124.769.550	Rp 5.861.450	4,49%
GRAND TOTAL			Rp 20.046.624.000	Rp 16.614.677.759	Rp 3.431.946.241	17,12%

F. DEVIASI HALAMAN III DIPA PER SUB BAGIAN DAN TIMKER

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	JENIS BELANJA	PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER			
			RENCANA	REALISASI	DEVIASI	%
1	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	51- BELANJA PEGAWAI	Rp 12.585.140.000	Rp 12.541.894.127	Rp 43.245.873	0,34%
		52- BELANJA BARANG	Rp 3.722.534.000	Rp 2.591.080.910	Rp 1.131.453.090	30,39%
		53- BELANJA MODAL	Rp 13.234.000	Rp 10.822.500	Rp 2.411.500	18,22%
		TOTAL	Rp 16.320.908.000	Rp 15.143.797.537	Rp 1.177.110.463	7,21%
2	TIMKER 1 TIM KERJA SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	51- BELANJA PEGAWAI	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp 580.232.000	Rp 125.116.939	Rp 455.115.061	78,44%
		53- BELANJA MODAL	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 580.232.000	Rp 125.116.939	Rp 455.115.061	78,44%
3	TIMKER 2 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	51- BELANJA PEGAWAI	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp 254.796.000	Rp 119.176.730	Rp 135.619.270	53,23%
		53- BELANJA MODAL	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 254.796.000	Rp 119.176.730	Rp 135.619.270	53,23%
4	TIMKER 3 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN	51- BELANJA PEGAWAI	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp 744.614.000	Rp 298.411.013	Rp 446.202.987	59,92%
		53- BELANJA MODAL	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 744.614.000	Rp 298.411.013	Rp 446.202.987	59,92%
5	TIMKER 4 TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN, DAN SITUASI KHUSUS	51- BELANJA PEGAWAI	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp 1.881.574.000	Rp 696.092.077	Rp 1.185.481.923	63,00%
		53- BELANJA MODAL	Rp 117.397.000	Rp 113.947.050	Rp 3.449.950	2,94%
		TOTAL	Rp 1.998.971.000	Rp 810.039.127	Rp 1.188.931.873	59,48%
6	TIMKER 5 TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS	51- BELANJA PEGAWAI	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		52- BELANJA BARANG	Rp 147.103.000	Rp 118.136.413	Rp 28.966.587	19,69%
		53- BELANJA MODAL	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
		TOTAL	Rp 147.103.000	Rp 118.136.413	Rp 28.966.587	19,69%
GRAND TOTAL			Rp 20.046.624.000	Rp 16.614.677.759	Rp 3.431.946.241	17,12%

Catatan :

- Deviasi dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja;
- Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar ±5% untuk memperoleh nilai maksimal (100);
- Batas maksimal deviasi tiap bulannya sebesar 100%;
- Pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA akan tetap dilakukan paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan untuk memperbaiki nilai Deviasi pada IKPA;
- Untuk mencari Sub Bagian atau Timker dengan kinerja anggaran terbaik, maka data yang digunakan pada tabel diatas adalah RPD awal;

G. REALISASI BELANJA PER KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)

NO.	KRO - RO	PAGU	BLOKIR	REALISASI		SISA DENGAN BLOKIR		SISA DIKURANG BLOKIR	
				RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
1	4249.PEA	Rp 291.368.000	Rp 228.580.000	Rp 62.029.064	21,29%	Rp 229.338.936	78,71%	Rp 758.936	1,21%
2	4249.QAA	Rp 32.190.000	Rp 18.630.000	Rp 13.560.000	42,12%	Rp 18.630.000	57,88%	-Rp 0	0,00%
3	4249.QAH	Rp 1.983.586.000	Rp 1.005.229.000	Rp 974.519.537	49,13%	Rp 1.009.066.463	50,87%	Rp 3.837.463	0,39%
4	4249.RAB	Rp 575.599.000	Rp 385.384.000	Rp 186.644.148	32,43%	Rp 388.954.852	67,57%	Rp 3.570.852	1,88%
5	4249.TBC	Rp 695.870.000	Rp 577.032.000	Rp 115.991.060	16,67%	Rp 579.878.940	83,33%	Rp 2.846.940	2,40%
6	4815.EBA	Rp 16.173.324.000	Rp 927.495.000	Rp 15.150.935.197	93,68%	Rp 1.022.388.803	6,32%	Rp 94.893.803	0,62%
7	4815.EBB	Rp 13.234.000	Rp -	Rp 10.822.500	81,78%	Rp 2.411.500	18,22%	Rp 2.411.500	18,22%
8	4815.EBC	Rp 13.424.000	Rp 13.424.000	Rp -	0,00%	Rp 13.424.000	100,00%	Rp -	0,00%
9	4815.EBD	Rp 268.029.000	Rp 167.155.000	Rp 100.176.253	37,38%	Rp 167.852.747	62,62%	Rp 697.747	0,69%
TOTAL		Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.614.677.759	82,88%	Rp 3.431.946.241	17,12%	Rp 109.017.241	0,65%

H. REALISASI BELANJA PER RINCIAN OUTPUT (RO)

NO.	KRO - RO	PAGU	BLOKIR	REALISASI		SISA DENGAN BLOKIR		SISA DIKURANG BLOKIR	
				RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
1	4249.PEA.001	Rp 291.368.000	Rp 228.580.000	Rp 62.029.064	21,29%	Rp 229.338.936	78,71%	Rp 758.936	1,21%
2	4249.QAA.012	Rp 32.190.000	Rp 18.630.000	Rp 13.560.000	42,12%	Rp 18.630.000	57,88%	-Rp 0	0,00%
3	4249.QAH.016	Rp 198.848.000	Rp 87.616.000	Rp 108.669.785	54,65%	Rp 90.178.215	45,35%	Rp 2.562.215	2,30%
4	4249.QAH.017	Rp 484.558.000	Rp 391.012.000	Rp 92.977.496	19,19%	Rp 391.580.504	80,81%	Rp 568.504	0,61%
5	4249.QAH.U01	Rp 33.000.000	Rp 23.100.000	Rp 9.900.000	30,00%	Rp 23.100.000	70,00%	Rp -	0,00%
6	4249.QAH.U02	Rp 44.000.000	Rp 22.000.000	Rp 21.999.980	50,00%	Rp 22.000.020	50,00%	Rp 20	0,00%
7	4249.QAH.U04	Rp 160.000.000	Rp -	Rp 159.940.000	99,96%	Rp 60.000	0,04%	Rp 60.000	0,04%
8	4249.QAH.U07	Rp 24.520.000	Rp 12.260.000	Rp 12.147.984	49,54%	Rp 12.372.016	50,46%	Rp 112.016	0,91%
9	4249.QAH.U08	Rp 117.240.000	Rp 58.620.000	Rp 58.548.002	49,94%	Rp 58.691.998	50,06%	Rp 71.998	0,12%
10	4249.QAH.U09	Rp 7.712.000	Rp 3.856.000	Rp 3.854.470	49,98%	Rp 3.857.530	50,02%	Rp 1.530	0,04%
11	4249.QAH.U11	Rp 36.000.000	Rp 18.000.000	Rp 17.999.500	50,00%	Rp 18.000.500	50,00%	Rp 500	0,00%
12	4249.QAH.U12	Rp 8.600.000	Rp 5.160.000	Rp 3.440.000	40,00%	Rp 5.160.000	60,00%	Rp -	0,00%
13	4249.QAH.U13	Rp 18.020.000	Rp 9.350.000	Rp 8.670.000	48,11%	Rp 9.350.000	51,89%	Rp -	0,00%
14	4249.QAH.U14	Rp 15.768.000	Rp 2.316.000	Rp 13.379.650	84,85%	Rp 2.388.350	15,15%	Rp 72.350	0,54%
15	4249.QAH.U15	Rp 65.460.000	Rp 2.400.000	Rp 63.056.920	96,33%	Rp 2.403.080	3,67%	Rp 3.080	0,00%
16	4249.QAH.U18	Rp 14.600.000	Rp 7.650.000	Rp 6.950.000	47,60%	Rp 7.650.000	52,40%	Rp -	0,00%
17	4249.QAH.U19	Rp 66.000.000	Rp 33.000.000	Rp 32.999.750	50,00%	Rp 33.000.250	50,00%	Rp 250	0,00%
18	4249.QAH.U20	Rp 13.580.000	Rp 6.009.000	Rp 7.401.000	54,50%	Rp 6.179.000	45,50%	Rp 170.000	2,25%
19	4249.QAH.U21	Rp 6.880.000	Rp 3.680.000	Rp 3.060.000	44,48%	Rp 3.820.000	55,52%	Rp 140.000	4,37%
20	4249.QAH.U25	Rp 349.600.000	Rp 167.200.000	Rp 182.345.000	52,16%	Rp 167.255.000	47,84%	Rp 55.000	0,03%
21	4249.QAH.U28	Rp 319.200.000	Rp 152.000.000	Rp 167.180.000	52,37%	Rp 152.020.000	47,63%	Rp 20.000	0,01%
22	4249.RAB.001	Rp 575.599.000	Rp 385.384.000	Rp 186.644.148	32,43%	Rp 388.954.852	67,57%	Rp 3.570.852	1,88%
23	4249.TBC.001	Rp 695.870.000	Rp 577.032.000	Rp 115.991.060	16,67%	Rp 579.878.940	83,33%	Rp 2.846.940	2,40%
24	4815.EBA.956	Rp 33.132.000	Rp 33.132.000	Rp -	0,00%	Rp 33.132.000	100,00%	Rp -	0,00%
25	4815.EBA.958	Rp 45.339.000	Rp 22.476.000	Rp 22.662.090	49,98%	Rp 22.676.910	50,02%	Rp 200.910	0,88%
26	4815.EBA.960	Rp 14.224.000	Rp 6.224.000	Rp 7.967.573	56,01%	Rp 6.256.427	43,99%	Rp 32.427	0,41%
27	4815.EBA.962	Rp 90.174.000	Rp 14.334.000	Rp 75.835.200	84,10%	Rp 14.338.800	15,90%	Rp 4.800	0,01%
28	4815.EBA.994	Rp 15.990.455.000	Rp 851.329.000	Rp 15.044.470.334	94,08%	Rp 945.984.666	5,92%	Rp 94.655.666	0,63%
29	4815.EBB.951	Rp 13.234.000	Rp -	Rp 10.822.500	81,78%	Rp 2.411.500	18,22%	Rp 2.411.500	18,22%
30	4815.EBC.954	Rp 13.424.000	Rp 13.424.000	Rp -	0,00%	Rp 13.424.000	100,00%	Rp -	0,00%
31	4815.EBD.952	Rp 105.424.000	Rp 52.712.000	Rp 52.712.000	50,00%	Rp 52.712.000	50,00%	Rp -	0,00%
32	4815.EBD.953	Rp 84.852.000	Rp 65.880.000	Rp 18.882.100	22,25%	Rp 65.969.900	77,75%	Rp 89.900	0,47%
33	4815.EBD.955	Rp 59.829.000	Rp 42.339.000	Rp 16.910.603	28,26%	Rp 42.918.397	71,74%	Rp 579.397	3,31%
34	4815.EBD.961	Rp 17.924.000	Rp 6.224.000	Rp 11.671.550	65,12%	Rp 6.252.450	34,88%	Rp 28.450	0,24%
TOTAL		Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000 </td						

I. REALISASI BELANJA PER BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

NO.	KODE BAS	PAGU	BLOKIR	REALISASI		SISA DENGAN BLOKIR		SISA DIKURANG BLOKIR	
				RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%
1	511111	Rp 4.251.000.000	Rp -	Rp 4.250.654.700	99,99%	Rp 345.300	0,01%	Rp 345.300	0,01%
2	511119	Rp 68.000	Rp -	Rp 57.047	83,89%	Rp 10.953	16,11%	Rp 10.953	16,11%
3	511121	Rp 266.000.000	Rp -	Rp 265.932.660	99,97%	Rp 67.340	0,03%	Rp 67.340	0,03%
4	511122	Rp 89.100.000	Rp -	Rp 88.847.674	99,72%	Rp 252.326	0,28%	Rp 252.326	0,28%
5	511123	Rp 25.200.000	Rp -	Rp 25.200.000	100,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%
6	511124	Rp 541.000.000	Rp -	Rp 540.190.000	99,85%	Rp 810.000	0,15%	Rp 810.000	0,15%
7	511125	Rp 62.000.000	Rp -	Rp 61.046.514	98,46%	Rp 953.486	1,54%	Rp 953.486	1,54%
8	511126	Rp 212.715.000	Rp -	Rp 212.118.180	99,72%	Rp 596.820	0,28%	Rp 596.820	0,28%
9	511129	Rp 547.000.000	Rp -	Rp 546.134.000	99,84%	Rp 866.000	0,16%	Rp 866.000	0,16%
10	511151	Rp 13.000.000	Rp -	Rp 11.435.000	87,96%	Rp 1.565.000	12,04%	Rp 1.565.000	12,04%
11	511611	Rp 127.020.000	Rp -	Rp 126.889.398	99,90%	Rp 130.602	0,10%	Rp 130.602	0,10%
12	511619	Rp 5.000	Rp -	Rp 3.248	64,96%	Rp 1.752	35,04%	Rp 1.752	35,04%
13	511621	Rp 7.300.000	Rp -	Rp 6.527.592	89,42%	Rp 772.408	10,58%	Rp 772.408	10,58%
14	511622	Rp 2.770.000	Rp -	Rp 2.611.036	94,26%	Rp 158.964	5,74%	Rp 158.964	5,74%
15	511624	Rp 11.760.000	Rp -	Rp 11.690.000	99,40%	Rp 70.000	0,60%	Rp 70.000	0,60%
16	511625	Rp 8.640.000	Rp -	Rp 8.201.565	94,93%	Rp 438.435	5,07%	Rp 438.435	5,07%
17	511628	Rp 26.972.000	Rp -	Rp 25.270.000	93,69%	Rp 1.702.000	6,31%	Rp 1.702.000	6,31%
18	512211	Rp 29.972.000	Rp -	Rp 29.969.000	99,99%	Rp 3.000	0,01%	Rp 3.000	0,01%
19	512411	Rp 6.204.648.000	Rp -	Rp 6.170.666.113	99,45%	Rp 33.981.887	0,55%	Rp 33.981.887	0,55%
20	512414	Rp 158.415.000	Rp -	Rp 157.910.400	99,68%	Rp 504.600	0,32%	Rp 504.600	0,32%
21	521111	Rp 1.046.826.000	Rp 28.608.000	Rp 1.005.644.772	96,07%	Rp 41.181.228	3,93%	Rp 12.573.228	1,23%
22	521114	Rp 7.200.000	Rp 3.600.000	Rp 2.723.950	37,83%	Rp 4.476.050	62,17%	Rp 876.050	24,33%
23	521115	Rp 148.560.000	Rp -	Rp 141.960.000	95,56%	Rp 6.600.000	4,44%	Rp 6.600.000	4,44%
24	521119	Rp 286.557.000	Rp 239.644.000	Rp 46.629.000	16,27%	Rp 239.928.000	83,73%	Rp 284.000	0,61%
25	521211	Rp 269.520.000	Rp 79.117.000	Rp 189.664.304	70,37%	Rp 79.855.696	29,63%	Rp 738.696	0,39%
26	521213	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	100,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%
27	521219	Rp 226.712.000	Rp 191.333.000	Rp 35.719.380	15,76%	Rp 190.992.620	84,24%	-Rp 340.380	-0,96%
28	521252	Rp 4.280.000	Rp 4.280.000	Rp -	0,00%	Rp 4.280.000	100,00%	Rp -	0,00%
29	521811	Rp 464.562.000	Rp 396.881.000	Rp 67.640.398	14,56%	Rp 396.921.602	85,44%	Rp 40.602	0,06%
30	522111	Rp 268.884.000	Rp 58.884.000	Rp 186.661.654	69,42%	Rp 82.222.346	30,58%	Rp 23.338.346	11,11%
31	522112	Rp 19.968.000	Rp 11.568.000	Rp 2.102.978	10,53%	Rp 17.865.022	89,47%	Rp 6.297.022	74,96%
32	522113	Rp 17.760.000	Rp -	Rp 17.760.000	100,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%
33	522121	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp -	0,00%	Rp 1.600.000	100,00%	Rp -	0,00%
34	522141	Rp 126.968.000	Rp 10.368.000	Rp 116.600.000	91,83%	Rp 10.368.000	8,17%	Rp -	0,00%
35	522151	Rp 15.300.000	Rp 3.600.000	Rp 11.700.000	76,47%	Rp 3.600.000	23,53%	Rp -	0,00%
36	522191	Rp 1.209.099.000	Rp 404.712.000	Rp 800.005.943	66,17%	Rp 409.093.057	33,83%	Rp 4.381.057	0,54%
37	523111	Rp 301.190.000	Rp 130.640.000	Rp 169.523.722	56,28%	Rp 131.666.278	43,72%	Rp 1.026.278	0,60%
38	523121	Rp 354.250.000	Rp 137.061.000	Rp 216.501.265	61,12%	Rp 137.748.735	38,88%	Rp 687.735	0,32%
39	524111	Rp 964.329.000	Rp 707.375.000	Rp 254.331.716	26,37%	Rp 709.997.284	73,63%	Rp 2.622.284	1,02%
40	524113	Rp 1.240.760.000	Rp 559.130.000	Rp 680.845.000	54,87%	Rp 559.915.000	45,13%	Rp 785.000	0,12%
41	524114	Rp 354.528.000	Rp 354.528.000	Rp -	0,00%	Rp 354.528.000	100,00%	Rp -	0,00%
42	532111	Rp 130.631.000	Rp -	Rp 124.769.550	95,51%	Rp 5.861.450	4,49%	Rp 5.861.450	4,49%
TOTAL		Rp 20.046.069.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.614.137.759	82,88%	Rp 3.431.931.241	17,12%	Rp 109.002.241	0,65%

J. REALISASI BELANJA PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (PERSENTASE EFEKTIF)

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU	BLOKIR	REALISASI		
				RUPIAH	%	% EFEKTIF
1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	Rp 2.544.073.000	Rp 1.544.331.000	Rp 991.960.665	38,99%	99,22%
2	Presentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	Rp 251.600.000	Rp 52.750.000	Rp 198.789.980	79,01%	99,97%
3	Indeks Pengendalian Pintu Masuk Negara	Rp 87.070.000	Rp 40.742.000	Rp 46.002.104	52,83%	99,30%
4	Nilai Kinerja Anggaran	Rp 250.105.000	Rp 160.931.000	Rp 88.504.703	35,39%	99,25%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rp 16.126.995.000	Rp 898.795.000	Rp 15.131.128.034	93,82%	99,36%
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Rp 77.487.000	Rp 34.924.000	Rp 42.301.213	54,59%	99,38%
7	Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Rp 709.294.000	Rp 590.456.000	Rp 115.991.060	16,35%	97,60%
8	Persentase Realisasi Anggaran	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	100,00%
TOTAL		Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.614.677.759	82,88%	99,35%

K. REALISASI BELANJA PER SUB BAGIAN DAN TIM KERJA (PERSENTASE EFEKTIF)

NO.	SUB BAGIAN DAN TIMKER	PAGU	BLOKIR	REALISASI		
				RUPIAH	%	% EFEKTIF
1	SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	Rp 16.320.908.000	Rp 1.079.374.000	Rp 15.143.797.537	92,79%	99,36%
2	TIMKER 1 - TIM KERJA SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN	Rp 580.232.000	Rp 453.001.000	Rp 125.116.939	21,56%	98,34%
3	TIMKER 2 - TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG	Rp 254.796.000	Rp 135.535.000	Rp 119.176.730	46,77%	99,93%
4	TIMKER 3 - TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN	Rp 744.614.000	Rp 443.564.000	Rp 298.411.013	40,08%	99,12%
5	TIM KERJA 4 - TIM KERJA PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN, DAN SITUASI KHUSUS	Rp 1.998.971.000	Rp 1.182.755.000	Rp 810.039.127	40,52%	99,24%
6	TIM KERJA 5 - TIM KERJA LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS	Rp 147.103.000	Rp 28.700.000	Rp 118.136.413	80,31%	99,77%
TOTAL		Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.614.677.759	82,88%	99,35%

L. REALISASI BELANJA PER SUB KOMPONEN / SBK (PERSENTASE EFEKTIF)

NO.	SUB KOMPONEN	PAGU	BLOKIR	REALISASI		
				RUPIAH	%	% EFEKTIF
1	Koordinasi LS/LP Timker Di Wilayah Kerja	Rp 21.876.000	Rp 10.938.000	Rp 10.579.064	48,36%	96,72%
2	Rapat Dalam Kantor Dengan Kader Kesehatan	Rp 12.700.000	Rp 5.900.000	Rp 6.760.000	53,23%	99,41%
3	Koordinasi Penguanan Pangan di Bandara dan Pelabuhan	Rp 12.700.000	Rp 5.000.000	Rp 7.700.000	60,63%	100,00%
4	Rapat Kerja Bandara Sehat di Pos Bandara SMB II Palembang	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	50,00%	100,00%
5	Rapat Persiapan Pelabuhan Sehat di Wilker Boombaru Palembang	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 9.980.000	49,90%	99,80%
6	Pertemuan Jejaring Kerja Surveilans Epidemiologi LS	Rp 36.100.000	Rp 21.450.000	Rp 14.310.000	39,64%	97,68%
7	Rapat Koordinasi Persiapan, Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Rp 85.037.000	Rp 85.037.000	Rp -	0,00%	100,00%
8	Evaluasi Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Haji	Rp 82.955.000	Rp 80.255.000	Rp 2.700.000	3,25%	100,00%
9	Verifikasi RS / Klinik Yang Menerbitkan ICV	Rp 22.080.000	Rp 11.040.000	Rp 11.040.000	50,00%	100,00%
10	Pengawasan RS / Klinik Yang Menerbitkan ICV	Rp 10.110.000	Rp 7.590.000	Rp 2.520.000	24,93%	100,00%
11	Pemeriksaan Lingkungan Pra/Embarkasi/Debarkasi	Rp 57.998.000	Rp 23.128.000	Rp 34.794.000	59,99%	99,78%
12	Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan (Kualitas Air, Limbah, Makanan, Udara,	Rp 107.820.000	Rp 50.592.000	Rp 57.003.865	52,87%	99,61%
13	Uji Resistensi Insektisida di Wilayah Kerja	Rp 11.612.000	Rp 8.306.000	Rp 3.295.000	28,38%	99,67%
14	Pengolahan Limbah Medis	Rp 11.988.000	Rp -	Rp 9.736.920	81,22%	81,22%
15	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan	Rp 9.430.000	Rp 5.590.000	Rp 3.840.000	40,72%	100,00%
16	Pemeriksaan Deteksi Dini HIV/AIDS di Wilker	Rp 52.990.000	Rp 34.760.000	Rp 18.050.000	34,06%	99,01%
17	Penanganan Alat Angkut, Orang dan Barang pada Situasi KLB / Wabah /	Rp 24.304.000	Rp 16.656.000	Rp 7.648.000	31,47%	100,00%
18	Tindakan Pengendalian Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang	Rp 22.520.000	Rp 22.520.000	Rp -	0,00%	100,00%
19	Penyelidikan Epidemiologi pada Situasi KLB / Wabah / KKM	Rp 68.130.000	Rp 42.390.000	Rp 25.599.496	37,57%	99,45%
20	Pemeriksaan Deteksi Dini TB di Wilker	Rp 55.710.000	Rp 36.120.000	Rp 19.360.000	34,75%	98,83%
21	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Di Wilker Tanjung Api-api	Rp 102.528.000	Rp 102.528.000	Rp -	0,00%	100,00%
22	Review Dokumen Rencana Kontijensi Bandara SMB II Palembang	Rp 94.500.000	Rp 93.600.000	Rp 900.000	0,95%	100,00%
23	Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Penjamah Makanan	Rp 63.876.000	Rp 42.438.000	Rp 21.420.000	33,53%	99,92%
24	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan	Rp 33.000.000	Rp 23.100.000	Rp 9.900.000	30,00%	100,00%
25	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	Rp 44.000.000	Rp 22.000.000	Rp 21.999.980	50,00%	100,00%
26	Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus	Rp 160.000.000	Rp -	Rp 159.940.000	99,96%	99,96%
27	Layanan Pengendalian Vektor DBD	Rp 24.520.000	Rp 12.260.000	Rp 12.147.984	49,54%	99,09%
28	Layanan Survei Vektor PES	Rp 117.240.000	Rp 58.620.000	Rp 58.548.002	49,94%	99,88%
29	Layanan Pengendalian Vektor Diare	Rp 7.712.000	Rp 3.856.000	Rp 3.854.470	49,98%	99,96%
30	Layanan Survei Vektor DBD	Rp 36.000.000	Rp 18.000.000	Rp 17.999.500	50,00%	100,00%
31	Layanan Survei Vektor Malaria	Rp 8.600.000	Rp 5.160.000	Rp 3.440.000	40,00%	100,00%
32	Layanan Survei Vektor Diare	Rp 18.020.000	Rp 9.350.000	Rp 8.670.000	48,11%	100,00%
33	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV	Rp 15.768.000	Rp 2.316.000	Rp 13.379.650	84,85%	99,46%
34	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB	Rp 65.460.000	Rp 2.400.000	Rp 63.056.920	96,33%	100,00%
35	Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II)	Rp 14.600.000	Rp 7.650.000	Rp 6.950.000	47,60%	100,00%
36	Layanan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit di Pelabuhan	Rp 66.000.000	Rp 33.000.000	Rp 32.999.750	50,00%	100,00%
37	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (HS)	Rp 13.580.000	Rp 6.009.000	Rp 7.401.000	54,50%	97,75%
38	Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria Kategori II	Rp 6.880.000	Rp 3.680.000	Rp 3.060.000	44,48%	95,63%
39	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Embarkasi Kategori I	Rp 349.600.000	Rp 167.200.000	Rp 182.345.000	52,16%	99,97%
40	Layanan Kesehatan Haji Pada Masa Debarkasi Kategori I	Rp 319.200.000	Rp 152.000.000	Rp 167.180.000	52,37%	99,99%
41	Bahan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	Rp 88.060.000	Rp 88.060.000	Rp -	0,00%	100,00%
42	Bahan Laboratorium Kekarantinaan Kesehatan	Rp 265.305.000	Rp 239.200.000	Rp 26.068.098	9,83%	99,86%
43	Sarana dan Prasarana Kekarantinaan Kesehatan	Rp 176.275.000	Rp 12.165.000	Rp 160.576.050	91,09%	97,85%
44	Sarana dan Prasarana Pengendalian Risiko Lingkungan	Rp 27.700.000	Rp 27.700.000	Rp -	0,00%	100,00%
45	Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pelayanan dan Pendukung	Rp 18.259.000	Rp 18.259.000	Rp -	0,00%	100,00%
46	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Epidemiologi Kesehatan	Rp 154.560.000	Rp 122.010.000	Rp 31.837.729	20,60%	97,81%
47	Diklat Epid Ahli	Rp 13.320.000	Rp 13.320.000	Rp -	0,00%	100,00%
48	Workshop / Seminar / Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas	Rp 265.998.000	Rp 246.010.000	Rp 19.935.139	7,49%	99,74%
49	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Sanitarian	Rp 123.380.000	Rp 93.516.000	Rp 28.702.921	23,26%	96,11%
50	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Entomolog	Rp 88.820.000	Rp 71.056.000	Rp 16.909.271	19,04%	95,19%
51	Seminar Nasional Dalam Rangka Hari Pengendalian Nyamuk	Rp 49.792.000	Rp 31.120.000	Rp 18.606.000	37,37%	99,65%
52	Penyusunan Laporan BMN	Rp 24.849.000	Rp 24.849.000	Rp -	0,00%	100,00%
53	Penyusunan RKBMN	Rp 8.283.000	Rp 8.283.000	Rp -	0,00%	100,00%
54	Pengelolaan Informasi Publikasi dan Media Monitoring	Rp 29.315.000	Rp 8.652.000	Rp 20.662.090	70,48%	100,00%
55	Buletin Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN	Rp 9.800.000	Rp 7.600.000	Rp 2.000.000	20,41%	90,91%
56	Jejaring Komunikasi Kehumasan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 6.224.000	Rp 6.224.000	Rp -	0,00%	100,00%
57	Penyusunan dan Reviu Analisis Beban Kerja, Peta dan Informasi Jabatan	Rp 6.224.000	Rp 6.224.000	Rp -	0,00%	100,00%
58	Penyusunan dan Monev SOP AP	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 7.967.573	99,59%	99,59%
59	Pengelolaan Kantor Berhias	Rp 75.840.000	Rp -	Rp 75.835.200	99,99%	99,99%
60	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	Rp 7.167.000	Rp 7.167.000	Rp -	0,00%	100,00%
61	Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif	Rp 7.167.000	Rp 7.167.000	Rp -	0,00%	100,00%
62	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 12.241.703.000	Rp -	Rp 12.202.250.888	99,68%	99,68%
63	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 343.437.000	Rp -	Rp 339.643.239	98,90%	98,90%
64	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	Rp 225.759.000	Rp 225.759.000	Rp -	0,00%	100,00%
65	Pemeriksaan Kesehatan ASN	Rp 177.205.000	Rp 177.205.000	Rp -	0,00%	100,00%
66	Pemeliharaan Gedung dan Kantor	Rp 301.190.000	Rp 130.640.000	Rp 169.523.722	56,28%	99,40%
67	Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp 84.252.000	Rp 8.912.000	Rp 75.123.115	89,16%	99,71%
68	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4	Rp 251.739.000	Rp 109.890.000	Rp 141.378.150	56,16%	99,67%
69	Langganan Daya dan Jasa	Rp 631.525.000	Rp 98.460.000	Rp 491.231.774	77,79%	92,15%
70	Sewa Gedung Kantor Wilker	Rp 60.368.000	Rp 10.368.000	Rp 50.000.000	82,83%	100,00%
71	Operasional Perkantoran	Rp 235.077.000	Rp 46.121.000	Rp 187.695.534	79,84%	99,33%
72	Tenaga Outsourcing	Rp 1.289.640.000	Rp 43.974.000	Rp 1.245.663.912	96,59%	100,00%
73	Pelaksana Pengelola Satker	Rp 148.560.000	Rp -	Rp 141.960.000	95,56%	95,56%
74	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Rp 13.234.000	Rp -	Rp 10.822.500	81,78%	81,78%
75	Pembinaan Kepegawaian Dari/Ke Wilayah Kerja	Rp 12.684.000	Rp 12.684.000	Rp -	0,00%	100,00%
76	Pelantikan / Sertijab / Sumpah PNS	Rp 740.000	Rp 740.000	Rp -	0,00%	100,00%
77	Penyusunan e-Renggar	Rp 39.160.000	Rp 19.580.000	Rp 19.580.000	50,00%	100,00%
78	Penyusunan Dokumen RKAKL	Rp 66.264.000	Rp 33.132.000	Rp 33.132.000	50,00%	100,00%
79	Pra Evaluasi SAKIP	Rp 7.167.000	Rp 7.167.000	Rp -	0,00%	100,00%
80	Evaluasi SAKIP	Rp 24.849.000	Rp 24.849.000	Rp -	0,00%	100,00%
81	Rapat Pertemuan Koordinasi LS/LP	Rp 8.160.000	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000	50,00%	100,00%
82	Konsultasi dan Koordinasi LS/LP	Rp 44.676.000	Rp 29.784.000	Rp 14.802.100	33,13%	99,40%
83	Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E1	Rp 24.849.000	Rp 16.566.000	Rp 7.716.403	31,05%	93,16%
84	Verifikasi dan Rekonsiliasi PIPK	Rp 16.566.000	Rp 16.566.000	Rp -	0,00%	100,00%
85	Rekonsiliasi Pengelolaan PNBP	Rp 14.334.000	Rp 7.167.000	Rp 7.154.200	49,91%	99,82%
86	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Terkait Keuangan, BMN dan	Rp 4.080.000	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000	50,00%	100,00%
87	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System	Rp 6.224.000	Rp 6.224.000	Rp -	0,00%	100,00%
88	Pembangunan Zona Integritas Menuju Satker WBK / WBBM	Rp 11.700.000	Rp -	Rp 11.671.550	99,76%	99,76%
TOTAL		Rp 20.046.624.000	Rp 3.322.929.000	Rp 16.614.677.759	82,88%	99,35%

Catatan :

Jika nilai Blokir sama dengan nilai Pagu maka Persentase Efektif = 100%.

M. REALISASI PENDAPATAN PNBP PER AKUN

NO.	BULAN	KODE AKUN - JENIS PENDAPATAN					TOTAL
		425129	425811	425313	425314	425315	
1	Januari	Rp -	Rp -	Rp 25.480.000	Rp 172.935.000	Rp 505.505.000	Rp 703.920.000
2	Februari	Rp -	Rp -	Rp 8.860.000	Rp 150.555.000	Rp 198.495.000	Rp 357.910.000
3	Maret	Rp -	Rp -	Rp 1.830.000	Rp 170.605.000	Rp 64.330.000	Rp 236.765.000
4	April	Rp -	Rp -	Rp 1.260.000	Rp 146.200.000	Rp 25.430.000	Rp 172.890.000
5	Mei	Rp -	Rp -	Rp 2.970.000	Rp 163.445.000	Rp 67.150.000	Rp 233.565.000
6	Juni	Rp -	Rp -	Rp 7.900.000	Rp 172.285.000	Rp 272.580.000	Rp 452.765.000
7	Juli	Rp -	Rp -	Rp 13.080.000	Rp 192.215.000	Rp 381.295.000	Rp 586.590.000
8	Agustus	Rp -	Rp -	Rp 9.840.000	Rp 184.800.000	Rp 283.245.000	Rp 477.885.000
9	September	Rp -	Rp -	Rp 11.660.000	Rp 187.895.000	Rp 339.805.000	Rp 539.360.000
10	Oktober	Rp 2.464.030	Rp -	Rp 14.100.000	Rp 190.520.000	Rp 381.100.000	Rp 588.184.030
11	November	Rp -	Rp -	Rp 13.920.000	Rp 185.730.000	Rp 370.070.000	Rp 569.720.000
12	Desember	Rp -	Rp -	Rp 19.390.000	Rp 188.565.000	Rp 478.890.000	Rp 686.845.000
TOTAL		Rp 2.464.030	Rp -	Rp 130.290.000	Rp 2.105.750.000	Rp 3.367.895.000	Rp 5.606.399.030

Catatan :

425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

425811 | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

425313 | Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan

425314 | Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan

425315 | Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan

TERIMA KASIH

“Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya”

